



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86 /PMK.02/2017

TENTANG

STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5178);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*)/sub keluaran (*sub output*).

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018 meliputi:
  - a. Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga.
  - b. Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk satu kementerian negara/lembaga tertentu.
- (2) Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sub keluaran (*sub output*) Perencanaan, Pemeriksaan, Pendidikan, dan Pelatihan; dan
  - b. sub keluaran (*sub output*) Penelitian.

### Pasal 3

Dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2018;
- b. referensi penyusunan prakiraan maju;
- c. bahan penghitungan pagu indikatif kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2019; dan/atau
- d. referensi penyusunan Standar Biaya Keluaran untuk keluaran (*output*)/sub keluaran (*sub output*) sejenis pada kementerian negara/lembaga yang berbeda.

### Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran berfungsi sebagai estimasi.
- (2) Fungsi estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui, karena perubahan komponen tahapan dan/atau penggunaan satuan biaya yang dipengaruhi harga pasar.
- (3) Fungsi estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi pelaksanaan anggaran Standar Biaya Keluaran sub keluaran (*sub output*) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.
- (4) Besaran biaya yang dapat dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. ketersediaan alokasi anggaran; dan
  - c. prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektifitas.
- (5) Dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan revisi anggaran, pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai revisi anggaran.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan satuan biaya untuk sub keluaran (*sub output*) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b didasarkan pada hasil penilaian komite penilaian dan/atau *reviewer*;
- (2) Pedoman pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer*, dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitian sesuai dengan kualifikasi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam tata cara pelaksanaan penilaian.

Pasal 6

- (1) Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk satu kementerian negara/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Kementerian negara/lembaga bertanggungjawab atas penggunaan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018 dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2018 dan memprioritaskan pengalokasian anggarannya.
- (2) Pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018 dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian

Negara/Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

*AGW*

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juli 2017

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 916

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 86 /PMK.02/2017  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR BIAYA KELUARAN YANG BERLAKU UNTUK BEBERAPA/SELURUH  
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

A. SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PERENCANAAN, PEMERIKSAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
1	<b>Standar Biaya Keluaran Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (SBK Dokumen RKA-K/L)</b>			
	a. SBK Dokumen RKA-K/L untuk Satker Eselon I/Setingkat			
	1) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Satker Eselon I tanpa satker vertikal	1 Dokumen	63.780.000	
	2) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Satker Eselon I dengan unit vertikal 1 s.d. 6 satker	1 Dokumen	419.542.500	
	3) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)- Satker Eselon I dengan unit vertikal 7 s.d. 15 satker	1 Dokumen	767.606.250	
	4) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Satker Eselon II dengan unit vertikal 16 s.d. 34 satker	1 Dokumen	1.502.407.500	
	5) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Satker Eselon II dengan unit vertikal di atas 34 satker	1 Dokumen	1.734.450.000	
	b. SBK Dokumen RKA-K/L untuk K/L			
	1) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Kementerian/Lembaga yang hanya memiliki satu unit dan satu satker	1 Dokumen	207.000.000	
	2) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Kementerian/Lembaga dengan unit vertikal di bawah 2 s.d. 6 unit	1 Dokumen	350.700.000	
	3) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Kementerian/Lembaga dengan unit vertikal 7 s.d. 10 unit	1 Dokumen	530.300.000	
	4) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Kementerian/Lembaga dengan unit vertikal di atas 10 unit	1 Dokumen	602.200.000	
2	<b>Standar Biaya Keluaran Dokumen Laporan Kinerja (SBK Dokumen LAKIN)</b>			
	a. SBK Dokumen LAKIN untuk Satker Eselon I/Setingkat			
	1) Dokumen LAKIN Satker Eselon I tanpa satker vertikal	1 Dokumen	21.360.000	
	2) Dokumen LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal 1 s.d. 6 satker	1 Dokumen	139.947.500	
	3) Dokumen LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal 7 s.d. 15 satker	1 Dokumen	255.968.750	
	4) Dokumen LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal 16 s.d. 34 satker	1 Dokumen	500.902.500	
	5) Dokumen LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal diatas 34 satker	1 Dokumen	578.250.000	
	b. SBK Dokumen LAKIN untuk K/L			
	1) Dokumen LAKIN untuk K/L yang hanya memiliki satu unit dan satu satker	1 Dokumen	69.000.000	
	2) Dokumen LAKIN untuk K/L dengan unit vertikal 2 s.d. 6 unit	1 Dokumen	116.900.000	
	3) Dokumen LAKIN untuk K/L dengan unit vertikal 7 s.d. 10 unit	1 Dokumen	176.800.000	
	4) Dokumen LAKIN untuk K/L dengan unit vertikal diatas 10 unit	1 Dokumen	200.700.000	
3	<b>Standar Biaya Keluaran Diklat Kepemimpinan/Struktural (SBK Diklat Kepemimpinan/Struktural)</b>			
	a. Diklat Kepemimpinan Tingkat II/Pimpinan Tinggi	1 Per Peserta	30.261.000	
	b. Diklat Kepemimpinan Tingkat III/Pimpinan Administrasi	1 Per Peserta	22.125.000	
	c. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/Pimpinan Administrasi	1 Per Peserta	20.230.000	
4	<b>Standar Biaya Keluaran Diklat Prajabatan (SBK Diklat Prajabatan)</b>			
	a. Diklat Prajabatan Golongan I dan II	1 Per Peserta	9.296.000	
	b. Diklat Prajabatan Golongan III	1 Per Peserta	9.296.000	
	c. Diklat Prajabatan Kategori 1 dan Kategori 2	1 Per Peserta	2.242.000	



(dalam rupiah)

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
5	<b>Standar Biaya Keluaran Laporan Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan Negara (SBK Audit Kinerja)</b>			
	a. SBK Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama			
	1) Aceh	1 LHA	43.900.000	
	2) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Satker Eselon I	1 LHA	42.400.000	
	3) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Satker Eselon I	1 LHA	42.100.000	
	4) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)- Satker Eselon I	1 LHA	41.400.000	
	5) Jambi	1 LHA	37.700.000	
	6) Sumatera Barat	1 LHA	40.700.000	
	7) Sumatera Selatan	1 LHA	40.200.000	
	8) Lampung	1 LHA	34.200.000	
	9) Bengkulu	1 LHA	38.600.000	
	10) Bangka Belitung	1 LHA	37.800.000	
	11) Banten	1 LHA	33.000.000	
	12) Jawa Barat	1 LHA	32.400.000	
	13) D.K.I. Jakarta	1 LHA	23.300.000	
	14) Jawa Tengah	1 LHA	36.100.000	
	15) D.I. Yogyakarta	1 LHA	40.500.000	
	16) Jawa Timur	1 LHA	40.400.000	
	17) Bali	1 LHA	45.000.000	
	18) Nusa Tenggara Barat	1 LHA	41.900.000	
	19) Nusa Tenggara Timur	1 LHA	46.300.000	
	20) Kalimantan Barat	1 LHA	38.900.000	
	21) Kalimantan Tengah	1 LHA	40.200.000	
	22) Kalimantan Selatan	1 LHA	39.600.000	
	23) Kalimantan Timur	1 LHA	46.800.000	
	24) Kalimantan Utara	1 LHA	44.700.000	
	25) Sulawesi Utara	1 LHA	47.900.000	
	26) Gorontalo	1 LHA	47.600.000	
	27) Sulawesi Barat	1 LHA	48.100.000	
	28) Sulawesi Selatan	1 LHA	43.800.000	
	29) Sulawesi Tengah	1 LHA	49.700.000	
	30) Sulawesi Tenggara	1 LHA	45.500.000	
	31) Maluku	1 LHA	53.600.000	
	32) Maluku Utara	1 LHA	51.100.000	
	33) Papua	1 LHA	61.900.000	
	34) Papua Barat	1 LHA	65.100.000	
	b. SBK Audit Kinerja Dalam Kota			
	1) Aceh	1 LHA	56.800.000	
	2) Sumatera Utara	1 LHA	55.300.000	
	3) Riau	1 LHA	55.000.000	
	4) Kepulauan Riau	1 LHA	54.300.000	
	5) Jambi	1 LHA	50.600.000	
	6) Sumatera Barat	1 LHA	53.600.000	
	7) Sumatera Selatan	1 LHA	53.100.000	
	8) Lampung	1 LHA	47.100.000	
	9) Bengkulu	1 LHA	51.500.000	
	10) Bangka Belitung	1 LHA	50.700.000	
	11) Banten	1 LHA	45.900.000	
	12) Jawa Barat	1 LHA	45.300.000	
	13) D.K.I. Jakarta	1 LHA	36.200.000	
	14) Jawa Tengah	1 LHA	49.000.000	
	15) D.I. Yogyakarta	1 LHA	53.400.000	
	16) Jawa Timur	1 LHA	53.300.000	
	17) Bali	1 LHA	57.900.000	
	18) Nusa Tenggara Barat	1 LHA	54.800.000	
	19) Nusa Tenggara Timur	1 LHA	59.200.000	
	20) Kalimantan Barat	1 LHA	51.800.000	
	21) Kalimantan Tengah	1 LHA	53.100.000	
	22) Kalimantan Selatan	1 LHA	52.500.000	
	23) Kalimantan Timur	1 LHA	59.700.000	
	24) Kalimantan Utara	1 LHA	57.600.000	
	25) Sulawesi Utara	1 LHA	60.800.000	
	26) Gorontalo	1 LHA	60.500.000	
	27) Sulawesi Barat	1 LHA	61.000.000	
	28) Sulawesi Selatan	1 LHA	56.700.000	
	29) Sulawesi Tengah	1 LHA	62.600.000	
	30) Sulawesi Tenggara	1 LHA	58.400.000	
	31) Maluku	1 LHA	66.500.000	
	32) Maluku Utara	1 LHA	64.000.000	
	33) Papua	1 LHA	74.800.000	
	34) Papua Barat	1 LHA	78.000.000	
	c. SBK Audit Kinerja Luar Provinsi			
	1) Aceh	1 LHA	122.200.000	
	2) Sumatera Utara	1 LHA	117.400.000	
	3) Riau	1 LHA	139.100.000	
	4) Kepulauan Riau	1 LHA	133.600.000	
	5) Jambi	1 LHA	105.800.000	
	6) Sumatera Barat	1 LHA	122.700.000	
	7) Sumatera Selatan	1 LHA	136.300.000	
	8) Lampung	1 LHA	90.000.000	
	9) Bengkulu	1 LHA	112.100.000	
	10) Bangka Belitung	1 LHA	115.900.000	
	11) Banten	1 LHA	109.800.000	
	12) Jawa Barat	1 LHA	101.300.000	
	13) Jawa Tengah	1 LHA	99.600.000	

Abw





(dalam rupiah)

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	14) D.I. Yogyakarta	1 LHA	138.300.000	
	15) Jawa Timur	1 LHA	125.200.000	
	16) Bali	1 LHA	158.100.000	
	17) Nusa Tenggara Barat	1 LHA	124.600.000	
	18) Nusa Tenggara Timur	1 LHA	132.300.000	
	19) Kalimantan Barat	1 LHA	110.500.000	
	20) Kalimantan Tengah	1 LHA	120.500.000	
	21) Kalimantan Selatan	1 LHA	112.400.000	
	22) Kalimantan Timur	1 LHA	151.300.000	
	23) Kalimantan Utara	1 LHA	146.300.000	
	24) Sulawesi Utara	1 LHA	148.500.000	
	25) Gorontalo	1 LHA	145.800.000	
	26) Sulawesi Barat	1 LHA	145.800.000	
	27) Sulawesi Selatan	1 LHA	134.700.000	
	28) Sulawesi Tengah	1 LHA	163.800.000	
	29) Sulawesi Tenggara	1 LHA	143.400.000	
	30) Maluku	1 LHA	154.300.000	
	31) Maluku Utara	1 LHA	139.100.000	
	32) Papua	1 LHA	199.400.000	
	33) Papua Barat	1 LHA	183.600.000	

**B. SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
1	<b>SBK Riset Pembinaan/Kapasitas</b>	1 Laporan	20.000.000	
2	<b>SBK Riset Dasar</b>			
	a. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	98.000.000	
	b. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT	1 Laporan	118.500.000	
	c. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	317.000.000	
	d. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	178.400.000	
	e. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1 Laporan	93.900.000	
	f. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Hankam	1 Laporan	245.000.000	
	g. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	162.100.000	
	h. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	151.100.000	
	i. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	133.800.000	
	j. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Dalam Negeri	1 Laporan	130.000.000	
	k. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Luar Negeri	1 Laporan	240.000.000	
	l. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	1 Laporan	300.000.000	
	m. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)	1 Laporan	490.000.000	
	n. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)	1 Laporan	675.000.000	
	o. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri	1 Laporan	650.000.000	
3	<b>SBK Riset Terapan</b>			
	a. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	226.000.000	
	b. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Energi-EBT	1 Laporan	231.900.000	
	c. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	458.800.000	
	d. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	153.200.000	
	e. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1 Laporan	218.400.000	
	f. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Hankam	1 Laporan	410.200.000	
	g. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	380.800.000	
	h. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	219.000.000	
	i. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	337.500.000	
	j. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Dalam Negeri	1 Naskah	100.000.000	
	k. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Luar Negeri	1 Naskah	175.000.000	
	l. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	1 Naskah	300.000.000	
	m. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)	1 Naskah	490.000.000	
	n. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)	1 Naskah	675.000.000	
	o. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri	1 Naskah	650.000.000	
4	<b>SBK Riset Pengembangan</b>			
	a. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	578.100.000	
	b. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Energi-EBT	1 Laporan	1.134.800.000	
	c. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	1.058.100.000	
	d. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	359.600.000	
	e. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1 Laporan	412.500.000	
	f. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Hankam	1 Laporan	569.600.000	
	g. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	433.500.000	
	h. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	311.500.000	
	i. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	1.093.700.000	
	j. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan	1 Laporan	525.000.000	
5	<b>SBK Kajian Aktual Strategis</b>	1 Naskah	70.000.000	
		Kebijakan		

AGW



PENJELASAN

STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK) YANG BERLAKU UNTUK  
BEBERAPA/SELURUH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

**A. SUB KELUARAN (*SUB OUTPUT*) PERENCANAAN, PEMERIKSAAN,  
PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN**

**1. Standar Biaya Keluaran Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran  
Kementerian Negara/Lembaga (SBK Dokumen RKA-K/L)**

SBK Dokumen RKA-K/L adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan sub keluaran (*sub output*) berupa dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang disusun menurut bagian anggaran K/L. Penggunaan SBK ini mengacu ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Dokumen RKA-K/L untuk Satker Eselon I/Setingkat

SBK Dokumen RKA-K/L untuk Satker Eselon I/Setingkat adalah SBK Dokumen RKA-K/L yang digunakan oleh satuan kerja Unit organisasi lini K/L yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh Pejabat Eselon I/Setingkat. Dalam hal satker eselon I/setingkat secara organisasi membawahi satker eselon II/setingkat (termasuk eselon III/setingkat dan/atau eselon IV/setingkat yang secara struktural langsung dibawah koordinasi eselon I/setingkat) maka satuan biaya ini termasuk untuk melakukan koordinasi seluruh satker dilingkup eselon I/setingkat tersebut untuk penyusunan RKA-K/L.

b. SBK Dokumen RKA-K/L untuk K/L

SBK Dokumen RKA-K/L untuk K/L adalah SBK Dokumen RKA-K/L yang digunakan untuk melakukan koordinasi seluruh eselon I/setingkat untuk penyusunan RKA-K/L.

**2. Standar Biaya Keluaran Dokumen Laporan Kinerja (SBK  
Dokumen LAKIN)**

SBK Dokumen LAKIN adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan sub keluaran (*sub output*) berupa dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya. Penggunaan SBK ini mengacu ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Dokumen LAKIN untuk Satker Eselon I/Setingkat  
SBK Dokumen LAKIN untuk Satker Eselon I/Setingkat adalah SBK Dokumen LAKIN yang digunakan oleh satuan kerja Unit organisasi lini K/L setingkat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh Pejabat Eselon I/Setingkat.

Dalam hal satker eselon I/setingkat secara organisasi membawahi satker eselon II/setingkat (termasuk eselon III/setingkat dan/atau eselon IV/setingkat yang secara struktural langsung dibawah koordinasi eselon I/setingkat) maka satuan biaya ini termasuk untuk melakukan koordinasi seluruh satker dilingkup eselon I/setingkat tersebut.

- b. SBK Dokumen LAKIN untuk K/L  
SBK Dokumen LAKIN untuk K/L adalah SBK Dokumen LAKIN yang digunakan dalam rangka penyusunan LAKIN bagi K/L.

**3. Standar Biaya Keluaran Diklat Kepemimpinan/Struktural (SBK Diklat Kepemimpinan/Struktural)**

SBK Diklat Kepemimpinan/Struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjurangan bagi pejabat/pegawai yang telah menduduki jabatan tertentu yang terdiri dari Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV. Satuan biaya ini tidak termasuk:

- a. biaya perjalanan dinas peserta *on campuss*.  
b. biaya perjalanan dinas mentor pada saat seminar rancangan proyek perubahan dan seminar proyek perubahan, dan pajak (PPh Pasal 20).

**4. Standar Biaya Keluaran Diklat Prajabatan (SBK Diklat Prajabatan)**

SBK Diklat Prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai syarat pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Diklat Prajabatan Golongan I/II, III, dan Kategori 1 dan Kategori 2. Satuan biaya ini tidak termasuk:

- a. biaya perjalanan dinas peserta *on campuss*.  
b. biaya perjalanan dinas mentor pada saat seminar rancangan proyek perubahan dan seminar proyek perubahan, dan pajak (PPh Pasal 20).

**5. Standar Biaya Keluaran Laporan Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan Negara (SBK Audit Kinerja)**

SBK Audit Kinerja adalah besaran biaya yang digunakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk menghasilkan sub keluaran (*sub output*) audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas, antara lain:

- a. Audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
- b. Audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; dan/atau
- c. Audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.

Satuan biaya ini hanya digunakan untuk kegiatan audit kinerja yang didalam pelaksanaannya dilakukan satu kali uji petik.

Penggunaan SBK ini mengacu ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama  
SBK Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama adalah SBK Audit Kinerja yang digunakan dalam rangka Audit Kinerja yang lokasi objek pemeriksaan berada di lokasi perkantoran yang sama dengan lokasi satuan kerja APIP.
- b. SBK Audit Kinerja Dalam Kota  
SBK Audit Kinerja Dalam Kota adalah SBK Audit Kinerja yang digunakan dalam rangka Audit Kinerja yang lokasi objek pemeriksaan berada di dalam kota yang sama dengan lokasi satuan kerja APIP.
- c. SBK Audit Kinerja Luar Provinsi  
SBK Audit Kinerja Luar Provinsi adalah SBK Audit Kinerja yang digunakan dalam rangka Audit Kinerja yang lokasi objek pemeriksaan berbeda provinsi dengan lokasi satuan kerja APIP.

**B. SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN**

**1. SBK Riset Pembinaan/Kapasitas**

SBK Riset Pembinaan/Kapasitas adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk kegiatan riset yang dilakukan dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pertama/peneliti muda/asisten ahli/lektor dengan hasil akhir berupa laporan final. Dalam hal keluaran tersebut dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan lebih lanjut, besaran biaya keluarannya diatur sebagai berikut:

- a. Publikasi/artikel nasional tidak terakreditasi untuk riset pembinaan/kapasitas sebesar maksimal Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).
- b. Publikasi/artikel nasional terakreditasi untuk riset pembinaan/kapasitas sebesar maksimal Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- c. Publikasi/artikel regional/internasional tidak terindeks untuk riset pembinaan/kapasitas sebesar maksimal Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

## 2. **SBK Riset Dasar**

SBK Riset Dasar adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk suatu kegiatan riset yang memuat temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan penentuan asumsi dan hukum dasar yang akan digunakan, formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya di sampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

Penggunaan SBK Riset Dasar mengacu ketentuan sebagai berikut:

### a. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen memperoleh manfaat dan dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan sub-optimal dan di area Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan veteriner, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternak-energi (biogas), serta pengembangan (konservasi, diversifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan).

### b. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT adalah SBK Riset



Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang terkait dengan bidang-bidang energi-EBT mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Diantaranya adalah pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari energi baru/terbarukan.

c. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

d. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

e. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

SBK Riset Dasar Bidang Fokus TIK adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.

f. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Hankam

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Hankam adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang objeknya terkait segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan

segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang pertahanan keamanan.

g. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju

SBK Riset Dasar Bidang Material Maju adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun non logam dan produk bioaktif untuk mendukung industri.

h. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman

SBK Riset Dasar Bidang Kemaritiman adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan sarana dan prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan, dan lain sebagainya.

i. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan

SBK Riset Dasar Bidang Kebencanaan adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian dalam rangka mengantisipasi atau menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam, dan manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

j. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan-temuan baru dengan melakukan studi literatur terhadap objek di dalam negeri.

k. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Luar Negeri adalah SBK Riset



Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan-temuan baru dengan melakukan studi literatur terhadap objek di luar negeri.

1. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)  
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil) adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, etnografi (wawancara dan pengamatan), *participation action research*, *focus group discussion* (FGD), kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya kurang dari 5 lokasi di dalam negeri.
- m. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)  
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah) adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, etnografi (wawancara dan pengamatan), *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya 5 sampai dengan 10 lokasi di dalam negeri.
- n. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)  
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar) adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan

berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama bersama komunitas yang objek penelitiannya lebih dari 10 lokasi di dalam negeri.

- o. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri  
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, kajian bersama komunitas yang objeknya di luar negeri.

### 3. SBK Riset Terapan

SBK Riset Terapan adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk suatu kegiatan riset yang memuat prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, proposal, konsep, model dan indeks yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Penggunaan SBK Riset Terapan mengacu ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen guna memperoleh manfaat dan dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan sub-optimal dan di area Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan veteriner, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika

pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternak-energi (biogas), serta pengembangan konservasi, diversifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan.

b. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Energi-EBT

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Energi-EBT adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang terkait dengan bidang-bidang mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Diantaranya adalah pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari EBT.

c. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

d. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

e. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

SBK Riset Terapan Bidang Fokus TIK adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.

f. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Hankam

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Hankam adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang pertahanan keamanan.

g. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun non logam dan produk bioaktif pendukung industri.

h. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan sarana dan prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan, dan lain sebagainya.

i. SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian dalam rangka mengantisipasi maupun menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam atau manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

j. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Dalam Negeri

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Dalam Negeri adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya.

Agw

Riset ini bertujuan untuk menemukan rekomendasi kebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang berkembang di masyarakat, yang dilakukan melalui penelitian literatur terhadap objek yang ada didalam negeri.

- k. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Luar Negeri

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Luar Negeri adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol, dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya. Riset ini bertujuan untuk menemukan rekomendasi kebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang berkembang di masyarakat, yang dilakukan melalui penelitian literatur terhadap objek yang ada di luar negeri.

1. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil) adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol, dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, dan kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya kurang dari 5 lokasi di dalam negeri.

- m. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah) adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai

fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol, dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, dan kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya 5 sampai dengan 10 lokasi di dalam negeri.

- n. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)  
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar) adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, dan kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya lebih dari 10 lokasi di dalam negeri.
- o. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri  
SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, *participation action research*, FGD, dan kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya di luar negeri.

#### **4. SBK Riset Pengembangan**

SBK Riset Pengembangan adalah besaran biaya yang ditetapkan



untuk kegiatan riset dan pengembangan yang memuat prototipe laik industri atau pengujian proporsi, model, dan konsep dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan sebenarnya, sistem telah lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya, dan sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian, dan hasilnya di sampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Penggunaan SBK Riset Pengembangan mengacu ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen guna memperoleh manfaat yang optimal dan meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan sub-optimal dan di area Hutan Tanaman Industri, perkebunan dan kehutanan bernilai tambah tinggi, peternakan dan veteriner, perikanan budidaya dan perikanan tangkap di lahan terbatas, riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternak-energi (biogas), serta pengembangan konservasi, diversifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan.

b. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Energi-EBT

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Energi-EBT adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang terkait dengan bidang-bidang mulai dari sumber, pembangkitan, penyimpanan, konversi energi, dan pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Diantaranya adalah pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, *fuel cell*, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari EBT.

c. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan-Obat

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan-Obat adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk alat



dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

d. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

e. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus TIK adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.

f. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Hankam

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Hankam adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset terkait usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang pertahanan keamanan.

g. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun non logam dan produk bioaktif untuk mendukung industri.

h. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman adalah

ABW

SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan sarana dan prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, dan jasa-jasa kelautan.

- i. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan  
SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian dalam rangka mengantisipasi maupun menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan/atau non alam dan/atau manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- j. SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan  
SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk merupakan penelitian sosial yang ditujukan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model, atau proposisi sehingga dapat bermanfaat bagi penyelesaian persoalan dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.

#### **5. SBK Kajian Aktual Strategis**

SBK Kajian Aktual Strategis adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

#### **Catatan Umum:**

1. Terhadap SBK Riset Dasar, SBK Riset Terapan, dan SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi, Teknologi Informasi Komunikasi, Hankam, Material Maju, Kemaritiman, dan Kebencanaan dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
  - a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;

- b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
  - d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten/hak cipta terdaftar;
  - h. paten/hak cipta *granted*; dan/atau
  - i. paten/hak cipta terpakai di industri.
2. Terhadap SBK Riset Dasar, Riset Terapan, dan Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial, Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
  - d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;
  - e. buku nasional;
  - f. buku internasional;
  - g. naskah kebijakan; dan/atau
  - h. artikel populer di media cetak.
3. Terhadap SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
  - d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan untuk riset dasar;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten/hak cipta terdaftar;
  - h. paten/hak cipta *granted*;
  - i. paten/hak cipta terpakai di industri;
  - j. material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambahan;
  - k. material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru;
  - l. jenis hasil penangkaran;
  - m. temuan senyawa/sequence DNA penambahan; dan/atau
  - n. temuan senyawa/sequence DNA baru.
4. Terhadap SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:

- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
  - d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten/hak cipta terdaftar;
  - h. paten/hak cipta *granted*; dan/atau
  - i. paten/hak cipta terpakai di industri.
5. Terhadap SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
  - d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan untuk riset dasar;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten/hak cipta terdaftar;
  - h. paten/hak cipta *granted*;
  - i. paten/hak cipta terpakai di industri;
  - j. material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambahan;
  - k. material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru;
  - l. jenis hasil penangkaran;
  - m. temuan senyawa/*sequence* DNA penambahan; dan/atau
  - n. temuan senyawa/*sequence* DNA baru.
6. Terhadap SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
  - d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten/hak cipta terdaftar;
  - h. paten/hak cipta *granted*;
  - i. paten/hak cipta terpakai di industri;
  - j. protokol riset keanekaragaman hayati (kehati);

- k. galur perbaikan;
  - l. PVT/varietas terdaftar pangan;
  - m. PVT/varietas terdaftar ornamental;
  - n. jenis fauna penangkaran, domestikasi, *breeding*;
  - o. jenis benih/bibit/varietas/strain fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
  - p. jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
  - q. jenis isolasi/ekstraksi *bioresources* untuk bahan pangan, obat dan energi; dan/atau
  - r. jenis kehati sebagai bio indikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon.
7. Terhadap SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian dan Energi-EBT dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
  - d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten/hak cipta terdaftar;
  - h. paten/hak cipta *granted*;
  - i. paten/hak cipta terpakai di industri;
  - j. protokol riset keanekaragaman hayati (kehati);
  - k. galur perbaikan;
  - l. PVT/varietas terdaftar pangan;
  - m. PVT/varietas terdaftar ornamental;
  - n. jenis fauna penangkaran, domestikasi, *breeding*;
  - o. jenis benih/bibit/varietas/strain fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
  - p. jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
  - q. jenis isolasi/ekstraksi *bioresources* untuk bahan pangan, obat dan energi; dan/atau
  - r. jenis kehati sebagai bio indikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon.
8. Terhadap SBK Riset Terapan Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat

dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:

- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
  - d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten/hak cipta terdaftar;
  - h. paten/hak cipta *granted*;
  - i. paten/hak cipta terpakai di industri;
  - j. protokol riset keanekaragaman hayati (kehati);
  - k. galur perbaikan;
  - l. PVT/varietas terdaftar pangan;
  - m. PVT/varietas terdaftar ornamental;
  - n. jenis fauna penangkaran, domestikasi, *breeding*;
  - o. jenis benih/bibit/varietas/strain fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
  - p. jenis flora hasil propagasi, domestikasi, *breeding* (ornamental);
  - q. jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*;
  - r. jenis isolasi/ekstraksi *bioresources* untuk bahan pangan, obat dan energi;
  - s. jenis kehati sebagai bio indikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon;
  - t. produk *biosimilar* atau *kit diagnostic*;
  - u. prototipe benih/*seed* telah terkarakterisasi sesuai regulasi;
  - v. prototipe laik *preklinis*; dan/atau
  - w. herbal terstandar.
9. Terhadap SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian dan Energi-EBT dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
  - d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
  - f. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;



- g. paten/hak cipta terdaftar;
  - h. paten/hak cipta *granted*;
  - i. paten/hak cipta terpakai di industri; dan/atau
  - j. taman tematik, kebun, koleksi.
10. Terhadap SBK Pengembangan Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi;
  - b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
  - c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks;
  - d. publikasi/artikel jurnal regional/Internasional terindeks;
  - e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan;
  - f. prototipe laik Industri/digunakan dalam kebijakan;
  - g. paten/hak cipta terdaftar;
  - h. paten/hak cipta *granted*;
  - i. paten/hak cipta terpakai di industri;
  - j. taman tematik, kebun, koleksi;
  - k. prototipe memenuhi syarat pada *clinical trial fase 1*;
  - l. prototipe memenuhi syarat pada *clinical trial fase 2*; dan/atau
  - m. prototipe memenuhi syarat pada *clinical trial fase 3*.
11. Besaran tambahan biaya SBK Riset Dasar, Riset Terapan, dan Riset Pengembangan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Besaran
1	Publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi	3.000.000
2	Publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi	10.000.000
3	Publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks	15.000.000
4	Publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks	50.000.000
5	Prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan	60.000.000
6	Prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan	65.000.000
7	Paten/hak cipta terdaftar	75.000.000
8	Paten/hak cipta <i>granted</i>	80.000.000



(dalam rupiah)

No	Uraian	Besaran
9	Paten/hak cipta terpakai di industri	90.000.000
10	Buku nasional	30.000.000
11	Buku internasional	65.000.000
12	Naskah kebijakan	25.000.000
13	Artikel populer di media cetak	2.000.000
14	Material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambahan	50.000.000
15	Material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru	75.000.000
16	Material untuk produk biologi	50.000.000
17	Galur perbaikan untuk <i>seed</i> /sistem ekspresi protein rekombinan	75.000.000
18	Jenis hasil penangkaran	100.000.000
19	Temuan senyawa baru sintetis untuk obat	100.000.000
20	Temuan senyawa baru dari <i>natural resource</i> untuk obat	150.000.000
21	Temuan senyawa/ <i>squence</i> DNA penambahan	100.000.000
22	Temuan senyawa baru dari <i>natural resources</i> untuk obat	150.000.000
23	Protokol riset keanekaragaman hayati (kehati)	150.000.000
24	Galur perbaikan	150.000.000
25	PVT/Varietas terdaftar	1.000.000.000
26	PVT/Varietas terdaftar ornamental	100.000.000
27	Jenis fauna penangkaran, domestikasi, <i>breeding</i>	200.000.000
28	Jenis benih/bibit/varietas/ <i>strain</i> fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, <i>breeding</i>	600.000.000
29	Jenis flora hasil propagasi domestikasi, <i>breeding</i>	100.000.000
30	Jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, <i>breeding</i>	500.000.000

(dalam rupiah)

No	Uraian	Besaran
31	Jenis isolasi/ekstraksi <i>bioresources</i> untuk bahan pangan, obat, dan energi	200.000.000
32	Jenis kehati sebagai <i>bioindicator</i> kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon	350.000.000
33	Produk <i>biosimilar</i> , protein <i>therapeutic</i> , vaksin, <i>blood</i> produk, atau <i>kit diagnostic</i>	1.000.000.000
34	Prototipe benih/ <i>seed</i> telah terkarakterisasi sesuai regulasi	500.000.000
35	Prototipe laik <i>preklinis</i>	1.000.000.000
36	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 1</i> ;	1.000.000.000
37	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 2</i> ;	6.000.000.000
38	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 3</i> .	10.000.000.000
39	Herbal terstandar	200.000.000
40	taman tematik, kebun, koleksi	300.000.000

12. Kementerian negara/lembaga dalam mengalokasikan besaran SBK untuk kegiatan penelitian sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dan besaran tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada butir 11 didasarkan atas:

a. Ketersediaan alokasi anggaran;

b. Pembiayaan kegiatan penelitian yang didasarkan atas prakiraan penilaian proposal yang besarnya dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) *Grade A* yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
- 2) *Grade B* yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

3) *Grade C* yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 86 /PMK.02/2017  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR BIAYA KELUARAN YANG BERLAKU UNTUK SATU  
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TERTENTU

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
004.01	<b>Sekretariat Jenderal</b>			
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Penilaian Kompetensi</b>			
	1 Penilaian Kompetensi Pemeriksa	650 Laporan	5.717.653.000	
	<b>Laporan Hasil Pemeriksaan dan Reviu</b>			
	2 Laporan Reviu SPM Kelembagaan	5 Laporan	1.439.054.000	
	3 Laporan Reviu atas Konsep Laporan Keuangan BPK	3 Laporan	3.574.357.000	
	4 Laporan Reviu Atas Konsep RKA-K/L BPK	1 Laporan	519.204.000	
	5 Laporan Hasil Penilaian Kualitas Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	2.101.683.000	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Laporan Hasil Pemeriksaan dan Reviu</b>			
	6 Laporan Pemberkasan	1 Laporan	135.210.000	
	7 Laporan Hasil Reviu atas SPM Kinerja Pemeriksaan	1 Laporan	231.331.000	
	8 LHPI Inspektorat Utama	1 Laporan	242.242.000	
	<b>Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara</b>			
	9 Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa	1 Angkatan	689.868.000	
	10 Diklat Peningkatan Keterampilan Pemeriksaan Keuangan Negara	1 Angkatan	209.119.000	
	11 Diklat Peningkatan Keterampilan Kelembagaan	1 Angkatan	209.119.000	
	12 Diklat Sertifikasi Akuntan Publik	1 Angkatan	122.347.000	
	13 Diklat Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara	1 Angkatan	107.534.000	
	14 Diklat Teknis Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara	1 Angkatan	107.534.000	
004.02	<b>BPK Pusat</b>			
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b>			
	1 LHP LK Pemerintah Pusat	1 LHP	12.219.663.000	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b>			
	2 Laporan Penelaahan Informasi Awal	1 Laporan	57.191.000	
	3 Laporan hasil evaluasi KAP	1 Laporan	212.101.000	
	4 LHP Tematik	1 LHP	8.940.590.000	
	5 LHP AKN I	1 LHP	1.085.728.000	
	6 LHP AKN II	1 LHP	1.614.564.000	
	7 LHP AKN III	1 LHP	867.563.000	
	8 LHP AKN IV	1 LHP	2.101.860.000	
	9 LHP AKN V	1 LHP	1.949.516.000	
	10 LHP AKN VI	1 LHP	2.295.679.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
11	LHP AKN VII	1 LHP	1.071.565.000	
12	LHP Auditorat Utama Investigasi	1 LHP	726.666.000	
13	LHP BPK Perwakilan Provinsi Aceh	1 LHP	499.224.000	
14	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumut	1 LHP	412.067.000	
15	LHP BPK Perwakilan Provinsi Riau	1 LHP	532.047.000	
16	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepri	1 LHP	406.746.000	
17	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jambi	1 LHP	382.023.000	
18	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumbar	1 LHP	409.155.000	
19	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumsel	1 LHP	487.074.000	
20	LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung	1 LHP	373.380.000	
21	LHP BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	1 LHP	400.901.000	
22	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Babel	1 LHP	496.747.000	
23	LHP BPK Perwakilan Provinsi Banten	1 LHP	418.557.000	
24	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jabar	1 LHP	468.285.000	
25	LHP BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	1 LHP	909.378.000	
26	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jateng	1 LHP	438.869.000	
27	LHP BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta	1 LHP	381.718.000	
28	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jatim	1 LHP	473.531.000	
29	LHP BPK Perwakilan Provinsi Bali	1 LHP	498.771.000	
30	LHP BPK Perwakilan Provinsi NTB	1 LHP	388.141.000	
31	LHP BPK Perwakilan Provinsi NTT	1 LHP	445.292.000	
32	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalbar	1 LHP	447.455.000	
33	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalteng	1 LHP	405.162.000	
34	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalsel	1 LHP	461.704.000	
35	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kaltim	1 LHP	559.412.000	
36	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulut	1 LHP	525.715.000	
37	LHP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	1 LHP	475.640.000	
38	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulbar	1 LHP	490.117.000	
39	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulsel	1 LHP	480.737.000	
40	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulteng	1 LHP	479.406.000	
41	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sultra	1 LHP	467.729.000	
42	LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku	1 LHP	417.179.000	
43	LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	1 LHP	421.149.000	
44	LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua	1 LHP	588.452.000	
45	LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat	1 LHP	532.876.000	
46	LHP BPK Provinsi Kalimantan Utara	1 LHP	529.539.000	
<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>				
<b>Laporan Pemantauan AKN I</b>				
47	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	60.796.000	
48	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	61.810.000	
<b>Laporan Pemantauan AKN II</b>				
49	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	60.796.000	
50	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	61.810.000	
<b>Laporan Pemantauan AKN III</b>				
51	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	66.532.000	
52	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	60.646.000	
<b>Laporan Pemantauan AKN IV</b>				
53	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	69.170.000	
54	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	61.933.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Laporan Pemantauan AKN V</b>			
55	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	67.151.000	
56	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	131.991.000	
	<b>Laporan Pemantauan AKN VI</b>			
57	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	65.951.000	
58	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	77.024.000	
	<b>Laporan Pemantauan AKN VII</b>			
59	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	69.783.000	
60	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	61.933.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Aceh</b>			
61	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	14.633.000	
62	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	28.043.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sumut</b>			
63	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	14.265.000	
64	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	29.284.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Riau</b>			
65	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	15.451.000	
66	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	33.152.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Kepri</b>			
67	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	15.647.000	
68	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	31.348.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Jambi</b>			
69	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	13.481.000	
70	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	27.438.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sumbar</b>			
71	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	15.251.000	
72	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	29.860.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sumsel</b>			
73	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	15.723.000	
74	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	33.372.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung</b>			
75	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	12.951.000	
76	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	25.708.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu</b>			
77	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	13.825.000	
78	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	28.554.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Babel</b>			
79	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	14.513.000	
80	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	28.616.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Banten</b>			
81	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	18.089.000	
82	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	35.319.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Jabar</b>			
83	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	15.097.000	
84	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	29.634.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta</b>			
85	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	120.768.000	
86	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	61.836.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Jateng</b>			
87	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	13.101.000	
88	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	25.049.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta</b>			
89	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	14.911.000	
90	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	33.581.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Jatim</b>			
91	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	15.075.000	
92	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	30.980.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali</b>			
93	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	17.473.000	
94	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	38.269.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi NTB</b>			
95	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	16.019.000	
96	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	31.532.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi NTT</b>			
97	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	14.001.000	
98	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	28.978.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar</b>			
99	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	14.177.000	
100	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	29.031.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng</b>			
101	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	18.455.000	
102	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	31.311.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel</b>			
103	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	14.269.000	
104	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	27.690.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim</b>			
105	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	21.765.000	
106	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	44.088.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut</b>			
107	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	16.251.000	
108	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	31.468.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo</b>			
109	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	16.955.000	
110	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	34.316.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulbar</b>			
111	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	16.379.000	
112	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	33.852.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulsel</b>			
113	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	16.867.000	
114	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	31.045.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulteng</b>			
115	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	16.763.000	
116	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	36.244.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Sultra</b>			
117	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	15.793.000	
118	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	32.976.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku</b>			
119	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	19.887.000	
120	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	41.340.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara</b>			
121	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	17.879.000	
122	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	34.994.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua</b>			
	123 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	24.975.000	
	124 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	50.180.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat</b>			
	125 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	19.709.000	
	126 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	42.252.000	
	<b>Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara</b>			
	127 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	18.429.000	
	128 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	38.581.000	

Abw



Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
005.02	<b>Kepaniteraan</b> <b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b> <b>Putusan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali</b>			
	1 Putusan Perkara Pidana Umum	1 Perkara	1.460.765	
	2 Putusan Perkara Pidana Khusus	1 Perkara	1.502.233	
	3 Putusan Perkara Pidana Militer	1 Perkara	1.205.331	
	4 Putusan Perkara PHI yang nilai gugatannya kurang dari 150 juta rupiah	1 Perkara	1.100.253	
005.03	<b>Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum</b> <b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b> <b>Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu</b>			
	1 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Maluku Utara	1 perkara	876.000	
	2 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Maluku Utara	1 perkara	977.000	
	3 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Maluku Utara	1 perkara	590.000	
	4 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Maluku Utara	1 perkara	936.000	
	5 Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Maluku Utara	1 perkara	1.553.000	
	6 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Banten	1 perkara	816.000	
	7 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Banten	1 perkara	897.000	
	8 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Banten	1 perkara	549.000	
	9 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Banten	1 perkara	896.000	
	10 Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Banten	1 perkara	1.533.000	
	11 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Bangka Belitung	1 perkara	816.000	
	12 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Bangka Belitung	1 perkara	1.042.000	
	13 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bangka Belitung	1 perkara	695.000	
	14 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bangka Belitung	1 perkara	1.027.000	
	15 Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bangka Belitung	1 perkara	1.505.000	
	16 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Gorontalo	1 perkara	776.000	
	17 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Gorontalo	1 perkara	877.000	
	18 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Gorontalo	1 perkara	555.000	
	19 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Gorontalo	1 perkara	896.000	
	20 Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Gorontalo	1 perkara	1.517.000	
	21 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah DKI Jakarta	1 perkara	796.000	
	22 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah DKI Jakarta	1 perkara	1.022.000	
	23 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah DKI Jakarta	1 perkara	593.000	
	24 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah DKI Jakarta	1 perkara	924.000	
	25 Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah DKI Jakarta	1 perkara	1.495.000	
	26 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Barat	1 perkara	796.000	
	27 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Barat	1 perkara	897.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	28 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Barat	1 perkara	543.200	
	29 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Barat	1 perkara	889.700	
	30 Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Barat	1 perkara	1.376.000	
	31 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Tengah	1 perkara	796.000	
	32 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Tengah	1 Perkara	897.000	
	33 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Tengah	1 Perkara	548.000	
	34 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Tengah	1 Perkara	896.500	
	35 Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Tengah	1 Perkara	1.501.000	
	36 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Yogyakarta	1 Perkara	796.000	
	37 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Yogyakarta	1 Perkara	897.000	
	38 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Yogyakarta	1 Perkara	542.000	
	39 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Yogyakarta	1 Perkara	889.000	
	40 Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Yogyakarta	1 Perkara	1.533.000	
	41 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Timur	1 Perkara	796.000	
	42 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Timur	1 Perkara	790.000	
	43 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Timur	1 Perkara	562.000	
	44 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Timur	1 Perkara	909.000	
	45 Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Timur	1 Perkara	1.510.000	
	46 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Banda Aceh	1 Perkara	816.000	
	47 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Banda Aceh	1 Perkara	1.042.000	
	48 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Banda Aceh	1 Perkara	672.000	
	49 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Banda Aceh	1 Perkara	1.004.000	
	50 Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Banda Aceh	1 Perkara	1.497.000	
	51 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sumatera Utara	1 Perkara	816.000	
	52 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sumatera Utara	1 Perkara	1.042.000	
	53 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatera Utara	1 Perkara	695.000	
	54 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatera Utara	1 Perkara	1.028.000	
	55 Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatera Utara	1 Perkara	1.507.000	
	56 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sumatera Barat	1 Perkara	816.000	
	57 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sumatera Barat	1 Perkara	1.042.000	
	58 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatera Barat	1 Perkara	694.000	
	59 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatera Barat	1 Perkara	1.027.000	
	60 Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatera Barat	1 Perkara	1.503.000	
	61 Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Riau	1 Perkara	816.000	

AGW



Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
62	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Riau	1 Perkara	1.042.000	
63	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Riau	1 Perkara	694.000	
64	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Riau	1 Perkara	1.026.000	
65	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Riau	1 Perkara	1.501.000	
66	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jambi	1 Perkara	816.000	
67	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jambi	1 Perkara	1.042.000	
68	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jambi	1 Perkara	694.000	
69	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jambi	1 Perkara	1.026.000	
70	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jambi	1 Perkara	1.501.000	
71	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Palembang	1 Perkara	816.000	
72	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Palembang	1 Perkara	1.042.000	
73	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Palembang	1 Perkara	695.000	
74	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Palembang	1 Perkara	1.027.500	
75	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Palembang	1 Perkara	1.505.000	
76	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Lampung	1 Perkara	816.000	
77	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Lampung	1 Perkara	1.042.000	
78	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Lampung	1 Perkara	694.000	
79	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Lampung	1 Perkara	1.027.000	
80	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Lampung	1 Perkara	1.503.000	
81	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Barat	1 Perkara	836.000	
82	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Barat	1 Perkara	937.000	
83	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Barat	1 Perkara	553.000	
84	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Kalimantan Barat	1 Perkara	890.000	
85	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Barat	1 Perkara	1.507.000	
86	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Tengah	1 Perkara	796.000	
87	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Tengah	1 Perkara	937.000	
88	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Tengah	1 Perkara	533.000	
89	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Tengah	1 Perkara	885.000	
90	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Tengah	1 Perkara	1.501.000	
91	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Selatan	1 Perkara	796.000	
92	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Selatan	1 Perkara	897.000	
93	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Selatan	1 Perkara	538.000	
94	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Selatan	1 Perkara	886.000	
95	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Selatan	1 Perkara	1.501.000	

AGW

8

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
96	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Timur	1 Perkara	796.000	
97	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Timur	1 Perkara	897.000	
98	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Timur	1 Perkara	547.000	
99	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Timur	1 Perkara	895.000	
100	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Timur	1 Perkara	1.533.000	
101	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Utara	1 Perkara	796.000	
102	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Utara	1 Perkara	897.000	
103	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Utara	1 Perkara	538.000	
104	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Utara	1 Perkara	886.000	
105	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Utara	1 Perkara	1.501.000	
106	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Tengah	1 Perkara	836.000	
107	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Tengah	1 Perkara	937.000	
108	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tengah	1 Perkara	560.500	
109	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tengah	1 Perkara	902.000	
110	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tengah	1 Perkara	1.515.000	
111	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Selatan	1 Perkara	836.000	
112	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Selatan	1 Perkara	937.000	
113	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Selatan	1 Perkara	583.000	
114	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Selatan	1 Perkara	929.000	
115	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Selatan	1 Perkara	1.541.000	
116	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Tenggara	1 Perkara	776.000	
117	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Tenggara	1 Perkara	877.000	
118	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tenggara	1 Perkara	549.500	
119	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tenggara	1 Perkara	896.000	
120	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tenggara	1 Perkara	1.515.000	
121	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Maluku	1 Perkara	956.000	
122	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Maluku	1 Perkara	1.057.000	
123	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Maluku	1 Perkara	569.000	
124	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Maluku	1 Perkara	915.000	
125	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Maluku	1 Perkara	1.521.000	
126	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Denpasar	1 Perkara	816.000	
127	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Denpasar	1 Perkara	917.000	
128	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Denpasar	1 Perkara	604.000	
129	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Denpasar	1 Perkara	955.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
130	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Denpasar	1 Perkara	1.567.000	
131	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Nusa Tenggara Barat	1 Perkara	796.000	
132	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Nusa Tenggara Barat	1 Perkara	897.000	
133	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Barat	1 Perkara	554.000	
134	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Barat	1 Perkara	900.000	
135	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Barat	1 Perkara	1.537.000	
136	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Nusa Tenggara Timur	1 Perkara	796.000	
137	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Nusa Tenggara Timur	1 Perkara	897.000	
138	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Timur	1 Perkara	597.000	
139	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Timur	1 Perkara	944.000	
140	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Timur	1 Perkara	1.573.000	
141	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Papua	1 Perkara	956.000	
142	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Papua	1 Perkara	1.057.000	
143	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Papua	1 Perkara	689.000	
144	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Papua	1 Perkara	1.036.000	
145	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Papua	1 Perkara	1.665.000	
146	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Bengkulu	1 Perkara	816.000	
147	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Bengkulu	1 Perkara	1.042.000	
148	Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bengkulu	1 Perkara	695.000	
149	Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Bengkulu	1 Perkara	1.027.000	
150	Perkara PHI yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bengkulu	1 Perkara	1.505.000	
	<b>Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara</b>			
151	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Maluku Utara	1 Perkara	790.000	
152	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Banten	1 Perkara	750.000	
153	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di wilayah Bangka Belitung	1 Perkara	750.000	
154	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di wilayah Gorontalo	1 Perkara	760.000	
155	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah DKI Jakarta	1 Perkara	870.000	
156	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di wilayah Jawa Barat	1 Perkara	730.000	
157	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di wilayah Jawa Tengah	1 Perkara	730.000	
158	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Yogyakarta	1 Perkara	790.000	
159	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di wilayah Jawa Timur	1 Perkara	730.000	
160	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di wilayah Banda Aceh	1 Perkara	730.000	
161	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sumatera Utara	1 Perkara	730.000	
162	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di wilayah Sumatera Barat	1 Perkara	730.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
163	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Riau	1 Perkara	730.000	
164	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara diwilayah Jambi	1 Perkara	730.000	
165	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara diwilayah Palembang	1 Perkara	730.000	
166	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Lampung	1 Perkara	750.000	
167	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Barat	1 Perkara	750.000	
168	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara diwilayah Kalimantan Tengah	1 Perkara	760.000	
169	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara diwilayah Kalimantan Selatan	1 Perkara	760.000	
170	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara diwilayah Kalimantan Timur	1 Perkara	800.000	
171	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara diwilayah Sulawesi Utara	1 Perkara	760.000	
172	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara diwilayah Sulawesi Tengah	1 Perkara	730.000	
173	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Selatan	1 Perkara	790.000	
174	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara diwilayah Sulawesi Tenggara	1 Perkara	730.000	
175	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Maluku	1 Perkara	750.000	
176	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara diwilayah Denpasar	1 Perkara	840.000	
177	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Nusa Tenggara Barat	1 Perkara	790.000	
178	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Nusa Tenggara Timur	1 Perkara	810.000	
179	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Papua	1 Perkara	910.000	
180	Perkara Peradilan yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Bengkulu	1 Perkara	750.000	

AGW



Kementerian Negara/Lembaga: Kejaksaan Republik Indonesia (006)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
006.01	<b>Kejaksaan Republik Indonesia</b>			
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b>			
	1 Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa	1 Angkatan	35.308.950.000	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b>			
	2 Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Klarifikasi pada Wilayah I	1 Lapdu	3.700.000	
	3 Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Inspeksi Kasus pada Wilayah I	1 Lapdu	8.300.000	
	4 Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Klarifikasi pada Wilayah II	1 Lapdu	3.700.000	
	5 Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Inspeksi Kasus pada Wilayah II	1 Lapdu	8.300.000	
	6 Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Klarifikasi pada Wilayah III	1 Lapdu	3.700.000	
	7 Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Inspeksi Kasus pada Wilayah III	1 Lapdu	8.300.000	
	8 Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Klarifikasi pada Wilayah IV	1 Lapdu	3.700.000	
	9 Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Inspeksi Kasus pada Wilayah IV	1 Lapdu	8.300.000	
	10 Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Klarifikasi pada Wilayah V	1 Lapdu	3.700.000	
	11 Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Melalui Inspeksi Kasus pada Wilayah V	1 Lapdu	8.300.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Dalam Negeri (010)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
010.01	<b>Sekretariat Jenderal</b>			
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Literatur</b>			
	1 Penyusunan Literatur Pengajaran Program D4 dan S1 Semester Ganjil dan Genap	20 Literatur	902.414.000	
	<b>Modul</b>			
	2 Penyusunan Modul Fakultas Politik Pemerintahan	10 Modul	386.545.000	
	3 Penyusunan Modul Fakultas Manajemen Pemerintahan	10 Modul	386.545.000	
	4 Penyusunan Modul Pelatihan	10 Modul	298.395.000	
	<b>GBPP/SAP</b>			
	5 Penyusunan Garis Besar Pokok Pengajaran (GBPP)/SAP/ <i>Syllabus</i> (Program D4 dan S1) Semester Ganjil dan Genap	15 GBPP/SAP	598.786.000	
	6 Penyusunan Garis Besar Pokok Pelatihan (GBPP)/SAP/ <i>Syllabus</i> (Program D4 dan S1) Semester Ganjil dan Genap	12 GBPP/SAP	231.395.000	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Layanan Manajemen SDM</b>			
	7 Penilaian Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kemendagri	1 Layanan	110.655.000	
	8 Penilaian Kompetensi Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Kemendagri	1 Layanan	119.905.000	
	9 Penilaian Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kemendagri	1 Layanan	138.710.000	
010.03	<b>Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintah Umum</b>			
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Bantuan Keuangan Parpol</b>			
	1 Jumlah Parpol yang Mendapatkan Bantuan Keuangan dan Peningkatan Kapasitas	122.003.650 Suara	13.925.000.000	
010.12	<b>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Angkatan Pengembangan Kompetensi Standarisasi dan Sertifikasi</b>			
	1 Diklat 5 Hari	1 Angkatan	76.348.000	
	2 Diklat 6 Hari	1 Angkatan	87.149.000	
	<b>Angkatan Pengembangan Kompetensi Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri</b>			
	3 Diklat 5 Hari	1 Angkatan	76.348.000	
	<b>Angkatan Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan</b>			
	4 Diklat 5 Hari	1 Angkatan	76.348.000	
	5 Diklat 12 Hari	1 Angkatan	144.063.000	
	<b>Angkatan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional dan Teknis</b>			
	6 Diklat 5 Hari	1 Angkatan	76.348.000	
	7 Diklat 12 Hari	1 Angkatan	144.063.000	
	8 Diklat 14 Hari	1 Angkatan	169.528.000	
	9 Diklat 35 Hari	1 Angkatan	319.028.000	
	<b>Angkatan Pengembangan Kompetensi Lingkup Regional</b>			
	10 Diklat 5 Hari	1 Angkatan	76.348.000	

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
012.01	<b>Kementerian Pertahanan</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b>			
	1 Lulusan Kursus Manajemen Penelitian dan Pengembangan Tingkat Pertama Pertahanan	1 Lulusan	5.498.750	
	2 Lulusan Kursus Dasar Manajemen Pertahanan	1 Lulusan	5.659.677	
	3 Lulusan Kursus Kepemimpinan dan Manajemen Pertahanan	1 Lulusan	7.511.611	
	4 Lulusan Kursus Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Pertahanan	1 Lulusan	5.143.722	
	5 Lulusan Kursus Manajemen Penelitian dan Pengembangan Tingkat Muda Pertahanan	1 Lulusan	5.756.900	
	6 Lulusan Kursus Manajemen Bendaharawan Keuangan Pertahanan	1 Lulusan	5.113.111	
	7 Lulusan Kursus Manajemen Perencanaan Strategis Pertahanan	1 Lulusan	6.345.166	
	8 Lulusan Kursus Manajemen Pembangunan Karakter Bangsa	1 Lulusan	6.696.625	
	9 Lulusan Kursus Manajemen Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pertahanan	1 Lulusan	5.406.000	
	10 Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Umum	1 Lulusan	5.276.000	
	11 Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Jabatan Penyusun dan Jabatan Setingkat	1 Lulusan	5.276.000	
	12 Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Jabatan Pengolah dan Jabatan Setingkat	1 Lulusan	5.276.000	
	13 Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Jabatan Pengadministrasi dan Jabatan Setingkat	1 Lulusan	5.408.000	
	14 Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III bagi PNS	1 Lulusan	5.276.000	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Lulusan Kursus Manajemen Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Pertahanan</b>			
	15 Kursus Manajemen Pengadaan Pertahanan	1 Lulusan	5.435.666	
	16 Kursus Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara Pertahanan	1 Lulusan	5.213.916	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer</b>			
	17 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 1	1 Laporan	6.026.000	
	18 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 2	1 Laporan	6.456.000	
	19 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 3	1 Laporan	6.766.000	
	20 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 4	1 Laporan	6.166.000	
	21 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 5	1 Laporan	15.165.000	
	22 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Laporan	2.306.000	
	23 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Laporan	2.306.000	
	24 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Laporan	2.716.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum</b>			
	25 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 1	1 Laporan	12.320.000	
	26 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 2	1 Laporan	14.088.000	
	27 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 3	1 Laporan	15.315.000	
	28 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 4	1 Laporan	12.825.000	
	29 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 5	1 Laporan	49.127.000	
	30 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Laporan	4.266.000	
	31 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1 Laporan	3.274.000	
	32 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Laporan	5.909.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat</b>			
	33 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 1	1 Laporan	26.601.000	
	34 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 2	1 Laporan	30.451.000	
	35 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 3	1 Laporan	33.201.000	
	36 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 4	1 Laporan	27.701.000	

AN

B

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
37	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 5	1 Laporan	110.927.000	
38	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 1	1 Laporan	7.862.000	
39	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 2	1 Laporan	8.562.000	
40	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 3	1 Laporan	9.062.000	
41	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 4	1 Laporan	8.062.000	
42	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 5	1 Laporan	23.208.000	
43	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Laporan	13.174.000	
44	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Laporan	14.424.000	
45	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Laporan	15.374.000	
46	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Laporan	14.074.000	
47	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Laporan	37.192.000	
48	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1	1 Laporan	11.149.000	
49	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 2	1 Laporan	11.899.000	
50	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 3	1 Laporan	12.449.000	
51	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 4	1 Laporan	11.499.000	
52	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 5	1 Laporan	26.757.000	
	<b>Laporan Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat</b>			
53	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 1	1 Laporan	24.674.000	
54	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2	1 Laporan	28.874.000	
55	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 3	1 Laporan	31.874.000	
56	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 4	1 Laporan	25.874.000	
57	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 5	1 Laporan	116.658.000	
58	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 1	1 Laporan	9.072.000	
59	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 2	1 Laporan	10.822.000	
60	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 3	1 Laporan	12.072.000	
61	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 4	1 Laporan	9.572.000	
62	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 5	1 Laporan	47.388.000	
63	Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Laporan	13.774.000	
64	Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Laporan	15.724.000	
65	Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Laporan	17.174.000	
66	Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Laporan	14.874.000	
67	Layanan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Laporan	52.944.000	
68	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1	1 Laporan	13.823.000	
69	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2	1 Laporan	16.623.000	
70	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3	1 Laporan	18.623.000	
71	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4	1 Laporan	14.623.000	
72	Laporan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 5	1 Laporan	75.212.000	
	<b>Lulusan Kursus Intensif Bahasa Inggris Pasukan Perdamaian</b>			
73	Kursus Intensif Bahasa Asing bagi Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB	1 Lulusan	5.364.000	
74	Kursus Intensif Bahasa Inggris bagi Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB	1 Lulusan	5.364.000	
	<b>Lulusan Kursus Intensif Bahasa Inggris Wilayah</b>			
75	Kursus Intensif Bahasa Inggris Wilayah Jatim	1 Lulusan	5.364.000	
76	Kursus Intensif Bahasa Inggris Wilayah DKI	1 Lulusan	5.364.000	
77	Kursus Intensif Bahasa Inggris Wilayah Jabar	1 Lulusan	5.364.000	

ANW

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Lulusan Kursus Intensif Bahasa Indonesia Tk. Dasar</b>			
	78 KIBINA Tk.Dasar ke-15	1 Lulusan	6.964.000	
	79 KIBINA Tk.Dasar ke-16	1 Lulusan	6.964.000	
	80 KIBINA Tk. Dasar ke-14	1 Lulusan	6.964.000	
	<b>Lulusan Kursus Intensif Dasar Instruktur Bahasa Inggris</b>			
	81 Kursus Dasar Instruktur Bahasa Inggris	1 Lulusan	5.364.000	
	<b>Lulusan Kursus Intensif Bahasa Inggris</b>			
	82 KIBI ke-92	1 Lulusan	5.364.000	
	83 KIBI ke-93	1 Lulusan	5.364.000	
	84 Kursus Intensif Bahasa Inggris Executive	1 Lulusan	5.364.000	
	85 Kursus Intensif Bahasa Inggris PNS Kemhan	1 Lulusan	5.364.000	
	86 Kursus Intensif Bahasa Inggris TOEFL	1 Lulusan	5.364.000	
	87 Kursus Intensif Bahasa Inggris Alih Bahasa	1 Lulusan	5.364.000	
	88 Kursus Intensif Bahasa Inggris IELTS	1 Lulusan	5.364.000	
	<b>Lulusan Kursus Bahasa Indonesia Tk. Menengah</b>			
	89 KIBINA Tk. Menengah	1 Lulusan	6.964.000	
	<b>Lulusan Kursus Bahasa Indonesia Perwira SAF</b>			
	90 KIBINA bagi Perwira SAF	1 Lulusan	6.964.000	
	<b>Lulusan Kursus Bahasa Asing (Non Inggris)</b>			
	91 Kursus Intensif Bahasa Arab Tk. Dasar	1 Lulusan	5.364.000	
	92 Kursus Intensif Bahasa Arab Tk. Menengah	1 Lulusan	5.364.000	
	93 Kursus Intensif Bahasa Jepang	1 Lulusan	5.364.000	
	94 Kursus Intensif Bahasa Mandarin	1 Lulusan	5.364.000	
	95 Kursus Intensif Bahasa Jerman	1 Lulusan	5.364.000	
	96 Kursus Intensif Bahasa Korea	1 Lulusan	5.364.000	
	97 Kursus Intensif Bahasa Prancis	1 Lulusan	5.364.000	
	98 Kursus Intensif Bahasa Rusia	1 Lulusan	5.364.000	
	99 Kursus Intensif Bahasa Spanyol	1 Lulusan	5.364.000	
<b>012.21</b>	<b>Markas Besar TNI</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b>			
	1 Peserta Penggelaran Satgas Operasi Intelejen Taktis TNI	1 Orang	341.759	
	2 Peserta Penggelaran Satgas Ops Intelejen Strategis TNI	1 Orang	441.815	
	3 Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri	1 Orang	1.245.270	
	4 Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri	1 Orang	115.472	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Peserta Penggelaran Satgas Operasi Pemukul TNI</b>			
	5 Perbatasan/Pulau Terluar Rayon I	1 Orang	280.576	
	6 Perbatasan/Pulau Terluar Rayon II	1 Orang	282.587	
	7 Perbatasan/Pulau Terluar Rayon III	1 Orang	281.598	
	8 Perbatasan/Pulau Terluar Rayon IV	1 Orang	285.609	
	9 Perbatasan/Pulau Terluar Rayon V	1 Orang	288.620	
	10 Rahwan Rayon I	1 Orang	310.576	
	11 Rahwan Rayon II	1 Orang	312.587	
	12 Rahwan Rayon III	1 Orang	311.598	
	13 Rahwan Rayon IV	1 Orang	315.609	
	14 Rahwan Rayon V	1 Orang	318.620	
	<b>Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia</b>			
	15 Seleksi Yon Mekanis TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1 Kegiatan	2.217.112	
	16 Kegiatan Yon Mekanis TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1 Kegiatan	8.654.811	
	17 Seleksi Satgas Force Protection Company (FPC) TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1 Kegiatan	1.588.183	
	18 Kegiatan Satgas Force Protection Company (FPC) TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1 Kegiatan	9.564.446	
	19 Seleksi Satgas Military Police Unit (MPU) TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1 Kegiatan	2.226.966	
	20 Kegiatan Satgas Military Police Unit (MPU) TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1 Kegiatan	11.421.173	
	21 Seleksi Satgas FHQSU TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1 Kegiatan	2.722.550	
	22 Kegiatan Satgas FHQSU TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1 Kegiatan	13.243.120	
	23 Seleksi Satgas MCOU TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1 Kegiatan	2.909.833	
	24 Kegiatan Satgas MCOU TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1 Kegiatan	19.716.833	
	25 Seleksi Satgas CIMIC TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1 Kegiatan	5.747.333	
	26 Kegiatan Satgas CIMIC TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1 Kegiatan	39.538.000	
	27 Seleksi Satgas Level II Hospital TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1 Kegiatan	4.157.888	
	28 Kegiatan Satgas Level II Hospital TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1 Kegiatan	28.653.888	
	29 Seleksi Satgas Maritime Task Force (MTF) TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1 Kegiatan	5.116.257	
	30 Kegiatan Satgas Maritime Task Force (MTF) TNI KONGA UNIFIL Lebanon	1 Kegiatan	12.010.691	
	31 Seleksi Yon Komposit TNI KONGA UNAMID Darfur	1 Kegiatan	2.229.489	
	32 Kegiatan Satgas Yon Komposit TNI KONGA UNAMID Darfur	1 Kegiatan	8.319.685	



Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
33	Seleksi Satgas Yon Komposit TNI KONGA MINUSCA Central African Republic	1 Kegiatan	2.262.236	
34	Kegiatan Satgas Yon Komposit TNI KONGA MINUSCA Central African Republic	1 Kegiatan	8.382.950	
35	Seleksi Satgas KIZI TNI KONGA Monusco Kongo	1 Kegiatan	3.501.400	
36	Kegiatan Satgas KIZI TNI KONGA Monusco Kongo	1 Kegiatan	11.323.771	
37	Seleksi Satgas KIZI TNI KONGA MINUSCA Central African Republic	1 Kegiatan	3.137.712	
38	Kegiatan Satgas KIZI TNI KONGA MINUSCA Central African Republic	1 Kegiatan	10.622.330	
39	Seleksi Satgas KI Passus TNI KONGA MINUSCA CAR	1 Kegiatan	1.709.900	
40	Kegiatan Satgas KI Passus TNI KONGA MINUSCA CAR	1 Kegiatan	9.890.860	
41	Seleksi Satgas IMT Filipina	1 Kegiatan	1.872.083	
42	Kegiatan Satgas IMT Filipina	1 Kegiatan	509.943.500	
	<b>Peserta Operasi Rutin Integratif</b>			
43	Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon I	1 Orang	70.988	
44	Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon II	1 Orang	74.988	
45	Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon III	1 Orang	73.988	
46	Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon IV	1 Orang	75.988	
47	Peserta Operasi Rutin Integratif Rayon V	1 Orang	77.988	
	<b>Peserta Operasi Intelijen Rutin</b>			
48	Rayon I	1 Orang	156.604	
49	Rayon II	1 Orang	159.733	
50	Rayon III	1 Orang	165.990	
51	Rayon IV	1 Orang	167.034	
52	Rayon V	1 Orang	175.378	
	<b>Peserta Operasi Teritorial Integratif</b>			
53	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon I	1 orang	126.173	
54	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon II	1 orang	132.173	
55	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon III	1 orang	131.173	
56	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon IV	1 orang	136.173	
57	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Tahwil Rayon V	1 orang	139.173	
58	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos Terpusat	1 orang	224.260	
59	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos Rayon I	1 orang	241.300	
60	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos Rayon II	1 orang	247.300	
61	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos Rayon III	1 orang	246.300	
62	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos Rayon IV	1 orang	251.300	
63	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Komsos Rayon V	1 orang	254.300	
64	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon I	1 orang	98.935	
65	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon II	1 orang	104.935	
66	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon III	1 orang	103.935	
67	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon IV	1 orang	108.935	
68	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon V	1 orang	111.935	
69	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat	1 orang	97.280	
	<b>Karya Bakti Di Daerah Rayon I</b>			
70	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti Di Daerah Rayon II	1 orang	103.280	
71	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti Di Daerah Rayon III	1 orang	102.280	
72	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti Di Daerah Rayon IV	1 orang	107.280	
73	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti Di Daerah Rayon V	1 orang	110.280	
74	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Pamtas, Pam Rahwan dan Pam Puter	1 orang	185.650	
	<b>Calon Perwira Karier (PAPK)</b>			
75	Seleksi Penerimaan ( <i>Werving</i> ) Calon Perwira Prajurit Karier TNI	1 Orang	17.125.120	
	<b>Lulusan Dikma Candradimuka Capratar</b>			
76	Lulusan Dikma Candradimuka Capratar (Pria)	1 Orang	14.229.903	
77	Lulusan Dikma Candradimuka Capratar (Wanita)	1 Orang	16.545.886	
	<b>Lulusan Dikma Candradimuka Pratar</b>			
78	Lulusan Dikma Chandradimuka Pratar	1 Orang	4.694.633	
	<b>Lulusan Dikma Candradimuka Koptar</b>			
79	Lulusan Dikma Candradimuka Koptar	1 Orang	4.837.716	
	<b>Lulusan Diklan PSDP Penerbang</b>			
80	Pendidikan Lanjutan PSDP Penerbang TNI	1 Orang	8.889.529	

ABW



Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Lulusan Dikma PA PK Pria</b>			
81	Pendidikan Pertama (Dikma) PA PK Pria TNI	1 Orang	8.427.651	
	<b>Lulusan Dikma PA PK Wanita</b>			
82	Pendidikan Pertama PA PK Wanita TNI	1 Orang	8.632.775	
	<b>Peserta Sesko TNI</b>			
83	Seleksi Dikreg Sesko TNI	1 Orang	1.042.013	
	<b>Lulusan Sesko TNI</b>			
84	lulusan Sesko TNI	1 Orang	6.143.656	
	<b>Lulusan Pendidikan Spesialisasi/Pengembangan Profesi</b>			
85	Lulusan Dikbangspes Sus Pa TNI	1 Orang	4.163.633	
86	Lulusan Dikbangspes Sus Ba TNI	1 Orang	3.532.166	
87	Lulusan Dik SIP TNI	1 Orang	11.847.166	
88	Lulusan Susjab Kimil	1 Orang	4.344.100	
89	Lulusan Susjab Ormil TNI	1 Orang	4.344.100	
90	Lulusan Suspa Minlakhara	1 Orang	4.323.860	
91	Lulusan Suspa Masmil	1 Orang	4.323.860	
92	Kursus Perwira Dasar Intelijen TNI	1 Orang	4.562.483	
93	Kursus Perwira Kontra Intelijen TNI	1 Orang	4.862.453	
94	Kursus Perwira Intelijen Strategis Tk. I	1 Orang	4.514.800	
95	Kursus Perwira Sandi Dan Intelijen TNI	1 Orang	4.332.355	
96	Kursus Bintara Sandi Dan Intelijen TNI	1 Orang	4.043.125	
97	Kursus Bintara Dasar Intelijen TNI	1 Orang	4.156.066	
98	Penataran/Latihan Gabungan Bangspes	1 Orang	3.582.200	
99	Penataran/Latihan Pa Bangspes	1 Orang	3.617.650	
100	Penataran/Latihan Ba Bangspes	1 Orang	3.489.900	
101	Penataran/Latihan Ta Bangspes	1 Orang	3.443.900	
102	Kursus Suspa Penggalangan	1 Orang	5.016.746	
103	Kursus PCI	1 Orang	4.862.453	
104	Kursus Perwira Litpers	1 Orang	5.007.680	
105	Kursus Perwira Intelijen Teritorial	1 Orang	4.765.333	
106	Kursus Bintara Intelijen Teritorial TNI	1 Orang	4.026.022	
107	Lulusan Sekbang Terpadu	1 Orang	9.453.366	
	<b>Latihan Kesiapsiagaan Operasi</b>			
108	Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasional Wilayah I	1 Orang	135.729	
109	Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasional Wilayah II	1 Orang	136.249	
110	Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasional Wilayah III	1 Orang	136.769	
111	Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasional Wilayah IV	1 Orang	137.289	
112	Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasional Wilayah V	1 Orang	137.809	
	<b>Latihan Pembinaan Balakpus TNI</b>			
113	Peserta Latihan Menembak Senjata Ringan Balakpus TNI	1 Orang	157.483	
114	Peserta Latihan Fungsi Teknis Balakpus TNI	1 Orang	132.736	
	<b>Layanan Operasional Pertahanan</b>			
115	Pendapat dan Saran Hukum	1 Layanan	845.000	
	<b>Laporan Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana</b>			
116	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 1	1 Layanan	40.463.000	
117	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 2	1 Layanan	45.013.000	
118	Penuntutan dan Pengolahan perkara pidana Militer Rayon 3	1 Layanan	48.263.000	
119	Penuntutan dan pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 4	1 Layanan	41.763.000	
120	Penuntutan dan pengolahan Perkara Pidana militer Rayon 5	1 Layanan	136.013.000	
121	Penuntutan dan pengolahan Perkara Pidana militer di Otmilti Rayon 1	1 Layanan	44.995.000	
122	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 2	1 Layanan	50.805.000	
123	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 3	1 Layanan	54.955.000	
124	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 4	1 Layanan	46.655.000	
125	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmilti Rayon 5	1 Layanan	167.005.000	
126	Penuntutan dan pengolahan Upaya Banding Perkara Pidana Militer	1 Layanan	1.392.000	
127	Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 1	1 Layanan	3.531.000	
128	Penuntutan dan pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 2	1 Layanan	4.115.000	
129	Penuntutan dan pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 3	1 Layanan	4.534.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	130 Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 4	1 Layanan	3.699.000	
	131 Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 5	1 Layanan	15.798.000	
	132 Penuntutan dan Pengolahan Peninjauan Kembali Perkara	1 Layanan	1.782.000	
	133 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 1	1 Layanan	987.000	
	134 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 2	1 Layanan	1.059.000	
	135 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 3	1 Layanan	1.112.000	
	136 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 4	1 Layanan	987.000	
	137 Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 5	1 Layanan	2.521.000	
	138 Petunjuk Teknis Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer	1 Layanan	7.248.000	
	<b>Laporan Pembinaan Napi</b>			
	139 Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 1	1 Layanan	118.200	
	140 Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 2	1 Layanan	121.311	
	141 Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 3	1 Layanan	123.533	
	142 Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 4	1 Layanan	119.088	
	143 Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 5	1 Layanan	183.533	
	144 Juknis Pembinaan Napi Prajurit TNI	1 Layanan	25.255	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer</b>			
	145 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk.I Rayon 1	1 Layanan	6.026.000	
	146 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 2	1 Layanan	6.456.000	
	147 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 3	1 Layanan	6.766.000	
	148 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 4	1 Layanan	6.166.000	
	149 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 5	1 Layanan	15.165.000	
	150 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Layanan	2.306.000	
	151 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Layanan	2.306.000	
	152 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Layanan	2.716.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum</b>			
	153 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk.I Rayon 1	1 Layanan	12.320.000	
	154 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 2	1 Layanan	14.088.000	
	155 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 3	1 Layanan	15.315.000	
	156 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 4	1 Layanan	12.825.000	
	157 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I	1 Layanan	49.127.000	
	158 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk.	1 Layanan	4.266.000	
	159 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Tk. Kasasi	1 Layanan	3.274.000	
	160 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Tk. PK	1 Layanan	5.909.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat</b>			
	161 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN	1 Layanan	26.601.000	
	162 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk I Rayon 2	1 Layanan	30.451.000	
	163 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk I Rayon 3	1 Layanan	33.201.000	
	164 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 4	1 Layanan	27.701.000	
	165 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 5	1 Layanan	110.927.000	
	166 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 1	1 Layanan	7.862.000	
	167 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 2	1 Layanan	8.562.000	
	168 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 3	1 Layanan	9.062.000	
	169 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 4	1 Layanan	8.062.000	
	170 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 5	1 Layanan	23.208.000	
	171 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Layanan	13.174.000	
	172 Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Layanan	14.424.000	

AEN



Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	173 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Layanan	15.374.000	
	174 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Layanan	14.074.000	
	175 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Layanan	37.192.000	
	176 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1	1 Layanan	11.149.000	
	177 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 2	1 Layanan	11.899.000	
	178 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 3	1 Layanan	12.449.000	
	179 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 4	1 Layanan	11.499.000	
	180 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 5	1 Layanan	26.757.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat</b>			
	181 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat TK I Rayon 1	1 Layanan	24.674.000	
	182 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2	1 Layanan	28.874.000	
	183 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 3	1 Layanan	31.874.000	
	184 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 4	1 Layanan	25.874.000	
	185 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 5	1 Layanan	116.658.000	
	186 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 1	1 Layanan	9.072.000	
	187 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 2	1 Layanan	10.822.000	
	188 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 3	1 Layanan	12.072.000	
	189 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 4	1 Layanan	9.572.000	
	190 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 5	1 Layanan	47.388.000	
	191 Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Layanan	13.774.000	
	192 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Layanan	15.724.000	
	193 Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Layanan	17.174.000	
	194 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Layanan	14.874.000	
	195 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Layanan	52.944.000	
	196 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1	1 Layanan	13.823.000	
	197 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2	1 Layanan	16.623.000	
	198 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3	1 Layanan	18.623.000	
	199 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4	1 Layanan	14.623.000	
	200 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 5	1 Layanan	75.212.000	
<b>012.22</b>	<b>Markas Besar TNIAD</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran</b>			
	1 Calon Taruna Matra Darat	1 Orang	24.197.476	
	2 Calon Bintara Matra Darat	1 Orang	6.049.393	
	3 Calon Tamtama Matra Darat	1 Orang	4.380.597	
	4 Lulusan Dik Secapa Reguler Matra Darat	1 Orang	3.646.142	
	5 Lulusan Diksargolan Secapa	1 Orang	4.511.000	
	6 Lulusan Seskoad	1 Orang	4.616.727	
	7 Lulusan Selapa Matra Darat	1 Orang	3.764.000	
	8 Lulusan Dikbangspes Perwira Matra Darat	1 Orang	3.493.500	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b>			
	<b>Peserta Latihan Kematraan</b>			
	9 Latihan Perorangan Rayon I	1 Orang	824	
	10 Latihan Perorangan Rayon II	1 Orang	879	
	11 Latihan Perorangan Rayon III	1 Orang	934	
	12 Latihan Perorangan Rayon IV	1 Orang	989	
	13 Latihan Perorangan Rayon V	1 Orang	1.043	
	14 Penataran Terpusat Matra Darat	1 Orang	150.424	
	<b>Lulusan Dikma Sertar</b>			
	15 Sersan Taruna Pria	1 Orang	4.804.166	
	16 Sersan Taruna Wanita	1 Orang	4.804.166	

ABW

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Lulusan Dikma Sermadatar</b>			
17	Sermadatar Pria	1 Orang	4.982.500	
18	Sermadatar Wanita	1 Orang	4.982.500	
	<b>Lulusan Dikma Sermatutar</b>			
19	Sermatutar Pria	1 Orang	5.437.500	
20	Sermatutar Wanita	1 Orang	5.437.500	
	<b>Lulusan Dikma Secaba Pria Matra Darat</b>			
21	Secaba Pria Rayon I	1 Orang	3.327.000	
22	Secaba Pria Rayon II	1 Orang	3.387.000	
23	Secaba Pria Rayon III	1 Orang	3.537.000	
24	Secaba Pria Rayon IV	1 Orang	3.567.000	
25	Secaba Pria Rayon V	1 Orang	3.747.000	
	<b>Lulusan Dikma Secaba Wanita Matra Darat</b>			
26	Secaba Wanita	1 Orang	3.327.000	
	<b>Lulusan Dikma Secatam Matra Darat</b>			
27	Secata Rayon I	1 Orang	3.100.000	
28	Secata Rayon II	1 Orang	3.160.000	
29	Secata Rayon III	1 Orang	3.310.000	
30	Secata Rayon IV	1 Orang	3.340.000	
31	Secata Rayon V	1 Orang	3.520.000	
32	Pra Dikma Secata	1 Orang	3.406.000	
	<b>Lulusan Diksargolan Perwira Matra Darat</b>			
33	Diksargolan Perwira	1 Orang	5.295.000	
	<b>Lulusan Diksargolan Bintara Matra Darat</b>			
34	Diksargolan Bintara Pria Rayon I	1 Orang	3.083.000	
35	Diksargolan Bintara Pria Rayon II	1 Orang	3.143.000	
36	Diksargolan Bintara Pria Rayon III	1 Orang	3.243.000	
37	Diksargolan Bintara Pria Rayon IV	1 Orang	3.273.000	
38	Diksargolan Bintara Pria Rayon V	1 Orang	3.453.000	
	<b>Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Darat</b>			
39	Diksargolan Tamtama Rayon I	1 Orang	2.904.333	
40	Diksargolan Tamtama Rayon II	1 Orang	2.954.333	
41	Diksargolan Tamtama Rayon III	1 Orang	3.071.833	
42	Diksargolan Tamtama Rayon IV	1 Orang	3.114.333	
43	Diksargolan Tamtama Rayon V	1 Orang	3.203.500	
	<b>Lulusan Dik Secaba Reguler Matra Darat</b>			
44	Rayon I	1 Orang	3.328.555	
45	Rayon II	1 Orang	3.388.555	
46	Rayon III	1 Orang	3.498.555	
47	Rayon IV	1 Orang	3.558.555	
48	Rayon V	1 Orang	3.718.555	
	<b>Peserta Secapareg Matra Darat</b>			
49	Rayon I	1 Orang	1.592.800	
50	Rayon II	1 Orang	1.641.400	
51	Rayon III	1 Orang	1.642.900	
52	Rayon IV	1 Orang	1.652.200	
53	Rayon V	1 Orang	1.653.000	
	<b>Peserta Secabareg Matra Darat</b>			
54	Rayon I	1 Orang	1.220.300	
55	Rayon II	1 Orang	1.231.400	
56	Rayon III	1 Orang	1.262.900	
57	Rayon IV	1 Orang	1.277.200	
58	Rayon V	1 Orang	1.313.000	
	<b>Peserta Seskoad</b>			
59	Rayon I	1 Orang	6.043.000	
60	Rayon II	1 Orang	6.084.000	
61	Rayon III	1 Orang	6.149.000	
62	Rayon IV	1 Orang	6.120.000	
63	Rayon V	1 Orang	6.223.000	
	<b>Peserta Selapa Matra Darat</b>			
64	Rayon I	1 Orang	4.029.500	
65	Rayon II	1 Orang	4.018.000	
66	Rayon III	1 Orang	4.142.500	
67	Rayon IV	1 Orang	4.174.000	
68	Rayon V	1 Orang	4.224.500	
	<b>Lulusan Dikbangspes Bintara Matra Darat</b>			
69	Rayon I	1 Orang	2.919.000	
70	Rayon II	1 Orang	2.979.000	
71	Rayon III	1 Orang	3.129.000	
72	Rayon IV	1 Orang	3.159.000	
73	Rayon V	1 Orang	3.339.000	
	<b>Lulusan Dikbangspes Tamtama Matra Darat</b>			
74	Rayon I	1 Orang	2.781.750	
75	Rayon II	1 Orang	2.841.750	
76	Rayon III	1 Orang	2.971.750	
77	Rayon IV	1 Orang	3.001.750	
78	Rayon V	1 Orang	3.201.750	
	<b>Peserta Dikbangspes Matra Darat</b>			
79	Rayon I	1 Orang	1.147.200	
80	Rayon II	1 Orang	1.205.600	
81	Rayon III	1 Orang	1.206.600	
82	Rayon IV	1 Orang	1.210.800	
83	Rayon V	1 Orang	1.246.000	

AGW





Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Lulusan Pendidikan Keahlian</b>			
84	Rayon I	1 Orang	3.583.500	
85	Rayon II	1 Orang	3.643.500	
86	Rayon III	1 Orang	3.718.500	
87	Rayon IV	1 Orang	3.748.500	
88	Rayon V	1 Orang	3.953.500	
	<b>Lulusan Dik Iptek</b>			
89	DIK Iptek S-1	1 Orang	3.493.500	
90	DIK Iptek D-3 (RAYON I)	1 Orang	2.916.916	
91	DIK Iptek D-3 (RAYON II)	1 Orang	2.976.916	
92	DIK Iptek D-3 (RAYON III)	1 Orang	3.101.916	
93	DIK Iptek D-3 (RAYON IV)	1 Orang	3.141.916	
94	DIK Iptek D-3 (RAYON V)	1 Orang	3.331.916	
95	DIK Iptek SMK (RAYON I)	1 Orang	2.845.916	
96	DIK Iptek SMK (RAYON II)	1 Orang	2.905.916	
97	DIK Iptek SMK (RAYON III)	1 Orang	3.035.916	
98	DIK Iptek SMK (RAYON IV)	1 Orang	3.065.916	
99	DIK Iptek SMK (RAYON V)	1 Orang	3.265.916	
	<b>Peserta Dik Profesi dan Keahlian</b>			
100	Rayon I	1 Orang	1.760.200	
101	Rayon II	1 Orang	1.773.600	
102	Rayon III	1 Orang	1.798.600	
103	Rayon IV	1 Orang	1.820.800	
104	Rayon V	1 Orang	1.836.000	
	<b>Laporan Penyidikan Perkara Pidana Prajurit</b>			
105	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon I	1 Laporan	8.282.000	
106	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon II	1 Laporan	8.870.000	
107	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon III	1 Laporan	9.291.000	
108	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon IV	1 Laporan	8.456.000	
109	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon V	1 Laporan	20.556.000	
	<b>Laporan Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit</b>			
110	Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon I	1 Laporan	2.048.000	
111	Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon II	1 Laporan	2.188.000	
112	Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon III	1 Laporan	2.288.000	
113	Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon IV	1 Laporan	2.088.000	
114	Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon V	1 Laporan	5.008.000	
	<b>Laporan Pengurusan Tahanan Sementara</b>			
115	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon I	1 Laporan	44.625	
116	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon II	1 Laporan	45.805	
117	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon III	1 Laporan	50.855	
118	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon IV	1 Laporan	45.755	
119	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon V	1 Laporan	58.205	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana</b>			
120	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon I	1 Laporan	6.026.000	
121	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon II	1 Laporan	6.456.000	
122	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon III	1 Laporan	6.766.000	
123	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon IV	1 Laporan	6.166.000	
124	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon V	1 Laporan	15.165.000	
125	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Laporan	2.306.000	
126	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Laporan	2.306.000	
127	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Laporan	2.716.000	
128	Pendapat dan Saran Hukum (PSH)	1 Laporan	835.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum</b>			
129	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon I	1 Laporan	12.320.000	
130	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon II	1 Laporan	14.088.000	
131	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon III	1 Laporan	15.315.000	
132	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon IV	1 Laporan	12.825.000	
133	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon V	1 Laporan	49.127.000	
134	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Laporan	4.266.000	
135	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1 Laporan	3.274.000	
136	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Laporan	5.909.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat</b>			
137	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN	1 Laporan	26.601.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	138 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon II	1 Laporan	30.451.000	
	139 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon III	1 Laporan	33.201.000	
	140 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon IV	1 Laporan	27.701.000	
	141 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon V	1 Laporan	110.927.000	
	142 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon I	1 Laporan	7.862.000	
	143 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon II	1 Laporan	8.562.000	
	144 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon III	1 Laporan	9.062.000	
	145 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon IV	1 Laporan	8.062.000	
	146 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon V	1 Laporan	23.208.000	
	147 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon I	1 Laporan	13.174.000	
	148 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon II	1 Laporan	14.424.000	
	149 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon III	1 Laporan	15.374.000	
	150 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon IV	1 Laporan	14.074.000	
	151 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon V	1 Laporan	37.192.000	
	152 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon I	1 Laporan	11.149.000	
	153 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon II	1 Laporan	11.899.000	
	154 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon III	1 Laporan	12.449.000	
	155 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon IV	1 Laporan	11.499.000	
	156 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon V	1 Laporan	26.757.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat</b>			
	157 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon I	1 Laporan	24.674.000	
	158 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon II	1 Laporan	28.874.000	
	159 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon III	1 Laporan	31.874.000	
	160 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon IV	1 Laporan	25.874.000	
	161 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon V	1 Laporan	116.658.000	
	162 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon I	1 Laporan	9.072.000	
	163 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon II	1 Laporan	10.822.000	
	164 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon III	1 Laporan	12.072.000	
	165 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon IV	1 Laporan	9.572.000	
	166 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon V	1 Laporan	47.388.000	
	167 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon I	1 Laporan	13.774.000	
	168 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon II	1 Laporan	15.724.000	
	169 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon III	1 Laporan	17.174.000	
	170 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon IV	1 Laporan	14.874.000	
	171 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon V	1 Laporan	52.944.000	
	172 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon I	1 Laporan	13.823.000	
	173 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon II	1 Laporan	16.623.000	
	174 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon III	1 Laporan	18.623.000	
	175 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon IV	1 Laporan	14.623.000	
	176 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon V	1 Laporan	75.132.000	

Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
012.23	<b>Markas Besar TNI AL</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran pada Keluaran (Output)</b>			
	1 Calon Kadet	1 Orang	24.128.000	
	2 Calon Bintara Matra Laut	1 Orang	6.032.000	
	3 Calon Tamtama Matra Laut	1 Orang	4.368.000	
	4 Peserta Diklapa	1 Orang	3.707.310	
	5 Peserta Diktukpa	1 Orang	2.961.880	
	6 Peserta Diktukba	1 Orang	3.362.450	
	7 Peserta Dikspespa	1 Orang	2.599.150	
	8 Peserta Dikspesba	1 Orang	2.512.950	
	9 Peserta Penerbang TNI AL	1 Orang	4.117.350	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Peserta Penggelaran Satgas Ops Intelejen Taktis TNI</b>			
	10 Penggelaran Satgas Operasi Intel Taktis TNI	1 Orang	401.066	
	<b>Peserta Latihan Operasi Matra TNI AL</b>			
	11 Latihan Kematraan	1 Orang	85.252	
	12 Latihan Satuan	1 Orang	78.692	
	<b>Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri</b>			
	13 Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri	1 Orang	484.908	
	<b>Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri</b>			
	14 Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri	1 Orang	112.980	
	<b>Peserta Latihan Marinir</b>			
	15 Latihan Satuan	1 orang	82.721	
	16 Latihan Satuan Kecil	1 orang	76.714	
	17 Latihan Pasukan Khusus	1 orang	118.939	
	<b>Lulusan Dikma Serkad</b>			
	18 Dikma Sertar Pria	1 Orang	6.249.416	
	19 Dikma Sertar Wanita	1 Orang	6.249.416	
	<b>Lulusan Dikma Sermadadak</b>			
	20 Dikma Sermadatar Pria	1 Orang	6.515.100	
	21 Dikma Sermadatar Wanita	1 Orang	6.515.100	
	<b>Lulusan Dikma Sermatukad</b>			
	22 Dikma Sermatukar Pria	1 Orang	6.850.100	
	23 Dikma Sermatukar Wanita	1 Orang	6.850.100	
	<b>Lulusan Diksargolan Pa PK Matra Laut</b>			
	24 Diksargolan Perwira Pa PK Matra Laut	1 Orang	4.923.285	
	<b>Lulusan Dikma Secaba Pria Matra Laut</b>			
	25 Dikma Bintara Pria Matra Laut	1 Orang	3.764.386	
	<b>Lulusan Dikma Secaba Wanita Matra Laut</b>			
	26 Dikma Bintara Wanita Matra Laut	1 Orang	3.764.386	
	<b>Lulusan Diksargolan Bintara Matra Laut</b>			
	27 Diksargolan Bintara Matra Laut	1 Orang	3.474.166	
	<b>Lulusan Dikma Secatam Matra Laut</b>			
	28 Dikma Tamtama Matra Laut	1 Orang	3.423.483	
	<b>Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Laut</b>			
	29 Diksargolan Tamtama Matra Laut	1 Orang	3.176.750	
	<b>Lulusan Dik Seskoal</b>			
	30 Dik Seskoal	1 Orang	5.560.770	
	<b>Lulusan Diklapa</b>			
	31 Diklapa Matra Laut	1 Orang	3.826.733	
	<b>Lulusan Diktukpa</b>			
	32 Diktukpa Matra Laut	1 Orang	3.589.950	
	<b>Lulusan Diktukba</b>			
	33 Diktukba Matra Laut	1 Orang	3.410.456	
	<b>Lulusan Dikbangspes Perwira/PNS Sederajat Matra Laut</b>			
	34 Dikbangsus Perwira Matra Laut	1 Orang	3.890.785	
	<b>Lulusan Dikbangspes Bintara/PNS Sederajat Matra Laut</b>			
	35 Dikbangsus Bintara Matra Laut	1 Orang	3.390.060	
	<b>Lulusan Dikbangspes Tamtama/PNS Sederajat Matra</b>			
	36 Dikbangsus Tamtama Matra Laut	1 Orang	3.160.100	
	<b>Lulusan Diksus Manajemen Strategik Matra Laut</b>			
	37 Diksus Manajemen Strategik Matra Laut	1 Orang	4.107.075	
	<b>Lulusan Diksus Penerbang Matra Laut</b>			
	38 Diksus Penerbang Matra Laut	1 Orang	5.423.579	
	<b>Lulusan Diksus Brevet Matra Laut</b>			
	39 Diksus Brevet Matra Laut	1 Orang	4.406.175	
	<b>Lulusan Dik Lainnya</b>			
	40 Dik STTAL D-3	1 Orang	3.270.208	
	41 Dik STTAL S-1	1 Orang	3.597.680	
	42 Dik STTAL S-2	1 Orang	3.981.097	
	<b>Peserta Kursus Manajemen Strategik</b>			
	43 Peserta Kursus Manajemen Strategik	1 Orang	4.547.750	
	44 Peserta Seskoal	1 Orang	4.783.610	
	<b>Peserta STTAL</b>			
	45 Seleksi Dik D-3 STTAL	1 Orang	3.524.550	
	46 Seleksi Dik S-1 STTAL	1 Orang	3.663.950	
	47 Seleksi Dik S-2 STTAL	1 Orang	3.727.350	
	<b>Peserta Dik Brevet</b>			
	48 Peserta Dik Brevet	1 Orang	4.117.350	

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Laporan Pembinaan Hukum</b>			
49	Penyidikan Tindak Pidana Tertentu di Laut	1 Laporan	46.729.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer</b>			
50	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 1	1 Laporan	6.026.000	
51	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 2	1 Laporan	6.456.000	
52	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 3	1 Laporan	6.766.000	
53	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 4	1 Laporan	6.166.000	
54	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 5	1 Laporan	15.165.000	
55	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Laporan	2.306.000	
56	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Laporan	2.306.000	
57	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Laporan	2.716.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum</b>			
58	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 1	1 Laporan	12.320.000	
59	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 2	1 Laporan	14.088.000	
60	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 3	1 Laporan	15.315.000	
61	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 4	1 Laporan	12.825.000	
62	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 5	1 Laporan	49.127.000	
63	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Laporan	4.266.000	
64	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1 Laporan	3.274.000	
65	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Laporan	5.909.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat</b>			
66	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 1	1 Laporan	26.601.000	
67	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 2	1 Laporan	30.451.000	
68	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 3	1 Laporan	33.201.000	
69	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 4	1 Laporan	27.701.000	
70	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 5	1 Laporan	110.927.000	
71	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 1	1 Laporan	7.862.000	
72	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 2	1 Laporan	8.562.000	
73	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 3	1 Laporan	9.062.000	
74	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 4	1 Laporan	8.062.000	
75	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 5	1 Laporan	23.208.000	
76	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Laporan	13.174.000	
77	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Laporan	14.424.000	
78	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Laporan	15.374.000	
79	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Laporan	14.074.000	
80	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Laporan	37.192.000	
81	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1	1 Laporan	11.149.000	
82	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 2	1 Laporan	11.899.000	
83	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 3	1 Laporan	12.449.000	
84	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 4	1 Laporan	11.499.000	
85	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 5	1 Laporan	26.757.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat</b>			
86	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 1	1 Layanan	24.674.000	
87	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2	1 Layanan	28.874.000	

ABW



Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	88 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 3	1 Layanan	31.874.000	
	89 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 4	1 Layanan	25.874.000	
	90 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 5	1 Layanan	116.658.000	
	91 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 1	1 Layanan	9.072.000	
	92 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 2	1 Layanan	10.822.000	
	93 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 3	1 Layanan	12.072.000	
	94 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 4	1 Layanan	9.572.000	
	95 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 5	1 Layanan	47.388.000	
	96 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Layanan	13.774.000	
	97 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Layanan	15.724.000	
	98 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Layanan	17.174.000	
	99 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Layanan	14.874.000	
	100 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Layanan	52.944.000	
	101 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1	1 Layanan	13.823.000	
	102 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2	1 Layanan	16.623.000	
	103 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3	1 Layanan	18.623.000	
	104 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4	1 Layanan	14.623.000	
	105 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 5	1 Layanan	75.212.000	
	<b>Laporan Penyidikan Perkara Pidana Prajurit</b>			
	106 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 1	1 Laporan	8.282.000	
	107 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 2	1 Laporan	8.870.000	
	108 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 3	1 Laporan	9.291.000	
	109 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 4	1 Laporan	8.456.000	
	110 Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 5	1 Laporan	20.556.000	
	<b>Laporan Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit</b>			
	111 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 1	1 Laporan	2.048.000	
	112 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 2	1 Laporan	2.188.000	
	113 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 3	1 Laporan	2.288.000	
	114 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 4	1 Laporan	2.088.000	
	115 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 5	1 Laporan	5.008.000	
	<b>Pengurusan Tahanan Sementara</b>			
	116 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 1	1 Laporan	44.625	
	117 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 2	1 Laporan	45.805	
	118 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 3	1 Laporan	50.855	
	119 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 4	1 Laporan	45.755	
	120 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 5	1 Laporan	58.205	
012.24	<b>Markas Besar TNI AU</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b>			
	1 Operasi Bhakti TNI	1 Frewkensi	98.522	
	2 Peserta Operasi Intelijen Taktis TNI	1 Orang	326.904	
	3 Peserta Latihan Kematraan	1 Orang	81.111	
	4 Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri	1 Orang	6.883.718	
	5 Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri	1 Orang	158.750	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Peserta Sesko Matra Udara</b>			
	6 Seleksi Seskoau dan Susstaf Matra Udara	1 orang	2.415.300	
	<b>Peserta Sekkau</b>			
	7 Seleksi Sekkau dan Suspajemen Matra Udara	1 orang	1.657.350	
	<b>Peserta Setukpa</b>			
	8 Seleksi Setukpa Matra udara	1 orang	1.499.220	
	<b>Peserta Setukba</b>			
	9 Seleksi Setukba Matra Udara	1 orang	1.290.720	
	<b>Lulusan Dikma Sertar</b>			
	10 Pendidikan Sertar Pria	1 orang	5.688.750	
	11 Pendidikan Sertar Wanita	1 orang	5.688.750	
	<b>Lulusan Dikma Sermadatar</b>			
	12 Pendidikan Sermadatar Pria	1 orang	5.904.336	
	13 Pendidikan Sermadatar Wanita	1 orang	5.904.336	
	<b>Lulusan Dikma Sermatutar</b>			
	14 Pendidikan Sermatutar Pria	1 orang	6.269.285	
	15 Pendidikan Sermatutar Wanita	1 orang	6.269.285	
	<b>Lulusan Diksargolan Perwira Matra Udara</b>			
	16 Lulusan Diksargolan Perwira Matra Udara	1 orang	5.207.276	



Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Lulusan Dikma Secaba Pria Matra Udara</b>			
17	Pendidikan Pertama Secaba Pria Matra Udara	1 orang	3.065.036	
	<b>Lulusan Dikma Secaba Wanita Matra Udara</b>			
18	Pendidikan Pertama Secaba Wanita Matra Udara	1 orang	3.065.036	
	<b>Lulusan Diksargolan Bintara Matra Udara</b>			
19	Lulusan Diksargolan Bintara Matra Udara Non ISD	1 orang	3.112.641	
20	Lulusan Diksargolan Bintara Matra Udara ISD	1 orang	3.112.641	
	<b>Lulusan Dikma Secatam Matra Udara</b>			
21	Pendidikan Pertama Secatam Pria Matra Udara	1 orang	2.766.766	
	<b>Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Udara</b>			
22	Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Udara	1 orang	2.841.575	
	<b>Lulusan Dikma Sekbang/Seknav</b>			
23	Pendidikan Pertama Sekbang/Seknav	1 orang	6.667.872	
	<b>Lulusan Dikma SIN/SIP</b>			
24	Pendidikan SIP/SIN	1 orang	6.550.472	
	<b>Lulusan Seskoau</b>			
25	Pendidikan Seskoau	1 orang	4.785.421	
26	Pendidikan Susstaf	1 orang	4.672.560	
	<b>Lulusan Sekkau</b>			
27	Pendidikan Sekkau	1 orang	3.656.816	
28	Pendidikan Suspajemen	1 orang	3.621.180	
	<b>Lulusan Setukpa</b>			
29	Pendidikan Setukpa	1 orang	3.438.503	
	<b>Lulusan Setukba</b>			
30	Pendidikan Setukba	1 orang	3.202.252	
	<b>Lulusan Dikbangspes Perwira Matra Udara</b>			
31	Dikbangspes Perwira Matra Udara	1 orang	3.406.875	
	<b>Lulusan Dikbangspes Bintara Matra Udara</b>			
32	Dikbangspes Bintara Matra Udara	1 orang	2.863.998	
	<b>Lulusan Dikbangspes Tamtama Matra Udara</b>			
33	Dikbangspes Tamtama Matra Udara	1 orang	2.761.800	
	<b>Peserta Dikbangspes Perwira</b>			
34	Seleksi Dikbangspes Perwira Matra Udara	1 orang	767.120	
	<b>Peserta Dikbangspes Bintara Tamtama</b>			
35	Seleksi Dikbangspes Bintara/Tamtama Matra Udara	1 orang	660.320	
36	Calon Karbol	1 orang	24.197.365	
37	Calon Bintara Matra Udara	1 orang	6.049.374	
38	Calon Tamtama Matra Udara	1 orang	4.380.498	
	<b>Laporan Penyidikan Perkara Pidana Prajurit</b>			
39	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 1	1 Kegiatan	8.282.000	
40	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 2	1 Kegiatan	8.870.000	
41	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 3	1 Kegiatan	9.291.000	
42	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 4	1 Kegiatan	8.456.000	
43	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 5	1 Kegiatan	20.556.000	
	<b>Laporan Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit</b>			
44	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 1	1 Kegiatan	2.048.000	
45	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 2	1 Kegiatan	2.188.000	
46	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 3	1 Kegiatan	2.288.000	
47	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 4	1 Kegiatan	2.088.000	
48	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 5	1 Kegiatan	5.008.000	
	<b>Pengurusan Tahanan Sementara</b>			
49	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 1	1 Kegiatan	44.625	
50	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 2	1 Kegiatan	45.805	
51	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 3	1 Kegiatan	50.855	
52	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 4	1 Kegiatan	45.755	
53	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 5	1 Kegiatan	58.205	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer</b>			
54	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 1	1 Kegiatan	6.026.000	
55	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 2	1 Kegiatan	6.456.000	
56	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 3	1 Kegiatan	6.766.000	
57	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 4	1 Kegiatan	6.166.000	
58	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 5	1 Kegiatan	15.165.000	
59	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara pidana militer Tk. Banding	1 Kegiatan	2.306.000	
60	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Kegiatan	2.306.000	
61	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Kegiatan	2.716.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum</b>			
62	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 1	1 Kegiatan	12.320.000	
63	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 2	1 Kegiatan	14.088.000	
64	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 3	1 Kegiatan	15.315.000	
65	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 4	1 Kegiatan	12.825.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
66	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 5	1 Kegiatan	49.127.000	
67	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Kegiatan	4.266.000	
68	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1 Kegiatan	3.274.000	
69	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Kegiatan	5.909.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat</b>			
70	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 1	1 Kegiatan	26.601.000	
71	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 2	1 Kegiatan	30.451.000	
72	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 3	1 Kegiatan	33.201.000	
73	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 4	1 Kegiatan	27.701.000	
74	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 5	1 Kegiatan	110.927.000	
75	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Pembanding Tk. Banding Rayon 1	1 Kegiatan	7.862.000	
76	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Pembanding Tk. Banding Rayon 2	1 Kegiatan	8.562.000	
77	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Pembanding Tk. Banding Rayon 3	1 Kegiatan	9.062.000	
78	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Pembanding Tk. Banding Rayon 4	1 Kegiatan	8.062.000	
79	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Pembanding Tk. Banding Rayon 5	1 Kegiatan	23.208.000	
80	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Kegiatan	13.174.000	
81	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Kegiatan	14.424.000	
82	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Kegiatan	15.374.000	
83	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Kegiatan	14.074.000	
84	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Kegiatan	37.192.000	
85	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1	1 Kegiatan	11.149.000	
86	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 2	1 Kegiatan	11.899.000	
87	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 3	1 Kegiatan	12.449.000	
88	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 4	1 Kegiatan	11.499.000	
89	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 5	1 Kegiatan	26.757.000	
	<b>Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat</b>			
90	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 1	1 Kegiatan	24.674.000	
91	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2	1 Kegiatan	28.874.000	
92	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 3	1 Kegiatan	31.874.000	
93	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 4	1 Kegiatan	25.874.000	
94	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 5	1 Kegiatan	116.658.000	
95	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 1	1 Kegiatan	9.072.000	
96	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 2	1 Kegiatan	10.822.000	
97	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 3	1 Kegiatan	12.072.000	
98	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 4	1 Kegiatan	9.572.000	
99	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 5	1 Kegiatan	47.388.000	
100	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Kegiatan	13.774.000	
101	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Kegiatan	15.724.000	
102	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Kegiatan	17.174.000	
103	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Kegiatan	14.874.000	
104	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Kegiatan	52.944.000	

AGW



Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	105 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1	1 Kegiatan	13.823.000	
	106 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2	1 Kegiatan	16.623.000	
	107 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3	1 Kegiatan	18.623.000	
	108 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4	1 Kegiatan	14.623.000	
	109 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 5	1 Kegiatan	75.212.000	

AGW



Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
013.05	<b>Direktorat Jenderal Pemasyarakatan</b>			
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Pembinaan UPT Pemasyarakatan</b>			
	1 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah DKI Jakarta	19 UPT	372.006.000	
	2 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Jawa Barat	40 UPT	838.248.000	
	3 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Jawa Tengah	58 UPT	1.100.260.000	
	4 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Jawa Timur	52 UPT	1.089.517.000	
	5 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah D.I. Yogyakarta	15 UPT	713.476.000	
	6 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Bali	14 UPT	768.568.000	
	7 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Banten	13 UPT	588.480.000	
	8 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Aceh	28 UPT	739.508.000	
	9 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Sumatera Utara	42 UPT	928.280.000	
	10 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Sumatera Barat	26 UPT	690.536.000	
	11 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Jambi	14 UPT	650.682.000	
	12 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Riau	20 UPT	626.064.000	
	13 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Bengkulu	10 UPT	525.776.000	
	14 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Sumatera Selatan	24 UPT	647.228.000	
	15 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Lampung	21 UPT	537.830.000	
	16 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Bangka Belitung	9 UPT	504.432.000	
	17 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Kepulauan Riau	12 UPT	610.732.000	
	18 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Kalimantan Barat	18 UPT	576.568.000	
	19 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Kalimantan Tengah	16 UPT	557.438.000	
	20 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Kalimantan Selatan	17 UPT	577.874.000	
	21 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Kalimantan Timur	16 UPT	688.462.000	
	22 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Maluku	17 UPT	760.716.000	
	23 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Maluku Utara	12 UPT	722.504.000	
	24 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Papua	14 UPT	1.163.880.000	
	25 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Papua Barat	11 UPT	993.096.000	
	26 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Sulawesi Utara	16 UPT	608.637.000	
	27 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Sulawesi Tengah	15 UPT	773.862.000	
	28 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Sulawesi Tenggara	11 UPT	614.340.000	
	29 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Sulawesi Selatan	28 UPT	805.852.000	
	30 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Sulawesi Barat	8 UPT	597.044.000	
	31 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah Gorontalo	7 UPT	558.584.000	
	32 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah NTB	13 UPT	641.586.000	
	33 Pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah NTT	21 UPT	674.076.000	
	<b>Layanan Pembinaan Narapidana</b>			
	34 Pembinaan Kemandirian Narapidana (Vol : 20 Napi)	20 Narapidana	38.300.000	
	<b>Layanan Pendidikan, Perlindungan dan Pengentasan Anak</b>			
	35 Pelatihan Keterampilan Anak (Vol : Per 20 Anak)	20 Napi Anak	23.300.000	
	36 Pembinaan Kepribadian Anak (Vol : Per 20 Anak)	20 Napi Anak	23.300.000	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Tindak Lanjut Mou</b>			
	37 Pelaksanaan Kegiatan Tindak Lanjut Mou	1 Dokumen	29.756.000	
	<b>Kebijakan Dan Penyelenggaraan Penegakan Kode Etik</b>			
	38 Rekomendasi Penegakan Kode Etik	1 Dokumen/Lap	5.880.000	
	<b>Pembinaan Layanan Pengaduan Dan Intelijen</b>			
	39 Penyelesaian Pengaduan	1 UPT	10.824.000	
	<b>Layanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan</b>			
	40 Pendampingan Peradilan Anak (Vol = Per Anak)	1 Klien	2.025.000	
	41 Pembimbingan Dan Pengawasan Oleh Bapas (Vol = Per Klien)	1 Klien	2.625.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Hukum dan HAM (013)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
013.06	<b>Direktorat Jenderal Imigrasi</b> <b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Produk Intelijen Keimigrasian</b>			
1	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian oleh Ditjen Imigrasi	1 Laporan	65.506.000	
	<b>Penyidikan Keimigrasian</b>			
2	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian oleh Ditjen Imigrasi	1 LHK	123.690.000	
	<b>Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian</b>			
3	Pendeportasian Oleh Ditjen Imigrasi	1 Orang	4.922.000	
	<b>Pengawasan Keimigrasian</b>			
4	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan Oleh Ditjen Imigrasi	1 LHK	65.506.000	
5	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan Oleh Ditjen Imigrasi	1 LHK	79.906.000	
	<b>Pengawasan Keimigrasian</b>			
6	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Aceh	1 LHK	37.395.000	
7	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Sumatera Utara	1 LHK	36.684.000	
8	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Riau	1 LHK	37.675.000	
9	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Kepulauan Riau	1 LHK	33.290.000	
10	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Jambi	1 LHK	34.100.000	
11	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Sumatera Barat	1 LHK	33.360.000	
12	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Sumatera Selatan	1 LHK	37.137.000	
13	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Lampung	1 LHK	32.862.000	
14	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Bengkulu	1 LHK	34.720.000	
15	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Bangka Belitung	1 LHK	35.357.000	
16	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Banten	1 LHK	35.820.000	
17	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Jawa Barat	1 LHK	34.735.000	
18	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Jakarta	1 LHK	38.780.000	
19	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Jawa Tengah	1 LHK	33.365.000	
20	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Yogyakarta	1 LHK	34.792.000	
21	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Jawa Timur	1 LHK	35.195.000	
22	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Bali	1 LHK	36.530.000	
23	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di NTB	1 LHK	37.820.000	
24	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di NTT	1 LHK	35.260.000	
25	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Kalimantan Barat	1 LHK	39.054.000	
26	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Kalimantan Tengah	1 LHK	39.532.000	
27	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Kalimantan Selatan	1 LHK	33.820.000	
28	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Kalimantan Timur	1 LHK	63.829.000	
29	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Kalimantan Utara	1 LHK	63.669.000	
30	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Sulawesi Utara	1 LHK	36.024.000	
31	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Gorontalo	1 LHK	41.830.000	
32	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Sulawesi Barat	1 LHK	36.320.000	
33	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Sulawesi Selatan	1 LHK	36.795.000	
34	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Sulawesi Tengah	1 LHK	39.355.000	
35	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Sulawesi Tenggara	1 LHK	37.830.000	
36	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Maluku	1 LHK	54.515.000	
37	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Maluku Utara	1 LHK	54.230.000	
38	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Papua	1 LHK	87.110.000	
39	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Papua Barat	1 LHK	83.630.000	
40	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Aceh	1 LHK	37.395.000	
41	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Sumatera Utara	1 LHK	36.684.000	
42	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Riau	1 LHK	37.675.000	
43	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Kepulauan Riau	1 LHK	33.290.000	
44	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Jambi	1 LHK	34.100.000	
45	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Sumatera Barat	1 LHK	33.360.000	
46	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Sumatera Selatan	1 LHK	37.137.000	
47	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Lampung	1 LHK	32.862.000	
48	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Bengkulu	1 LHK	34.720.000	
49	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Bangka Belitung	1 LHK	35.357.000	
50	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Banten	1 LHK	35.820.000	
51	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Jawa Barat	1 LHK	34.735.000	
52	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Jakarta	1 LHK	38.780.000	
53	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Jawa Tengah	1 LHK	33.365.000	
54	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Yogyakarta	1 LHK	34.792.000	

AN



Kementerian Negara/Lembaga: Hukum dan HAM (013)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
55	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Jawa Timur	1 LHK	35.195.000	
56	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Bali	1 LHK	36.530.000	
57	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di NTB	1 LHK	37.820.000	
58	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di NTT	1 LHK	35.260.000	
59	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Kalimantan Barat	1 LHK	39.054.000	
60	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Kalimantan Tengah	1 LHK	39.532.000	
61	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Kalimantan Selatan	1 LHK	33.820.000	
62	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Kalimantan Timur	1 LHK	63.829.000	
63	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Kalimantan Utara	1 LHK	63.669.000	
64	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Sulawesi Utara	1 LHK	36.024.000	
65	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Gorontalo	1 LHK	41.830.000	
66	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Sulawesi Barat	1 LHK	36.320.000	
67	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Sulawesi Tengah	1 LHK	39.355.000	
68	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Tenggara	1 LHK	37.830.000	
69	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Maluku	1 LHK	54.515.000	
70	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Maluku Utara	1 LHK	54.230.000	
71	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Papua	1 LHK	87.110.000	
72	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Papua Barat	1 LHK	83.630.000	
73	Operasi Mandiri Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Sulawesi Selatan	1 LHK	36.795.000	
74	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Aceh	1 LHK	67.702.000	
75	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Sumatera Utara	1 LHK	66.520.000	
76	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Riau	1 LHK	71.054.000	
77	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Kepulauan Riau	1 LHK	62.244.000	
78	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Jambi	1 LHK	62.640.000	
79	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Sumatera Barat	1 LHK	62.380.000	
80	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Sumatera Selatan	1 LHK	68.857.000	
81	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Lampung	1 LHK	59.158.000	
82	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Bengkulu	1 LHK	64.358.000	
83	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Bangka Belitung	1 LHK	64.434.000	
84	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Banten	1 LHK	67.162.000	
85	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Jawa Barat	1 LHK	65.390.000	
86	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Jakarta	1 LHK	77.424.000	
87	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Jawa Tengah	1 LHK	60.192.000	
88	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Yogyakarta	1 LHK	74.390.000	
89	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Jawa Timur	1 LHK	65.808.000	
90	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Bali	1 LHK	73.560.000	
91	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di NTB	1 LHK	72.570.000	
92	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di NTT	1 LHK	66.530.000	
93	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Kalimantan Barat	1 LHK	71.836.000	
94	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Kalimantan Tengah	1 LHK	71.543.000	
95	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Kalimantan Selatan	1 LHK	62.390.000	
96	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Kalimantan Timur	1 LHK	121.358.000	
97	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Kalimantan Utara	1 LHK	121.198.000	

ABW

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
98	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Sulawesi Utara	1 LHK	66.724.000	
99	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Gorontalo	1 LHK	79.058.000	
100	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Sulawesi Barat	1 LHK	69.780.000	
101	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Sulawesi Selatan	1 LHK	56.497.000	
102	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Sulawesi Tengah	1 LHK	75.533.000	
103	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Sulawesi Tenggara	1 LHK	71.422.000	
104	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Maluku	1 LHK	101.169.000	
105	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Maluku Utara	1 LHK	101.010.000	
106	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Papua	1 LHK	171.003.000	
107	Operasi Gabungan Dalam Rangka Pengawasan Lapangan di Papua Barat	1 LHK	159.210.000	
	<b>Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian</b>			
108	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Aceh	1 Orang	20.536.000	
109	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Sumatera Utara	1 Orang	19.036.000	
110	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Riau	1 Orang	16.666.000	
111	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Kepulauan Riau	1 Orang	15.698.000	
112	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Jambi	1 Orang	14.886.000	
113	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Sumatera Barat	1 Orang	16.158.000	
114	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Sumatera Selatan	1 Orang	14.731.000	
115	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Lampung	1 Orang	12.487.000	
116	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Bengkulu	1 Orang	15.270.000	
117	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Bangka Belitung	1 Orang	13.827.000	
118	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Banten	1 Orang	6.835.000	
119	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Jawa Barat	1 Orang	7.263.000	
120	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Jakarta	1 Orang	4.922.000	
121	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Jawa Tengah	1 Orang	13.629.000	
122	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Yogyakarta	1 Orang	14.335.000	
123	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Jawa Timur	1 Orang	15.753.000	
124	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Bali	1 Orang	17.419.000	
125	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di NTB	1 Orang	17.837.000	
126	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di NTT	1 Orang	21.462.000	
127	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Kalimantan Barat	1 Orang	16.588.000	
128	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Kalimantan Tengah	1 Orang	16.931.000	
129	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Kalimantan Selatan	1 Orang	16.195.000	
130	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Kalimantan Timur	1 Orang	25.224.000	
131	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Kalimantan Utara	1 Orang	27.562.000	
132	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Sulawesi Utara	1 Orang	21.827.000	
133	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Gorontalo	1 Orang	22.702.000	
134	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Sulawesi Barat	1 Orang	22.047.000	
135	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Sulawesi Selatan	1 Orang	18.895.000	
136	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Sulawesi Tengah	1 Orang	22.599.000	
137	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Sulawesi Tenggara	1 Orang	20.003.000	
138	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Maluku	1 Orang	30.897.000	
139	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Maluku Utara	1 Orang	29.718.000	
140	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Papua	1 Orang	40.903.000	
141	Pendeportasian oleh Kantor Imigrasi di Papua Barat	1 Orang	45.816.000	
142	Pendeportasian oleh Rumah Detensi Imigrasi di Sumatera Utara	1 Orang	19.036.000	
143	Pendeportasian oleh Rumah Detensi Imigrasi di Riau	1 Orang	16.666.000	
144	Pendeportasian oleh Rumah Detensi Imigrasi di Kepulauan Riau	1 Orang	15.698.000	
145	Pendeportasian Deteni Oleh Rumah Detensi Imigrasi Di Jakarta	1 Orang	4.922.000	
146	Pendeportasian oleh Rumah Detensi Imigrasi di Jawa Tengah	1 Orang	13.629.000	
147	Pendeportasian oleh Rumah Detensi Imigrasi di Jawa Timur	1 Orang	15.753.000	
148	Pendeportasian oleh Rumah Detensi Imigrasi di Bali	1 Orang	17.419.000	
149	Pendeportasian oleh Rumah Detensi Imigrasi di NTT	1 Orang	21.462.000	
150	Pendeportasian oleh Rumah Detensi Imigrasi di Kalimantan Barat	1 Orang	16.588.000	
151	Pendeportasian oleh Rumah Detensi Imigrasi di Kalimantan Timur	1 Orang	25.224.000	
152	Pendeportasian oleh Rumah Detensi Imigrasi di Sulawesi Utara	1 Orang	21.827.000	
153	Pendeportasian oleh Rumah Detensi Imigrasi di Sulawesi Selatan	1 Orang	18.895.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Hukum dan HAM (013)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	154 Pendeportasian oleh Rumah Detensi Imigrasi di Papua <b>Penyidikan Keimigrasian</b>	1 Orang	40.903.000	
	155 Penyidikan Keimigrasian di Aceh	1 LHK	89.455.000	
	156 Penyidikan Keimigrasian di Sumatera Utara	1 LHK	86.238.000	
	157 Penyidikan Keimigrasian di Riau	1 LHK	88.651.000	
	158 Penyidikan Keimigrasian di Kepri	1 LHK	72.162.000	
	159 Penyidikan Keimigrasian di Jambi	1 LHK	78.024.000	
	160 Penyidikan Keimigrasian di Sumatera Barat	1 LHK	74.582.000	
	161 Penyidikan Keimigrasian di Sumatera Selatan	1 LHK	84.546.000	
	162 Penyidikan Keimigrasian di Lampung	1 LHK	73.258.000	
	163 Penyidikan Keimigrasian di Bengkulu	1 LHK	80.120.000	
	164 Penyidikan Keimigrasian di Bangka Belitung	1 LHK	78.319.000	
	165 Penyidikan Keimigrasian di Banten	1 LHK	83.382.000	
	166 Penyidikan Keimigrasian di Jawa Barat	1 LHK	78.585.000	
	167 Penyidikan Keimigrasian di Jakarta	1 LHK	123.690.000	
	168 Penyidikan Keimigrasian di Jawa Tengah	1 LHK	74.191.000	
	169 Penyidikan Keimigrasian di Yogyakarta	1 LHK	78.281.000	
	170 Penyidikan Keimigrasian di Jawa Timur	1 LHK	79.511.000	
	171 Penyidikan Keimigrasian di Bali	1 LHK	83.932.000	
	172 Penyidikan Keimigrasian di NTB	1 LHK	90.920.000	
	173 Penyidikan Keimigrasian di NTT	1 LHK	81.042.000	
	174 Penyidikan Keimigrasian di Kalimantan Barat	1 LHK	96.020.000	
	175 Penyidikan Keimigrasian di Kalimantan Tengah	1 LHK	95.483.000	
	176 Penyidikan Keimigrasian di Kalimantan Selatan	1 LHK	76.848.000	
	177 Penyidikan Keimigrasian di Kalimantan Timur	1 LHK	186.329.000	
	178 Penyidikan Keimigrasian di Kalimantan Utara	1 LHK	185.977.000	
	179 Penyidikan Keimigrasian di Sulawesi Utara	1 LHK	81.762.000	
	180 Penyidikan Keimigrasian di Gorontalo	1 LHK	106.094.000	
	181 Penyidikan Keimigrasian di Sulawesi Barat	1 LHK	85.128.000	
	182 Penyidikan Keimigrasian di Sulawesi Selatan	1 LHK	86.864.000	
	183 Penyidikan Keimigrasian di Sulawesi Tengah	1 LHK	95.346.000	
	184 Penyidikan Keimigrasian di Sulawesi Tenggara	1 LHK	90.132.000	
	185 Penyidikan Keimigrasian di Maluku	1 LHK	152.790.000	
	186 Penyidikan Keimigrasian di Maluku Utara	1 LHK	152.246.000	
	187 Penyidikan Keimigrasian di Papua	1 LHK	273.319.000	
	188 Penyidikan Keimigrasian di Papua Barat	1 LHK	262.378.000	
<b>013.09</b>	<b>Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Pembangunan HAM di Wilayah</b>			
	1 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil DKI Jakarta	1 Laporan	36.750.000	
	2 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Jawa Barat	1 Laporan	36.750.000	
	3 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Jawa Tengah	1 Laporan	36.750.000	
	4 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Jawa Timur	1 Laporan	36.750.000	
	5 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Sumatera Utara	1 Laporan	36.750.000	
	6 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Sulawesi Selatan	1 Laporan	36.750.000	
	7 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Aceh	1 Laporan	36.750.000	
	8 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Sumatera Barat	1 Laporan	36.750.000	
	9 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Riau	1 Laporan	36.750.000	
	10 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Sumatera Selatan	1 Laporan	36.750.000	
	11 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Lampung	1 Laporan	36.750.000	
	12 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Kalimantan Barat	1 Laporan	36.750.000	
	13 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kalimantan Selatan	1 Laporan	36.750.000	
	14 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Kalimantan Timur	1 Laporan	36.750.000	
	15 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Sulawesi Utara	1 Laporan	36.750.000	
	16 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Bali	1 Laporan	36.750.000	
	17 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil NTT	1 Laporan	36.750.000	
	18 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Maluku	1 Laporan	36.750.000	
	19 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Papua	1 Laporan	36.750.000	
	20 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Jambi	1 Laporan	36.750.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Hukum dan HAM (013)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	21 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Yogyakarta	1 Laporan	36.750.000	
	22 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Bengkulu	1 Laporan	36.750.000	
	23 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Palangkaraya	1 Laporan	36.750.000	
	24 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Sulawesi Tenggara	1 Laporan	36.750.000	
	25 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Palu	1 Laporan	36.750.000	
	26 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil NTB	1 Laporan	36.750.000	
	27 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Banten	1 Laporan	36.750.000	
	28 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Bangka Belitung	1 Laporan	36.750.000	
	29 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Gorontalo	1 Laporan	36.750.000	
	30 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Maluku Utara	1 Laporan	36.750.000	
	31 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Papua Barat	1 Laporan	36.750.000	
	32 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Kepri	1 Laporan	36.750.000	
	33 Telaahan/Rekomendasi Produk Hukum Daerah Dari Perspektif HAM Kanwil Sulawesi Barat	1 Laporan	36.750.000	
	34 Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil DKI Jakarta	1 Laporan	51.350.000	
	35 Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Jawa Barat	1 Laporan	43.840.000	
	36 Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Jawa Tengah	1 Laporan	51.750.000	
	37 Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Jawa Timur	1 Laporan	58.150.000	
	38 Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Sumatera Utara	1 Laporan	48.950.000	
	39 Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Sulawesi Selatan	1 Laporan	52.150.000	
	40 Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Aceh	1 Laporan	48.950.000	
	41 Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Sumatera Barat	1 Laporan	48.550.000	
	42 Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Riau	1 Laporan	52.150.000	
	43 Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Sulawesi Barat	1 Laporan	48.950.000	
	44 Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Sumatera Selatan	1 Laporan	48.150.000	
	45 Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Lampung	1 Laporan	48.150.000	
	46 Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Kalimantan Barat	1 Laporan	59.910.000	
	47 Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Kalimantan Selatan	1 Laporan	48.950.000	
	48 Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Kalimantan Timur	1 Laporan	52.950.000	
	49 Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Sulawesi Utara	1 Laporan	52.950.000	
	50 Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Bali	1 Laporan	48.950.000	
	51 Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil NTT	1 Laporan	50.550.000	
	52 Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Maluku	1 Laporan	59.750.000	
	53 Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Papua	1 Laporan	116.325.000	
	54 Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Jambi	1 Laporan	48.150.000	
	55 Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Yogyakarta	1 Laporan	49.350.000	
	56 Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Bengkulu	1 Laporan	49.750.000	
	57 Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Kalimantan Tengah	1 Laporan	48.950.000	
	58 Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Sulawesi Tenggara	1 Laporan	50.550.000	
	59 Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Palu	1 Laporan	50.550.000	
	60 Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil NTB	1 Laporan	48.150.000	
	61 Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Banten	1 Laporan	48.150.000	
	62 Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Bangka Belitung	1 Laporan	50.870.000	
	63 Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Gorontalo	1 Laporan	48.950.000	
	64 Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Maluku Utara	1 Laporan	56.950.000	
	65 Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Papua Barat	1 Laporan	82.293.000	
	66 Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Kepri	1 Laporan	55.142.000	
<b>013.10</b>	<b>Badan Pembinaan Hukum Nasional</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran</b>			
	1 Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	1 Kasus	8.000.000	
	2 Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	1 Kegiatan	10.670.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Hukum dan HAM (013)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
013.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia <b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b>			
	1 Diklat Berbasis Kompetensi di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS	40 Orang	290.285.000	
	2 Diklat Berbasis Kompetensi di Bidang Pelatihan Terpadu SPPA Bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Lainnya	30 Orang	278.050.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Keuangan (015)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
015.01	<b>Sekretariat Jenderal</b> <b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b> 1 Layanan Pengawasan Profesi Keuangan	3 Layanan	4.827.148.000	
015.02	<b>Inspektorat Jenderal</b> <b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b> 1 Layanan Pencegahan dan Penanganan Pengaduan KKN 2 Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern pada DJP 3 Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern pada DJBC 4 Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern pada DJPB dan DJPPR 5 Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern pada DJKN dan BKF 6 Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern pada DJA, DJPK, dan Pelaksanaan Belanja Modal 7 Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern pada Setjen dan BPPK 8 Pengembangan Pengawasan Intern	9 Layanan 6 Rekomendasi 6 Rekomendasi 6 Rekomendasi 6 Rekomendasi 6 Rekomendasi 6 Rekomendasi 6 Rekomendasi	6.172.634.000 4.659.397.000 3.848.258.000 5.199.400.000 3.754.094.000 4.114.597.000 3.782.770.000 4.230.527.000	
015.03	<b>Direktorat Jenderal Anggaran</b> <b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b> <b>Pedoman Bidang Penganggaran</b> 1 PMK Tata Cara Revisi Anggaran 2 PMK tentang Standar Biaya Masukan 3 PMK tentang Standar Biaya Keluaran	1 Peraturan 1 Peraturan 1 Peraturan	1.193.623.000 1.595.470.000 960.032.000	
015.04	<b>Direktorat Jenderal Pajak</b> <b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b> <b>Dokumen Informasi di Bidang Intelijen Perpajakan</b> 1 Laporan Hasil Intelijen Perpajakan (LHIP) dengan Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) <b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b> 2 Penidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Wilayah Luar Jawa 3 Penidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Wilayah Jawa 4 Penyanderaan ( <i>Gijzeling</i> ) 5 Laporan Hasil Intelijen Perpajakan dengan Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk Wilayah Sumatera 6 Laporan Hasil Intelijen Perpajakan dengan Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk Wilayah Jakarta 7 Laporan Hasil Intelijen Perpajakan dengan Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk Wilayah Jawa Bali 8 Laporan Hasil Intelijen Perpajakan dengan Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk Wilayah Kalimantan 9 Laporan Hasil Intelijen Perpajakan dengan Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk Wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara 10 Laporan Hasil Intelijen Perpajakan dengan Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk Wilayah Papua dan Maluku 11 Laporan Hasil Intelijen Perpajakan dengan Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk Kanwil DJP Jakarta Khusus dan WP Besar <b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b> <b>Dokumen di Bidang Penegakan Hukum</b> 12 Penidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan <b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b> <b>Dokumen di Bidang Penegakan Hukum</b> 13 LPBP Dengan Tindak Lanjut Penidikan	72 Dokumen 1 Berkas 2 Berkas 2 Penanggung 8 Dokumen 12 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 20 Dokumen 40 Dokumen 1 Dokumen	2.765.080.000 217.120.000 434.240.000 139.122.000 257.108.000 289.060.000 246.484.000 258.808.000 275.800.000 363.400.000 429.460.000 12.086.800.000 236.278.000	

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Keuangan (015)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
015.05	<b>Direktorat Jenderal Bea dan Cukai</b>			
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Laporan Hasil Audit</b>			
	1 Laporan Hasil Audit Penugasan Dalam Kota	55 Dokumen	736.230.000	
	2 Laporan Hasil Audit Penugasan Luar Kota 1	90 Dokumen	3.151.620.000	
	3 Laporan Hasil Audit Penugasan Luar Kota 2	75 Dokumen	5.269.650.000	
	4 Laporan Hasil Audit Penugasan Luar Kota 3	30 Dokumen	2.801.250.000	
015.08	<b>Direktorat Jenderal Perbendaharaan</b>			
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN</b>			
	1 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Jakarta I	12 Laporan	71.600.000	
	2 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Jakarta II	12 Laporan	71.600.000	
	3 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Jakarta III	12 Laporan	71.600.000	
	4 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Jakarta IV	12 Laporan	71.600.000	
	5 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Jakarta V	12 Laporan	71.600.000	
	6 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Jakarta VI	12 Laporan	71.600.000	
	7 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Jakarta VII	12 Laporan	71.600.000	
	8 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah	12 Laporan	71.600.000	
	9 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Bekasi	12 Laporan	63.600.000	
	10 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Kuningan	12 Laporan	63.800.000	
	11 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Sumedang	12 Laporan	62.900.000	
	12 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Garut	12 Laporan	63.160.000	
	13 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Karawang	12 Laporan	63.260.000	
	14 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Purwakarta	12 Laporan	62.660.000	
	15 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Tasikmalaya	12 Laporan	74.200.000	
	16 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Sukabumi	12 Laporan	73.820.000	
	17 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Bogor	12 Laporan	75.000.000	
	18 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Cirebon	12 Laporan	63.700.000	
	19 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Bandung II	12 Laporan	48.000.000	
	20 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Bandung I	12 Laporan	60.600.000	
	21 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Banjarnegara	12 Laporan	60.020.000	
	22 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Purwodadi	12 Laporan	59.520.000	
	23 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Sragen	12 Laporan	59.820.000	
	24 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Klaten	12 Laporan	59.820.000	
	25 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Cilacap	12 Laporan	60.420.000	
	26 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Pati	12 Laporan	59.620.000	
	27 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Purworejo	12 Laporan	59.820.000	
	28 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Tegal	12 Laporan	71.020.000	
	29 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Magelang	12 Laporan	70.620.000	
	30 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Kudus	12 Laporan	70.520.000	
	31 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Pekalongan	12 Laporan	70.720.000	
	32 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Purwokerto	12 Laporan	71.220.000	
	33 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Surakarta	12 Laporan	70.720.000	
	34 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Semarang II	12 Laporan	48.000.000	
	35 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Semarang I	12 Laporan	48.000.000	
	36 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Wonosari	12 Laporan	67.900.000	
	37 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Wates	12 Laporan	67.900.000	
	38 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Yogyakarta	12 Laporan	60.600.000	
	39 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Blitar	12 Laporan	75.680.000	
	40 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Tuban	12 Laporan	64.480.000	

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Keuangan (015)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	41 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Sidoarjo	12 Laporan	64.380.000	
	42 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Jember	12 Laporan	64.800.000	
	43 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Pacitan	12 Laporan	65.280.000	
	44 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Mojokerto	12 Laporan	64.080.000	
	45 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Banyuwangi	12 Laporan	65.280.000	
	46 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Bojonegoro	12 Laporan	64.080.000	
	47 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Pamekasan	12 Laporan	75.440.000	
	48 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Bondowoso	12 Laporan	75.680.000	
	49 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Madiun	12 Laporan	75.480.000	
	50 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Kediri	12 Laporan	75.280.000	
	51 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Malang	12 Laporan	75.140.000	
	52 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Surabaya II	12 Laporan	60.600.000	
	53 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Surabaya I	12 Laporan	60.600.000	
	54 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Lhokseumawe	12 Laporan	71.720.000	
	55 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Kutacane	12 Laporan	65.120.000	
	56 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Takengon	12 Laporan	61.780.000	
	57 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Tapak Tuan	12 Laporan	62.420.000	
	58 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Langsa	12 Laporan	61.940.000	
	59 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Meulaboh	12 Laporan	72.420.000	
	60 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Banda Aceh	12 Laporan	71.600.000	
	61 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Padang Sidempuan	12 Laporan	68.700.000	
	62 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Balige	12 Laporan	62.300.000	
	63 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Tebing Tinggi	12 Laporan	59.760.000	
	64 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Sibolga	12 Laporan	62.600.000	
	65 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Sidikalang	12 Laporan	61.100.000	
	66 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Rantau Prapat	12 Laporan	61.440.000	
	67 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Tanjung Balai	12 Laporan	61.400.000	
	68 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Gunung Sitoli	12 Laporan	66.700.000	
	69 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Pematang Siantar	12 Laporan	60.200.000	
	70 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Medan II	12 Laporan	60.600.000	
	71 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Medan I	12 Laporan	48.000.000	
	72 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Painan	12 Laporan	62.500.000	
	73 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Lubuksikaping	12 Laporan	63.400.000	
	74 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Solok	12 Laporan	62.600.000	
	75 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Sijunjung	12 Laporan	62.900.000	
	76 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Bukittinggi	12 Laporan	73.700.000	
	77 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Padang	12 Laporan	60.600.000	
	78 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Dumai	12 Laporan	70.140.000	
	79 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Rengat	12 Laporan	68.440.000	
	80 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Pekanbaru	12 Laporan	60.600.000	
	81 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Bangko	12 Laporan	60.700.000	
	82 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Kuala Tungkal	12 Laporan	60.000.000	
	83 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Muara Bungo	12 Laporan	60.900.000	
	84 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Sungai Penuh	12 Laporan	62.000.000	
	85 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Jambi	12 Laporan	60.600.000	
	86 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Sekayu	12 Laporan	67.320.000	
	87 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Baturaja	12 Laporan	67.580.000	
	88 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Lubuk Linggau	12 Laporan	68.420.000	

ABW



Kementerian Negara/Lembaga: Keuangan (015)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	89 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Lahat	12 Laporan	67.620.000	
	90 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Palembang	12 Laporan	60.600.000	
	91 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Metro	12 Laporan	58.080.000	
	92 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Liwa	12 Laporan	58.800.000	
	93 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Kotabumi	12 Laporan	69.440.000	
	94 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Bandar Lampung	12 Laporan	60.600.000	
	95 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Pontianak	12 Laporan	60.600.000	
	96 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Sintang	12 Laporan	64.000.000	
	97 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Ketapang	12 Laporan	67.160.000	
	98 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Singkawang	12 Laporan	61.300.000	
	99 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Putussibau	12 Laporan	67.160.000	
	100 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Sanggau	12 Laporan	62.220.000	
	101 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Palangkaraya	12 Laporan	60.600.000	
	102 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Buntok	12 Laporan	74.780.000	
	103 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Pangkalan Bun	12 Laporan	66.480.000	
	104 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Sampit	12 Laporan	63.980.000	
	105 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Banjarmasin	12 Laporan	60.600.000	
	106 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Barabai	12 Laporan	71.440.000	
	107 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Tanjung	12 Laporan	71.880.000	
	108 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Kotabaru	12 Laporan	62.000.000	
	109 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Peleihari	12 Laporan	60.200.000	
	110 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Samarinda	12 Laporan	60.600.000	
	111 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Balikpapan	12 Laporan	84.980.000	
	112 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Tarakan	12 Laporan	84.980.000	
	113 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Tanjung Redeb	12 Laporan	70.780.000	
	114 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Nunukan	12 Laporan	75.980.000	
	115 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Bitung	12 Laporan	64.240.000	
	116 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Kotamobagu	12 Laporan	65.740.000	
	117 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Tahuna	12 Laporan	77.240.000	
	118 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Manado	12 Laporan	60.600.000	
	119 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Toli-Toli	12 Laporan	72.360.000	
	120 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Poso	12 Laporan	69.720.000	
	121 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Luwuk	12 Laporan	71.860.000	
	122 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Palu	12 Laporan	60.600.000	
	123 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Sinjai	12 Laporan	64.900.000	
	124 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Makale	12 Laporan	67.200.000	
	125 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Benteng	12 Laporan	67.700.000	
	126 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Watampone	12 Laporan	65.000.000	
	127 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Palopo	12 Laporan	67.200.000	
	128 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Bantaeng	12 Laporan	64.700.000	
	129 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Pare-Pare	12 Laporan	75.700.000	
	130 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Makassar II	12 Laporan	48.000.000	
	131 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Makassar I	12 Laporan	54.000.000	
	132 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Kolaka	12 Laporan	68.520.000	
	133 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Raha	12 Laporan	70.320.000	
	134 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Bau Bau	12 Laporan	73.120.000	
	135 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Kendari	12 Laporan	60.600.000	
	136 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Masohi	12 Laporan	67.240.000	
	137 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Saumlaki	12 Laporan	76.740.000	
	138 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Tual	12 Laporan	72.740.000	

Agw



Kementerian Negara/Lembaga: Keuangan (015)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	139 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Ambon	12 Laporan	60.600.000	
	140 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Amlapura	12 Laporan	71.860.000	
	141 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Singaraja	12 Laporan	71.900.000	
	142 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Denpasar	12 Laporan	60.600.000	
	143 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Selong	12 Laporan	63.600.000	
	144 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Sumbawa Besar	12 Laporan	63.500.000	
	145 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Bima	12 Laporan	66.200.000	
	146 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Mataram	12 Laporan	60.600.000	
	147 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Larantuka	12 Laporan	73.400.000	
	148 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Atambua	12 Laporan	64.400.000	
	149 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Ruteng	12 Laporan	71.900.000	
	150 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Waingapu	12 Laporan	69.900.000	
	151 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Ende	12 Laporan	68.900.000	
	152 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Kupang	12 Laporan	60.600.000	
	153 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Jayapura	12 Laporan	70.600.000	
	154 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Biak	12 Laporan	105.980.000	
	155 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Merauke	12 Laporan	99.980.000	
	156 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Nabire	12 Laporan	115.980.000	
	157 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Wamena	12 Laporan	101.980.000	
	158 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Serui	12 Laporan	110.980.000	
	159 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Timika	12 Laporan	96.980.000	
	160 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Muko-Muko	12 Laporan	63.600.000	
	161 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Curup	12 Laporan	61.840.000	
	162 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Manna	12 Laporan	62.340.000	
	163 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Bengkulu	12 Laporan	48.000.000	
	164 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Tobelo	12 Laporan	64.200.000	
	165 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Ternate	12 Laporan	60.600.000	
	166 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Rangkasbitung	12 Laporan	63.620.000	
	167 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Tangerang	12 Laporan	76.720.000	
	168 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Serang	12 Laporan	60.600.000	
	169 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Tanjung Pandan	12 Laporan	66.140.000	
	170 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Pangkalpinang	12 Laporan	60.600.000	
	171 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Marisa	12 Laporan	73.880.000	
	172 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Gorontalo	12 Laporan	60.600.000	
	173 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Batam	12 Laporan	68.740.000	
	174 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Tanjung Pinang	12 Laporan	48.000.000	
	175 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Fakfak	12 Laporan	81.400.000	
	176 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Sorong	12 Laporan	87.400.000	
	177 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Manokwari	12 Laporan	54.000.000	
	178 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Majene	12 Laporan	65.180.000	
	179 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN Mamuju	12 Laporan	54.000.000	
<b>015.11</b>	<b>Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan</b>			
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Layanan BLU</b>			
	1 Layanan Program Pendidikan Diploma I Kerjasama	1 Layanan	875.720.000	
	2 Layanan Program Pendidikan Diploma III Kerjasama	1 Layanan	1.706.118.000	
	3 Layanan Pelatihan 3 Hari	1 Layanan	63.426.000	
	4 Layanan Pelatihan 5 Hari	1 Layanan	87.154.000	
	5 Layanan Pelatihan 10 Hari	1 Layanan	160.424.000	
	6 Layanan Pelatihan 15 Hari	1 Layanan	242.500.000	

ABW



Kementerian Negara/Lembaga: Keuangan (015)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	7 Layanan Pelatihan 30 Hari	1 Layanan	450.310.000	
	8 Layanan Pelatihan 60 Hari	1 Layanan	877.326.000	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Layanan Kediklatan di Daerah</b>			
	9 Diklat Selama 3 s.d. 5 Hari Asrama Internal	1 Layanan	2.370.100	
	10 Diklat Selama 3 s.d. 5 Hari Tidak Diasramakan	1 Layanan	1.711.233	
	11 Diklat Selama 3 s.d. 5 Hari Asrama Eksternal	1 Layanan	5.213.366	
	12 Diklat Selama 6 s.d. 12 Hari Asrama Internal	1 Layanan	4.161.100	
	13 Diklat Selama 6 s.d. 12 Hari Tidak Diasramakan	1 Layanan	2.604.866	
	14 Diklat Selama 6 s.d. 12 Hari Asrama Eksternal	1 Layanan	10.171.800	
	15 Diklat Selama 13 s.d. 19 Hari Asrama Internal	1 Layanan	5.937.033	
	16 Diklat Selama 13 s.d. 19 Hari Tidak Diasramakan	1 Layanan	3.487.600	
	17 Diklat Selama 13 s.d. 19 Hari Asrama Eksternal	1 Layanan	15.115.133	
	18 Diklat Selama 20 s.d. 26 Hari Asrama Internal	1 Layanan	7.727.966	
	19 Diklat Selama 20 s.d. 26 Hari Tidak Diasramakan	1 Layanan	4.381.200	
	20 Diklat Selama 20 s.d. 26 Hari Asrama Eksternal	1 Layanan	20.073.533	
	21 Diklat Selama 27 s.d. 33 Hari Asrama Internal	1 Layanan	9.512.266	
	22 Diklat Selama 27 s.d. 33 Hari Tidak Diasramakan	1 Layanan	5.268.133	
	23 Diklat Selama 27 s.d. 33 Hari Asrama Eksternal	1 Layanan	25.025.266	
	24 Diklat Kesamaptaaan Asrama Internal	1 Layanan	12.805.600	
	25 Diklat Kesamaptaaan Asrama Eksternal	1 Layanan	28.293.600	
	<b>Layanan Kediklatan di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan</b>			
	26 Diklat Selama 3 s.d. 5 Hari Asrama Internal	1 Layanan	2.460.133	
	27 Diklat Selama 3 s.d. 5 Hari Tidak Diasramakan	1 Layanan	1.768.033	
	28 Diklat Selama 3 s.d. 5 Hari Asrama Eksternal	1 Layanan	5.219.500	
	29 Diklat Selama 6 s.d. 12 Hari Asrama Internal	1 Layanan	4.369.966	
	30 Diklat Selama 6 s.d. 12 Hari Tidak Diasramakan	1 Layanan	2.734.033	
	31 Diklat Selama 6 s.d. 12 Hari Asrama Eksternal	1 Layanan	10.180.066	
	32 Diklat Selama 13 s.d. 19 Hari Asrama Internal	1 Layanan	6.264.766	
	33 Diklat Selama 13 s.d. 19 Hari Tidak Diasramakan	1 Layanan	3.689.166	
	34 Diklat Selama 13 s.d. 19 Hari Asrama Eksternal	1 Layanan	15.125.600	
	35 Diklat Selama 20 s.d. 26 Hari Asrama Internal	1 Layanan	8.174.633	
	36 Diklat Selama 20 s.d. 26 Hari Tidak Diasramakan	1 Layanan	4.655.200	
	37 Diklat Selama 20 s.d. 26 Hari Asrama Eksternal	1 Layanan	20.086.200	
	38 Diklat Selama 27 s.d. 33 Hari Asrama Internal	1 Layanan	10.077.766	
	39 Diklat Selama 27 s.d. 33 Hari Tidak Diasramakan	1 Layanan	5.614.500	
	40 Diklat Selama 27 s.d. 33 Hari Asrama Eksternal	1 Layanan	25.040.066	
	41 Diklat Orientasi Asrama Internal	1 Layanan	3.810.666	
	42 Diklat Orientasi Asrama eksternal	1 Layanan	6.214.400	
	<b>Layanan Kediklatan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai</b>			
	43 Diklat Selama 3 s.d. 5 Hari Asrama Internal	1 Layanan	2.460.133	
	44 Diklat di Daerah Selama 3 s.d. 5 Hari Tidak Diasramakan	1 Layanan	1.768.033	

Kementerian Negara/Lembaga: Keuangan (015)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	45 Diklat Selama 3 s.d. 5 Hari Asrama Eksternal	1 Layanan	5.219.500	
	46 Diklat Selama 6 s.d. 12 Hari Asrama Internal	1 Layanan	4.369.966	
	47 Diklat Selama 6 s.d. 12 Hari Tidak Diasramakan	1 Layanan	2.734.033	
	48 Diklat Selama 6 s.d. 12 Hari Asrama Eksternal	1 Layanan	10.180.066	
	49 Diklat Selama 13 s.d. 19 Hari Asrama Internal	1 Layanan	6.264.766	
	50 Diklat Selama 13 s.d. 19 Hari Tidak Diasramakan	1 Layanan	3.689.166	
	51 Diklat Selama 13 s.d. 19 Hari Asrama Eksternal	1 Layanan	15.125.600	
	52 Diklat Selama 20 s.d. 26 Hari Asrama Internal	1 Layanan	8.174.633	
	53 Diklat Selama 20 s.d. 26 Hari Tidak Diasramakan	1 Layanan	4.655.200	
	54 Diklat Selama 20 s.d. 26 Hari Asrama Eksternal	1 Layanan	20.086.200	
	55 Diklat Selama 27 s.d. 33 Hari Asrama Internal	1 Layanan	10.077.766	
	56 Diklat Selama 27 s.d. 33 Hari Tidak Diasramakan	1 Layanan	5.614.500	
	57 Diklat Selama 27 s.d. 33 Hari Asrama Eksternal	1 Layanan	25.040.066	
	58 Diklat Kesamaptaan Asrama Internal	1 Layanan	13.371.100	
	59 Diklat Kesamaptaan Asrama Eksternal	1 Layanan	28.258.400	
	60 Diklat Orientasi Asrama Internal	1 Layanan	3.810.666	
	61 Diklat Orientasi Asrama eksternal	1 Layanan	6.214.400	
	<b>Layanan Kediklatan di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan</b>			
	62 Diklat Selama 3 s.d. 5 Hari Asrama Internal	1 Layanan	2.460.133	
	63 Diklat Selama 3 s.d. 5 Hari Tidak Diasramakan	1 Layanan	1.768.033	
	64 Diklat Selama 3 s.d. 5 Hari Asrama Eksternal	1 Layanan	5.219.500	
	65 Diklat Selama 6 s.d. 12 Hari Asrama Internal	1 Layanan	4.369.966	
	66 Diklat Selama 6 s.d. 12 Hari Tidak Diasramakan	1 Layanan	2.734.033	
	67 Diklat Selama 6 s.d. 12 Hari Asrama Eksternal	1 Layanan	10.180.066	
	68 Diklat Selama 13 s.d. 19 Hari Asrama Internal	1 Layanan	6.264.766	
	69 Diklat Selama 13 s.d. 19 Hari Tidak Diasramakan	1 Layanan	3.689.166	
	70 Diklat Selama 13 s.d. 19 Hari Asrama Eksternal	1 Layanan	15.125.600	
	71 Diklat Selama 20 s.d. 26 Hari Asrama Internal	1 Layanan	8.174.633	
	72 Diklat Selama 20 s.d. 26 Hari Tidak Diasramakan	1 Layanan	4.655.200	
	73 Diklat Selama 20 s.d. 26 Hari Asrama Eksternal	1 Layanan	20.086.200	
	74 Diklat Selama 27 s.d. 33 Hari Asrama Internal	1 Layanan	10.077.766	
	75 Diklat Selama 27 s.d. 33 Hari Tidak Diasramakan	1 Layanan	5.614.500	
	76 Diklat Selama 27 s.d. 33 Hari Asrama Eksternal	1 Layanan	25.040.066	
	77 Diklat Orientasi Asrama Internal	1 Layanan	3.810.666	
	78 Diklat Orientasi Asrama eksternal	1 Layanan	6.214.400	
	<b>Layanan Kediklatan di Bidang Keuangan Umum</b>			
	79 Diklat Selama 3 s.d. 5 Hari Asrama Internal	1 Layanan	2.460.133	
	80 Diklat Selama 3 s.d. 5 Hari Tidak Diasramakan	1 Layanan	1.768.033	
	81 Diklat di Daerah Selama 3 s.d. 5 Hari Asrama Eksternal	1 Layanan	5.219.500	
	82 Diklat di Daerah Selama 6 s.d. 12 Hari Asrama Internal	1 Layanan	4.369.966	
	83 Diklat di Daerah Selama 6 s.d. 12 Hari Tidak Diasramakan	1 Layanan	2.734.033	
	84 Diklat di Daerah Selama 6 s.d. 12 Hari Asrama Eksternal	1 Layanan	10.180.066	
	85 Diklat di Daerah Selama 13 s.d. 19 Hari Asrama Internal	1 Layanan	6.264.766	
	86 Diklat di Daerah Selama 13 s.d. 19 Hari Tidak Diasramakan	1 Layanan	3.689.166	

Agw



Kementerian Negara/Lembaga: Keuangan (015)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	87 Diklat di Daerah Selama 13 s.d. 19 Hari Asrama Eksternal	1 Layanan	15.125.600	
	88 Diklat di Daerah Selama 20 s.d. 26 Hari Asrama Internal	1 Layanan	8.174.633	
	89 Diklat di Daerah Selama 20 s.d. 26 Hari Tidak Diasramakan	1 Layanan	4.655.200	
	90 Diklat di Daerah Selama 20 s.d. 26 Hari Asrama Eksternal	1 Layanan	20.086.200	
	91 Diklat di Daerah Selama 27 s.d. 33 Hari Asrama Internal	1 Layanan	10.077.766	
	92 Diklat di Daerah Selama 27 s.d. 33 Hari Tidak Diasramakan	1 Layanan	5.614.500	
	93 Diklat di Daerah Selama 27 s.d. 33 Hari Asrama Eksternal	1 Layanan	25.040.066	
	94 Diklat Orientasi Asrama Internal	1 Layanan	3.810.666	
	95 Diklat Orientasi Asrama eksternal	1 Layanan	6.214.400	
	<b>Layanan Kediklatan di Bidang Perpajakan</b>			
	96 Diklat Selama 3 s.d. 5 Hari Asrama Internal	1 Layanan	2.460.133	
	97 Diklat Selama 3 s.d. 5 Hari Tidak Diasramakan	1 Layanan	1.768.033	
	98 Diklat Selama 3 s.d. 5 Hari Asrama Eksternal	1 Layanan	5.219.500	
	99 Diklat Selama 6 s.d. 12 Hari Asrama Internal	1 Layanan	4.369.966	
	100 Diklat Selama 6 s.d. 12 Hari Tidak Diasramakan	1 Layanan	2.734.033	
	101 Diklat Selama 6 s.d. 12 Hari Asrama Eksternal	1 Layanan	10.180.066	
	102 Diklat Selama 13 s.d. 19 Hari Asrama Internal	1 Layanan	6.264.766	
	103 Diklat Selama 13 s.d. 19 Hari Tidak Diasramakan	1 Layanan	3.689.166	
	104 Diklat Selama 13 s.d. 19 Hari Asrama Eksternal	1 Layanan	15.125.600	
	105 Diklat Selama 20 s.d. 26 Hari Asrama Internal	1 Layanan	8.174.633	
	106 Diklat Selama 20 s.d. 26 Hari Tidak Diasramakan	1 Layanan	4.655.200	
	107 Diklat Selama 20 s.d. 26 Hari Asrama Eksternal	1 Layanan	20.086.200	
	108 Diklat Selama 27 s.d. 33 Hari Asrama Internal	1 Layanan	10.077.766	
	109 Diklat Selama 27 s.d. 33 Hari Tidak Diasramakan	1 Layanan	5.614.500	
	110 Diklat Selama 27 s.d. 33 Hari Asrama Eksternal	1 Layanan	25.040.066	
	111 Diklat Orientasi Asrama Eksternal	1 Layanan	6.214.400	
	<b>Layanan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pasca Sarjana</b>			
	112 Diklat Selama 3 s.d. 5 Hari Asrama Internal	1 Layanan	2.460.133	
	113 Diklat Selama 3 s.d. 5 Hari Tidak Diasramakan	1 Layanan	1.768.033	
	114 Diklat Selama 3 s.d. 5 Hari Asrama Eksternal	1 Layanan	5.219.500	
	115 Diklat Ujian Dinas	1 Layanan	464.989	
	116 Diklat Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat	1 Layanan	393.744	
	117 Diklat Bidang Pengembangan SDM Persiapan ke Luar Negeri	1 Layanan	62.220.050	
	118 Diklat Selama 6 s.d. 12 Hari Asrama Internal	1 Layanan	4.369.966	
	119 Diklat Selama 6 s.d. 12 Hari Tidak Diasramakan	1 Layanan	2.734.033	
	120 Diklat Selama 6 s.d. 12 Hari Asrama Eksternal	1 Layanan	10.180.066	
	121 Diklat Selama 13 s.d. 19 Hari Asrama Internal	1 Layanan	6.264.766	
	122 Diklat Selama 13 s.d. 19 Hari Tidak Diasramakan	1 Layanan	3.689.166	
	123 Diklat Selama 13 s.d. 19 Hari Asrama Eksternal	1 Layanan	15.125.600	
	124 Diklat Selama 20 s.d. 26 Hari Asrama Internal	1 Layanan	8.174.633	
	125 Diklat Selama 20 s.d. 26 Hari Tidak Diasramakan	1 Layanan	4.655.200	
	126 Diklat Selama 20 s.d. 26 Hari Asrama Eksternal	1 Layanan	20.086.200	

AKW

8

Kementerian Negara/Lembaga: Keuangan (015)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	127 Diklat Selama 27 s.d. 33 Hari Asrama Internal	1 Layanan	10.077.766	
	128 Diklat Selama 27 s.d. 33 Hari Tidak Diasramakan	1 Layanan	5.614.500	
	129 Diklat Selama 27 s.d. 33 Hari Asrama Eksternal	1 Layanan	25.040.066	
	<b>Layanan Pendidikan Program Diploma Keuangan</b>			
	130 Program Diploma I Kepabeanaan dan Cukai	1 Layanan	8.885.096	
	131 Program Diploma I Pajak	1 Layanan	9.703.406	
	132 Program Diploma I Kebendaharaan Negara	1 Layanan	11.392.236	
	133 Program Diploma III Akuntansi	1 Layanan	8.174.611	
	134 Program Diploma III Kepabeanaan dan Cukai	1 Layanan	9.741.978	
	135 Program Diploma III Pajak	1 Layanan	8.371.238	
	136 Program Diploma III Pajak Bumi dan Bangunan/Penilai	1 Layanan	11.904.762	
	137 Program Diploma III Manajemen Aset	1 Layanan	11.881.276	
	138 Program Diploma III Kebendaharaan Negara	1 Layanan	10.400.912	
	139 Program Diploma IV Akuntansi Tugas Belajar	1 Layanan	8.099.883	
	140 Program Diploma IV Akuntansi Reguler	1 Layanan	8.368.246	
	141 Layanan Ujian Saringan Masuk Pendidikan Program Diploma Tugas Belajar	1 Layanan	318.167	
	<b>Layanan BLU</b>			
	142 Layanan Ujian Saringan Masuk Pendidikan Program Diploma Reguler	1 Layanan	305.750	
	<b>Laporan Penelitian dan Pengembangan</b>			
	143 Kajian Akademis BPPK	1 Layanan	124.720.000	
	144 Jurnal BPPK	1 Layanan	113.604.000	
	145 <i>Knowledge Capture</i> Bidang Keuangan Negara	1 Layanan	11.535.000	

ASW





Kementerian Negara/Lembaga: Pertanian (018)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
018.01	<b>Sekretariat Jenderal</b>			
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Layanan Hukum</b>			
	1 Peraturan Perundang-Undangan yang Diterbitkan Berdasarkan Prolegnas dan Prolegtan	1 Layanan	8.061.570.000	
	2 Naskah Perjanjian Bidang Pertanian yang Dihasilkan	1 Layanan	801.950.000	
	3 Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	1 Layanan	1.315.660.000	
	<b>Layanan Manajemen Keuangan</b>			
	4 Ketepatan Pengelolaan Belanja Pegawai	1 Layanan	1.352.920.000	
	<b>Layanan Manajemen SDM</b>			
	5 Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1 Layanan	1.753.300.000	
	<b>Layanan Data dan Informasi</b>			
	6 Publikasi Statistik Pertanian	1 Layanan	181.236.000	
	7 Pembinaan Pejabat Fungsional Statistik dan Pranata Komputer	1 Layanan	337.260.000	
018.02	<b>Inspektorat Jenderal</b>			
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b>			
	1 Rekomendasi Hasil Audit pada Satker Lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	144 Rekomendasi	3.401.304.000	
	2 Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP Lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	144 Rekomendasi	2.767.266.000	
	3 Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian serta Reviu SAKIP Kementerian	11 Rekomendasi	210.810.000	
	4 Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L pada Satker Lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian serta Laporan Keuangan Kementerian	49 Rekomendasi	882.328.000	
	5 Rekomendasi Hasil Audit pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	130 Rekomendasi	3.375.804.000	
	6 Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	144 Rekomendasi	2.767.266.000	
	7 Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	6 Rekomendasi	69.000.000	
	8 Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	30 Rekomendasi	368.570.000	
	9 Rekomendasi Hasil Audit pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan	141 Rekomendasi	3.401.304.000	
	10 Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan	144 Rekomendasi	2.767.266.000	
	11 Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan	9 Rekomendasi	94.500.000	
	12 Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan	45 Rekomendasi	535.980.000	
	13 Rekomendasi Hasil Audit pada Satker Lingkup Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian	153 Rekomendasi	3.494.928.000	
	14 Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP Lingkup Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian	144 Rekomendasi	2.767.266.000	
	15 Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Lingkup Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian	9 Rekomendasi	76.500.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Pertanian (018)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	16 Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKA-K/L pada Satker Lingkup Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian	45 Rekomendasi	502.230.000	
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Rekomendasi Hasil Audit Tujuan Tertentu</b>			
	17 Audit Investigasi	21 Rekomendasi	680.350.000	
	18 Audit dengan Tujuan Tertentu	192 Rekomendasi	4.591.296.000	
018.03	<b>Direktorat Jenderal Tanaman Pangan</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Fasilitas Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI (Ha)</b>			
	1 Penerapan Penanganan DPI Melalui Pembuatan Biopori di Wilayah Remote	1 Hektar	4.157.500	
	2 Penerapan Penanganan DPI Melalui Pembuatan Biopori di Wilayah Non Remote	1 Hektar	3.780.000	
	3 Penerapan Penanganan DPI Melalui Pembuatan Sumur Pantek di Wilayah Remote	1 Hektar	5.837.000	
	4 Penerapan Penanganan DPI Melalui Pembuatan Sumur Pantek di Wilayah Non Remote	1 Hektar	4.753.500	
018.04	<b>Direktorat Jenderal Hortikultura</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>GAP Sayuran dan Tanaman Obat</b>			
	1 GAP Bawang Merah	1 Kelompok	35.937.000	
	2 GAP Cabai	1 Kelompok	35.937.000	
	3 GAP Sayuran dan Tanaman Obat	1 Kelompok	35.937.000	
	<b>Penerapan PHT (PPHT)</b>			
	4 Penerapan PHT Wilayah Barat	1 Kelompok	42.233.000	
	5 Penerapan PHT Wilayah Timur	1 Kelompok	47.767.000	
	<b>Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura</b>			
	6 Gerakan Pengendalian OPT Cabai (Wilayah Timur)	1 Kali	24.500.000	
	7 Gerakan Pengendalian OPT Cabai (Wilayah Barat)	1 Kali	20.500.000	
	8 Gerakan Pengendalian OPT Bawang Merah (Wilayah Barat)	1 Kali	20.496.000	
	9 Gerakan Pengendalian OPT Bawang Merah (Wilayah Timur)	1 Kali	24.503.000	
	10 Gerakan Pengendalian OPT Jeruk (Wilayah Barat)	1 Kali	21.125.000	
	11 Gerakan Pengendalian OPT Jeruk (Wilayah Timur)	1 Kali	23.785.000	
	<b>GAP Buah dan Florikultura</b>			
	12 GAP Buah	1 Kelompok	40.000.000	
	13 GAP Florikultura	1 Kelompok	38.000.000	
	<b>Sarana Prasarana Pasca Panen</b>			
	14 PIP di Wilayah Barat	1 Unit	21.600.000	
	15 PIP di Wilayah Timur	1 Unit	28.100.000	
	<b>GHP Hortikultura</b>			
	16 GHP Buah	1 Kelompok	40.000.000	
	17 GHP Sayuran	1 Kelompok	40.000.000	
018.05	<b>Direktorat Jenderal Perkebunan</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Sekolah Lapang Pengendali Hama Terpadu (SL-PHT) Tanaman Perkebunan</b>			
	1 BP-PHT Perkebunan Provinsi Jawa Barat	1 Kelompok Tani	74.170.000	
	2 BP-PHT Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	1 Kelompok Tani	76.020.000	
	3 BP-PHT Perkebunan Provinsi D.I Yogyakarta	1 Kelompok Tani	74.170.000	
	4 BP-PHT Perkebunan Provinsi Jawa Timur	1 Kelompok Tani	76.020.000	
	5 BP-PHT Perkebunan Provinsi Aceh	1 Kelompok Tani	84.170.000	
	6 BP-PHT Perkebunan Provinsi Sumatera Utara	1 Kelompok Tani	79.520.000	
	7 BP-PHT Perkebunan Provinsi Sumatera Barat	1 Kelompok Tani	79.520.000	
	8 BP-PHT Perkebunan Provinsi Riau	1 Kelompok Tani	81.520.000	
	9 BP-PHT Perkebunan Provinsi Jambi	1 Kelompok Tani	74.620.000	
	10 BP-PHT Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	1 Kelompok Tani	79.370.000	
	11 BP-PHT Perkebunan Provinsi Lampung	1 Kelompok Tani	76.620.000	
	12 BP-PHT Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat	1 Kelompok Tani	80.270.000	
	13 BP-PHT Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	1 Kelompok Tani	85.770.000	
	14 BP-PHT Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan	1 Kelompok Tani	78.870.000	
	15 BP-PHT Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	1 Kelompok Tani	89.270.000	
	16 BP-PHT Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara	1 Kelompok Tani	83.120.000	
	17 BP-PHT Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah	1 Kelompok Tani	85.770.000	
	18 BP-PHT Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	1 Kelompok Tani	80.770.000	

Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Pertanian (018)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	19 BP-PHT Perkebunan Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Kelompok Tani	80.770.000	
	20 BP-PHT Perkebunan Provinsi Maluku	1 Kelompok Tani	88.020.000	
	21 BP-PHT Perkebunan Provinsi Bali	1 Kelompok Tani	69.670.000	
	22 BP-PHT Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Kelompok Tani	76.240.000	
	23 BP-PHT Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 Kelompok Tani	92.745.000	
	24 BP-PHT Perkebunan Provinsi Papua	1 Kelompok Tani	116.320.000	
	25 BP-PHT Perkebunan Provinsi Bengkulu	1 Kelompok Tani	79.170.000	
	26 BP-PHT Perkebunan Provinsi Maluku Utara	1 Kelompok Tani	94.020.000	
	27 BP-PHT Perkebunan Provinsi Banten	1 Kelompok Tani	72.670.000	
	28 BP-PHT Perkebunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Kelompok Tani	83.120.000	
	29 BP-PHT Perkebunan Provinsi Gorontalo	1 Kelompok Tani	81.070.000	
	30 BP-PHT Perkebunan Provinsi Kepulauan Riau	1 Kelompok Tani	85.270.000	
	31 BP-PHT Perkebunan Provinsi Papua Barat	1 Kelompok Tani	112.520.000	
	32 BP-PHT Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat	1 Kelompok Tani	83.270.000	
	33 BP-PHT Perkebunan Provinsi Kalimantan Utara	1 Kelompok Tani	85.770.000	
<b>018.08</b>	<b>Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Irigasi Air Permukaan</b>			
	1 Kegiatan Perpompaaan Wilayah Tengah Mendukung Peternakan	1 Unit	165.000.000	
	2 Kegiatan Perpompaaan Wilayah Tengah Mendukung Perkebunan	1 Unit	128.000.000	
	3 Kegiatan Perpompaaan Wilayah Tengah Mendukung Hortikultura	1 Unit	105.000.000	
	4 Kegiatan Perpompaaan Wilayah Timur Mendukung Peternakan	1 Unit	140.000.000	
	5 Kegiatan Perpompaaan Wilayah Timur Mendukung Perkebunan	1 Unit	105.000.000	
	6 Kegiatan Perpompaaan Wilayah Timur Mendukung Hortikultura	1 Unit	85.000.000	
	7 Kegiatan Perpompaaan Wilayah Barat Mendukung Tanaman Pangan	1 Unit	127.000.000	
	8 Kegiatan Perpompaaan Wilayah Barat Mendukung Hortikultura	1 Unit	95.000.000	
	9 Kegiatan Perpompaaan Wilayah Barat Mendukung Perkebunan	1 Unit	76.000.000	
<b>018.09</b>	<b>Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian</b>			
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Rumusan Kebijakan Pengembangan Mektan</b>			
	1 Bahan Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi	250.000.000	
	<b>Mikroba Veteriner Terkonservasi dan Terkarakterisasi</b>			
	2 <i>Mikroba Veteriner</i> Terkonservasi dan Terkarakterisasi	100 Jenis	221.808.000	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Komponen Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan (Tanah, Air, dan Lingkungan Pertanian)</b>			
	3 Komponen Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan (Tanah, Air, dan Lingkungan Pertanian)	1 Teknologi	67.789.000	
	<b>Benih Sumber Kentang</b>			
	4 Benih Sumber Kentang ( <i>Umbi/ Knol</i> )	1 GO	3.585	
	5 Benih Sumber Kentang ( <i>Planlet</i> )	1 GO	3.660	
	<b>Benih Sumber Bawang Merah</b>			
	6 Benih Sumber Bawang Merah (TSS)	1 Kilogram	3.614.750	
	7 Benih Bawang Merah ( <i>Umbi</i> )	1 Kilogram	24.084	
	<b>Benih Sumber Cabai</b>			
	8 Benih Sumber Cabai <i>Hibrida</i>	1 Kilogram	13.048.300	
	9 Benih Sumber Cabai OP	1 Kilogram	9.403.600	
	<b>VUB Bibit Tebu</b>			
	10 VUB Bibit Tebu	1 Butset	335	
	<b>Bibit Sumber Ternak Unggulan</b>			
	11 Bibit Unggul Ternak Ayam KUB-1 (DOC)	1 Ekor	4.886	
	12 Bibit Unggul Ternak Itik Petelur (DOD)	1 Ekor	6.252	
	13 Bibit Unggul Ternak Domba <i>Compass Agrinak</i>	1 Ekor	1.251.248	
	<b>Benih Sumber Tanaman Padi</b>			
	14 Produksi Benih Penjenis Padi (BS)	1 Ton	31.120.000	
	15 Produksi Benih Dasar Padi (FS)	1 Ton	20.850.000	
	16 Produksi Benih Pokok Padi (SS)	1 Ton	14.854.000	
	<b>Benih Sumber Tanaman Jagung</b>			
	17 Produksi Benih Penjenis Jagung (BS)	1 Ton	45.013.000	

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Pertanian (018)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	18 Produksi Benih Dasar Jagung (FS)	1 Ton	22.524.500	
	19 Produksi Benih Pokok Jagung (SS)	1 Ton	19.901.500	
	<b>Benih Sumber Tanaman Kedelai</b>			
	20 Produksi Benih Penjenis Kedelai (BS)	1 Ton	27.547.000	
	21 Produksi Benih Dasar Kedelai (FS)	1 Ton	22.916.000	
	22 Produksi Benih Pokok Kedelai (SS)	1 Ton	18.195.000	
	<b>Perjanjian Kerjasama Lisensi Hasil Balitbangtan</b>			
	23 Perjanjian Kerjasama Lisensi Hasil Balitbangtan	1 Lisensi	85.000.000	
018.11	<b>Badan Ketahanan Pangan</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Penanganan Kerawanan Pangan</b>			
	1 Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Lokasi	50.000.000	
018.12	<b>Badan Karantina Pertanian</b>			
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Layanan Pendidikan dan Pelatihan</b>			
	1 Penguatan SDM Dasar Teknis Calon POPT Terampil	1 Layanan	3.167.000.000	
	2 Penguatan SDM Dasar Teknis Calon Paramedik <i>Veteriner</i>	1 Layanan	3.166.415.000	
	<b>Rekomendasi Teknik dan Metoda Tindakan Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati</b>			
	3 Koleksi Standar HPH/HPHK	1 Dokumen	26.595.000	
	4 Koleksi Standar OPTK	1 Dokumen	26.595.000	
	<b>Pengembangan Teknik dan Metoda Uji Terap Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati</b>			
	5 Uji Terap Teknik dan Metode Pemusnahan pada Hewan	1 Uji Terap	134.335.000	
	6 Uji Terap Perlakuan Disinfeksi Telur dari Cemaran Bakteri <i>Salmonella</i>	1 Uji Terap	134.335.000	
	7 Uji Terap Perlakuan HWT dan <i>Nematisida</i> untuk Membebaskan <i>Nematoda</i> pada Tanaman <i>Polyceas Sp</i>	1 Uji Terap	134.335.000	
	8 Uji Terap Perlakuan Phospin Cair pada Kacang Tanah untuk Meng-eradikasi <i>Chorydon Serratus</i>	1 Uji Terap	134.335.000	
	9 Uji Terap Perlakuan <i>Fumigasi SF</i> sebagai Alternatif Perlakuan terhadap <i>Aphelechorida Beseiy</i> pada Benih Padi	1 Uji Terap	134.335.000	
	10 Uji Terap Perlakuan Karantina Tumbuhan pada Benih Melon untuk <i>Eradikasi Acidovorax Citrulli</i> terhadap Daya Simpan Benih Melon	1 Uji Terap	134.335.000	
	11 Uji Terap Perlakuan <i>Nitrogen</i> terhadap <i>Psocoides</i> pada Kulit Manggis	1 Uji Terap	134.335.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Energi dan Sumber Daya Mineral (020)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
020.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Pengabdian Masyarakat Dalam Rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi</b>			
	1 Iptek bagi Masyarakat	1 Laporan	56.321.333	
	2 Iptek bagi Kewirausahaan	1 Laporan	69.880.285	
	<b>Lulusan Mahasiswa STEM Akamigas</b>			
	3 Pendidikan dan Pembelajaran di STEM Akamigas	1 Orang	57.208.492	
	<b>Penelitian yang Dilaksanakan</b>			
	4 Penelitian Dosen Pemula	1 Judul	15.372.000	
	5 Penelitian Fundamental	1 Judul	74.236.000	
	6 Penelitian Unggulan	1 Judul	105.123.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kesehatan (024)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
024.05	<b>Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB</b>			
	1 Layanan Kesehatan pada Situasi Khusus	1 Layanan	2.035.000	
	2 Layanan Informasi Kewaspadaan Dini Berbasis Laboratorium (BTKL)	1 Layanan	17.000.000	
	<b>Layanan Kekarantinaan Kesehatan</b>			
	3 Layanan Pemeriksaan P3K Kapal	1 Layanan	155.000	
	4 Layanan Kesehatan Rujukan	1 Layanan	650.000	
	5 Layanan Kekarantinaan Kesehatan Dalam Rangka Penerbitan COP ( <i>Certificate Of Pretique</i> )	1 Layanan	550.000	
	6 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan Penyeberangan	1 Layanan	546.000	
	7 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara	1 Layanan	546.000	
	8 Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan PHQC ( <i>Port Health Quarantine Clearance</i> )	1 Layanan	364.000	
	9 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN)	1 Layanan	364.000	
	10 Layanan Pemeriksaan Kesehatan Alat Angkut dalam Rangka Penerbitan SSCC/SSCEC ( <i>Ship Sanitation Control Certificate/Ship Sanitation Control Exemption Certificate</i> )	1 Layanan	470.000	
	11 Layanan Pengawasan Tindakan Penyehatan Alat Angkut	1 Layanan	182.000	
	<b>Layanan Pengendalian Penyakit Malaria</b>			
	12 IRS/Indoor Residual Spraying (Penyemprotan Insektisida pada Dinding Rumah)	1 Layanan	30.000.000	
	13 Sediaan Darah Mikroskop Malaria yang Diuji Silang (% Sensitivitas, Spesifitas, Akurasi Spesies)	1 Layanan	10.000	
	14 Survei Darah Massal Malaria ( <i>Angka Parasite Rate</i> )	1 Layanan	8.750.000	
	15 IRS/Indoor Residual Spraying (Penyemprotan Insektisida pada Dinding Rumah) di Daerah Sulit	1 Layanan	40.200.000	
	16 Survei Daerah Massal Malaria ( <i>Angka Parasite Rate</i> ) di Daerah Sulit	1 Layanan	13.850.000	
	<b>Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit</b>			
	17 Layanan Pengendalian Vektor DBD	1 Layanan	1.007.000	
	18 Layanan Pengendalian Vektor Pes	1 Layanan	2.069.000	
	19 Layanan Pengendalian Vektor Diare	1 Layanan	498.000	
	20 Layanan Pengendalian Vektor Malaria	1 Layanan	2.564.000	
	<b>Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS</b>			
	21 Layanan Tes HIV dan IMS di KKP	1 Layanan	269.000	
	<b>Layanan Pengendalian Penyakit TB</b>			
	22 Layanan Deteksi Dini Terduga TB Wilayah Kerja KKP	1 Layanan	4.335.000	

Abw





Kementerian Negara/Lembaga: Agama (025)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
025.02	<b>Inspektorat Jenderal</b> <b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>  <b>Layanan Audit Internal</b> 1 Audit Investigasi Wilayah DKI Jakarta 2 Audit Investigasi Wilayah Luar DKI Jakarta (Dalam Pulau Jawa) 3 Audit Investigasi Wilayah Luar DKI Jakarta (Luar Pulau Jawa)	1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan	26.925.000 114.379.000 143.339.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Sosial (027)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
027.04	<b>Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Korban Penyalahgunaan Napza yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial</b>			
	1 Korban Penyalahgunaan Napza yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di Panti Sosial Pamardi Putra Insvaf Medan	1 Orang	18.000.000	
	2 Korban Penyalahgunaan Napza yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di Panti Sosial Galih Pakuan Bogor	1 Orang	16.031.518	
	3 Korban Penyalahgunaan Napza yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di Panti Sosial Rehabilitasi Sosial KPN Satria Baturaden	1 Orang	21.540.966	
	<b>Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Sensorik dan Intelektual yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial</b>			
	4 Penyandang disabilitas Fisik yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa Cibinong	1 Orang	24.436.505	
	5 Penyandang disabilitas Fisik yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof Dr Soeharso Surakarta	1 Orang	18.946.412	
	6 Penyandang disabilitas Fisik yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang	1 Orang	21.068.270	
	7 Penyandang disabilitas Fisik yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar	1 Orang	16.257.591	
	8 Penyandang disabilitas Mental yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Bina Laras Phala Martha Sukabumi	1 Orang	16.173.072	
	9 Penyandang disabilitas Mental yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Bina Laras Budi Luhur Banjarbaru	1 Orang	17.909.857	
	10 Penyandang disabilitas Mental yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Bina Laras Dharma Guna Bengkulu	1 Orang	15.703.125	
	11 Penyandang disabilitas Mental yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang disabilitas Mental Margo Laras di Pati	1 Orang	16.740.000	
	12 Penyandang disabilitas Sensorik yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna Bandung	1 Orang	15.547.280	
	13 Penyandang disabilitas Sensorik yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Bina Netra Mahatmiva Tabanan	1 Orang	16.645.000	
	14 Penyandang disabilitas Sensorik yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Bina Netra Tu Mou Tou Manado	1 Orang	17.069.240	
	15 Penyandang disabilitas Sensorik yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Bina Netra Tan Miyat Bekasi	1 Orang	16.377.352	
	16 Penyandang disabilitas Sensorik yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Bina Rungu Wicara Melati Jakarta	1 Orang	20.781.125	

AGW



Kementerian Negara/Lembaga: Sosial (027)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	17 Penyandang disabilitas Sensorik yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Bina Rungu Wicara Efata Kupang	1 Orang	23.436.400	
	18 Penyandang disabilitas Sensorik yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan di Panti Sosial Bina Rungu Wicara Meohai Kendari	1 Orang	21.157.142	
	19 Penyandang disabilitas Intelektual yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Kartini Temanggung	1 Orang	15.377.146	
	20 Penyandang disabilitas Intelektual yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Bina Grahita Ciung Wanara Bogor	1 Orang	16.688.000	
	21 Penyandang disabilitas Intelektual yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu	1 Orang	20.408.542	
	<b>Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial</b>			
	22 Wanita Tuna Susila yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di Panti Sosial Karya Wanita Mulya Jaya Jakarta	1 Orang	14.916.387	
	23 Gelandangan dan Pengemis yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur Bekasi	1 Orang	8.279.770	
	24 Orang Dengan Hiv yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Wasana Bahagia di Ternate	1 Orang	26.778.375	
	25 Orang Dengan Hiv yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Bahagia di Medan	1 Orang	22.525.525	
	26 Orang Dengan Hiv yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Kahuripan di Sukabumi	1 Orang	24.039.571	
	<b>Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar/Anak Jalanan, Anak Berhadapan Hukum dan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial</b>			
	27 Anak yang Berhadapan Dengan Hukum yang Memperoleh Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta	1 Orang	16.269.233	
	28 Anak yang Berhadapan Dengan Hukum yang Memperoleh Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang	1 Orang	16.178.571	
	29 Anak yang Berhadapan Dengan Hukum yang Memperoleh Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Di Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram	1 Orang	14.000.000	
	30 Anak yang Berhadapan Dengan Hukum yang Memperoleh Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Di Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar	1 Orang	16.992.187	
	31 Anak Remaja yang Memperoleh Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Potensi Diri Di Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Pekanbaru	1 Orang	10.707.642	
	32 Anak Remaja yang Memperoleh Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Potensi Diri Di Panti Sosial Bina Remaja Bambu Apus Jakarta	1 Orang	9.428.931	
	33 Anak Remaja yang Memperoleh Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Potensi Diri Di Panti Sosial Bina Remaja Nai Bonat Kupang	1 Orang	11.776.833	
	34 Anak Terlantar atau Tanpa Asuhan Orang Tua yang Memperoleh Pelayanan Kesejahteraan Sosial Di Panti Sosial Asuhan Anak Alyatama Jambi	1 Orang	14.731.000	
	35 Anak Terlantar atau Tanpa Asuhan Orang Tua yang Memperoleh Pelayanan Kesejahteraan Sosial Di Panti Sosial Asuhan Anak Darussaadah Aceh	1 Orang	14.937.900	
	<b>Lanjut Usia yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial</b>			
	36 Lanjut Usia yang Memperoleh Pelayanan Sosial di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Gowa	1 Orang	17.854.873	
	37 Lanjut Usia yang Memperoleh Pelayanan Sosial di Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma Bekasi	1 Orang	17.065.609	
	38 Lanjut Usia yang Memperoleh Pelayanan Sosial di Panti Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari	1 Orang	19.440.694	
027.11	<b>Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial SBK Indeks Biaya Keluaran yang disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) SDM yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial</b>			
	1 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Padang (60 JPL/7 Hari)	1 Orang	7.178.266	

Kementerian Negara/Lembaga: Sosial (027)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	2 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Padang (80 JPL/10 Hari)	1 Orang	8.799.800	
	3 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Padang (100 JPL/ 12 Hari)	1 Orang	10.059.600	
	4 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Padang (165 JPL/20 Hari)	1 Orang	16.152.966	
	5 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Padang (210 JPL/25 Hari)	1 Orang	17.597.133	
	6 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Bandung (165 JPL/20 Hari)	1 Orang	16.177.266	
	7 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Penjurangan Jfps Tk.Ahli Muda (150 JPL/17 Hari)	1 Orang	11.827.500	
	8 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Penjurangan Jfps Tk. Ahli Madya (130 JPL/ 15 Hari)	1 Orang	10.957.500	
	9 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Tk.Ahli (160 JPL/18 Hari)	1 Orang	11.213.000	
	10 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Penjurangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Pelaksana Lanjutan (120	1 Orang	10.598.100	
	11 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Rehabilitasi Sosial di BBPPKS Bandung (210 JPL/25 Hari)	1 Orang	17.132.366	
	12 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Bandung (120 JPL/ 14 Hari)	1 Orang	10.439.566	
	13 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Bandung (40 JPL/5 Hari)	1 Orang	5.487.833	
	14 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Bandung (80 JPL/ 10 Hari)	1 Orang	8.519.566	
	15 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Bandung (100 JPL/12 Hari)	1 Orang	9.461.233	
	16 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Yogyakarta (210 JPL/25 Hari)	1 Orang	16.938.100	
	17 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Yogyakarta (120 JPL/ 14 Hari)	1 Orang	10.289.900	
	18 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Yogyakarta (165 JPL/20 Hari)	1 Orang	14.401.533	
	19 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Yogyakarta (100 JPL/12 Hari)	1 Orang	9.105.900	
	20 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Yogyakarta (80 JPL/ 10 Hari)	1 Orang	8.322.166	
	21 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Yogyakarta (60 JPL/7 Hari)	1 Orang	6.267.566	
	22 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Yogyakarta (40 JPL/5 Hari)	1 Orang	5.443.833	
	23 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Banjarmasin (210 JPL/25 Hari)	1 Orang	16.166.700	
	24 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Banjarmasin (165 JPL/20 Hari)	1 Orang	14.789.166	
	25 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Banjarmasin (100 JPL/12 Hari)	1 Orang	9.787.633	
	26 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Banjarmasin (80 JPL/10 Hari)	1 Orang	8.854.366	
	27 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Banjarmasin (60 JPL/7 Hari)	1 Orang	7.342.133	
	28 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Kessos di BBPPKS Makassar (210 JPL/25 Hari)	1 Orang	17.278.966	

Agw



Kementerian Negara/Lembaga: Sosial (027)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
29	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Kessos di BBPPKS Makassar (165 JPL/20 Hari)	1 Orang	16.717.400	
30	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Kessos di BBPPKS Makassar (120 JPL/15 Hari)	1 Orang	12.849.600	
31	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Kessos di BBPPKS Makassar (100 JPL/12 Hari)	1 Orang	11.546.666	
32	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Kessos di BBPPKS Makassar (80 JPL/10 Hari)	1 Orang	10.616.933	
33	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Kessos di BBPPKS Makassar (60 JPL/7 Hari)	1 Orang	9.576.466	
34	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Kessos di BBPPKS Makassar (40 JPL/5 Hari)	1 Orang	8.452.600	
35	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Jayapura (210 JPL/25 Hari)	1 Orang	29.419.366	
36	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Jayapura (165 JPL/20 Hari)	1 Orang	23.626.266	
37	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Jayapura (120 JPL/14 Hari)	1 Orang	17.906.633	
38	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Jayapura (100 JPL/12 Hari)	1 Orang	16.665.366	
39	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Jayapura (80 JPL/10 Hari)	1 Orang	15.545.100	
40	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Jayapura (60 JPL/7 Hari)	1 Orang	12.597.833	
41	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diklat Teknis di BBPPKS Jayapura (40 JPL/5 Hari)	1 Orang	11.022.500	
	<b>Layanan Pendidikan dan Pelatihan</b>			
42	TOT Manajemen Pembangunan Kesejahteraan Sosial	1 Layanan	553.198.000	
43	TOT Pelatihan Dasar Pekerjaan Sosial	1 Layanan	550.198.000	
44	Analisis Kebutuhan Diklat	1 Layanan	347.397.000	
45	TOT Manajemen Lembaga Kesejahteraan Sosial	1 Layanan	559.037.000	
46	TOT FDS PKH	1 Layanan	704.951.000	
47	TOT FDS <i>E-Learning</i>	1 Layanan	704.951.000	
48	TOT Pendamping PKH	1 Layanan	552.698.000	
49	Diklat Operator PKH	1 Layanan	284.264.000	
	<b>SDM Kesejahteraan Sosial yang Telah Dikembangkan Profesinya</b>			
50	Peksos dan TKS yang Telah Mendapatkan Sertifikasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Telah Mendapatkan Akreditasi	1 Orang	2.764.812	
51	Lembaga Dibidang Kesejahteraan Sosial yang Telah Terakreditasi	1 Lembaga	2.960.160	
	<b>Mahasiswa Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial</b>			
52	Mahasiswa Program D.IV Pekerjaan Sosial	1 Mahasiswa	5.586.806	
53	Mahasiswa Program Pascasarjana Sp 1 Pekerjaan Sosial	1 Mahasiswa	13.927.600	
	<b>Lokasi yang Mendapatkan Layanan Penyuluhan Sosial</b>			
54	Penyusunan Buku Pedoman Penyuluhan Sosial	1 Lokasi	421.880.000	
55	Penyuluhan Sosial Keliling Penyelenggaraan Program Kessos ( <i>Car Free Day</i> )	1 Lokasi	23.081.500	



Kementerian Negara/Lembaga: Kelautan dan Perikanan (032)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
032.02	<b>Inspektorat Jenderal</b>			
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I</b>			
	1 Pengawasan Program Prioritas Mitra Inspektorat I	1 Laporan	2.862.964.000	
	2 Pengawasan Kegiatan Pengembangan SKPT Lingkup Mitra Inspektorat I	1 Laporan	686.780.000	
	<b>Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II</b>			
	3 Pengawasan Kegiatan Prioritas Mitra Inspektorat II	1 Laporan	3.053.496.000	
	4 Pengawasan Kegiatan Pengembangan SKPT Lingkup Mitra Inspektorat II	1 Laporan	1.003.510.000	
	<b>Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat III</b>			
	5 Pengawasan Kegiatan Prioritas Mitra Inspektorat III	1 Laporan	3.089.888.000	
	6 Pengawasan Kegiatan Pengembangan SKPT Lingkup Mitra Inspektorat III	1 Laporan	681.410.000	
	<b>Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat IV</b>			
	7 Pengawasan Kegiatan Prioritas Mitra Inspektorat IV	1 Laporan	3.141.888.000	
	8 Pengawasan Kegiatan Pengembangan SKPT Lingkup Mitra Inspektorat IV	1 Laporan	539.784.000	
	<b>Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat V dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Lingkup KKP</b>			
	9 Audit Investigasi Lingkup KKP	1 Laporan	1.454.660.000	
032.04	<b>Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Benih Bermutu Ikan Air Tawar yang Dihasilkan UPT dan UPTD Provinsi yang Didistribusikan ke Masyarakat</b>			
	1 Benih Ikan Nila	1 Ekor	509	
	2 Benih Ikan Mas	1 Ekor	594	
	3 Benih Ikan Lele	1 Ekor	680	
	4 Benih Ikan Gurame	1 Ekor	3.783	
	5 Benih Ikan Patin	1 Ekor	872	
	<b>Benih Bermutu Ikan Air Payau yang Dihasilkan UPT dan UPTD Provinsi yang Didistribusikan ke Masyarakat</b>			
	6 Benih Udang Merguensis (Putih)	1 Ekor	278	
	7 Benih Udang Windu	1 Ekor	81	
	8 Benih Vanamei	1 Ekor	78	
	9 Benih Ikan Bandeng	1 Ekor	86	
	10 Benih Ikan Nila	1 Ekor	150	
	11 Benih Kepiting	1 Ekor	1.064	
	<b>Benih Bermutu Ikan Air Laut yang Dihasilkan UPT dan UPTD Provinsi yang Didistribusikan ke Masyarakat</b>			
	12 Benih Ikan Kerapu	1 Ekor	11.880	
	13 Benih Ikan Bawal Bintang	1 Ekor	4.895	
	14 Benih Ikan Kakap Putih	1 Ekor	4.808	

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Kelautan dan Perikanan (032)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
032.05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b>			
	1 Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Kompeten	60 Orang	800.000.000	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat</b>			
	2 Operasional Speed Boat 6 M	1 Hari Operasi	1.662.000	
	3 Operasional Speed Boat 8 M	1 Hari Operasi	3.048.000	
	4 Operasional Speed Boat 12 M	1 Hari Operasi	6.110.000	
	5 Operasional Rigid Inflatable Boat	1 Hari Operasi	5.156.000	
	6 Operasional Rubber Boat	1 Hari Operasi	1.582.000	

AGW



Kementerian Negara/Lembaga: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (033)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
033.13	<b>Direktorat Jenderal Bina Konstruksi</b> <b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b> <b>Kerjasama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi</b>			
	1 Pelatihan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Banda Aceh	1 Angkatan	116.296.000	
	2 Pelatihan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Palembang	1 Angkatan	114.720.000	
	3 Pelatihan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Jakarta	1 Angkatan	118.524.000	
	4 Pelatihan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Surabaya	1 Angkatan	117.020.000	
	5 Pelatihan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Banjarmasin	1 Angkatan	114.108.000	
	6 Pelatihan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Makassar	1 Angkatan	118.504.000	
	7 Pelatihan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Jayapura	1 Angkatan	125.368.000	
	8 Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Banda Aceh	1 Angkatan	43.766.000	
	9 Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Palembang	1 Angkatan	43.420.000	
	10 Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Jakarta	1 Angkatan	44.854.000	
	11 Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Surabaya	1 Angkatan	44.100.000	
	12 Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Banjarmasin	1 Angkatan	43.258.000	
	13 Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Makassar	1 Angkatan	44.564.000	
	14 Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Jayapura	1 Angkatan	46.808.000	
033.15	<b>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b> <b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b> <b>Layanan Pelatihan</b>			
	1 Pendidikan dan Pelatihan ke-PUPR-an di Medan (6 Hari di Dalam Kampus)	1 Orang	5.986.300	
	2 Pendidikan dan Pelatihan Ke-PUPR-an di Medan (12 Hari di Dalam Kampus)	1 Orang	8.797.833	
	3 Pendidikan dan Pelatihan Ke-PUPR-an di Palembang (6 Hari di Dalam Kampus)	1 Orang	5.672.100	
	4 Pendidikan dan Pelatihan Ke-PUPR-an di Palembang (12 Hari di Dalam Kampus)	1 Orang	8.295.033	
	5 Pendidikan dan Pelatihan Ke-PUPR-an di Jakarta (6 Hari di Dalam Kampus)	1 Orang	4.543.233	
	6 Pendidikan dan Pelatihan Ke-PUPR-an di Jakarta (12 Hari di Dalam Kampus)	1 Orang	6.551.566	
	7 Pendidikan dan Pelatihan Ke-PUPR-an di Bandung (6 Hari di Dalam Kampus)	1 Orang	5.355.000	
	8 Pendidikan dan Pelatihan Ke-PUPR-an di Bandung (12 Hari di Dalam Kampus)	1 Orang	7.835.466	
	9 Pendidikan dan Pelatihan Ke-PUPR-an di Yogyakarta (6 Hari di Dalam Kampus)	1 Orang	5.371.833	
	10 Pendidikan dan Pelatihan Ke-PUPR-an di Yogyakarta (12 Hari di Dalam Kampus)	1 Orang	7.743.833	
	11 Pendidikan dan Pelatihan Ke-PUPR-an di Surabaya (6 Hari di Dalam Kampus)	1 Orang	5.664.633	
	12 Pendidikan dan Pelatihan Ke-PUPR-an di Surabaya (12 Hari di Dalam Kampus)	1 Orang	8.331.300	
	13 Pendidikan dan Pelatihan Ke-PUPR-an di Banjarmasin (6 Hari di Dalam Kampus)	1 Orang	5.852.066	
	14 Pendidikan dan Pelatihan Ke-PUPR-an di Banjarmasin (12 Hari di Dalam Kampus)	1 Orang	8.535.333	
	15 Pendidikan dan Pelatihan Ke-PUPR-an di Makassar (6 Hari di Dalam Kampus)	1 Orang	6.084.200	
	16 Pendidikan dan Pelatihan Ke-PUPR-an di Makassar (12 Hari di Dalam Kampus)	1 Orang	8.985.666	
	17 Pendidikan dan Pelatihan Ke-PUPR-an di Jayapura (6 Hari di Dalam Kampus)	1 Orang	8.503.066	
	18 Pendidikan dan Pelatihan Ke-PUPR-an di Jayapura (12 Hari di Dalam Kampus)	1 Orang	12.638.800	

Agw



Kementerian Negara/Lembaga: Agraria dan Tata Ruang/BPN (056)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
056.01	<b>Sekretariat Jenderal</b> <b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran</b> <b>(Sub Output)</b> <b>Sertipikat Hak Atas Tanah</b>			
	1 Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori I	1 Bidang	263.400	Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara
	2 Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori II	1 Bidang	229.800	Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Kepri, Bangka Belitung
	3 Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori III	1 Bidang	197.160	Sulbar, Sulsel, Kaltim, Kalbar, Aceh, Sumut, Sumbar, Kalteng, Gorontalo
	4 Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori IV	1 Bidang	161.640	Kalsel, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung
	5 Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori V	1 Bidang	127.080	Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, Jawa Timur, Bali
	6 Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori VI	1 Bidang	355.476	Wilayah Kepulauan
	7 Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori VII	1 Bidang	553.276	Daerah Terpencil/Terluar
	8 Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional untuk Kategori I luas 1 s/d 25.000 M <sup>2</sup>	1 Bidang	1.582.000	Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara
	9 Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional untuk Kategori II luas 1 s/d 25.000 M <sup>2</sup>	1 Bidang	1.327.000	Sulteng, Sultra, Sulut, NTB, Kepri, Bangka Belitung
	10 Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional untuk Kategori III luas 1 s/d 25.000 M <sup>2</sup>	1 Bidang	1.072.000	Sulbar, Sulsel, Kaltim, Kalbar, Aceh, Sumut, Sumbar, Kalteng, Gorontalo
	11 Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional untuk Kategori IV luas 1 s/d 25.000 M <sup>2</sup>	1 Bidang	802.000	Kalsel, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung
	12 Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional untuk Kategori V luas 1 s/d 25.000 M <sup>2</sup>	1 Bidang	532.000	Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali
	13 Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional untuk Kategori I luas 25.001 s/d 100.000 M <sup>2</sup>	1 Bidang	3.277.000	Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara
	14 Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional untuk Kategori II luas 25.001 s/d 100.000 M <sup>2</sup>	1 Bidang	2.733.000	Sulteng, Sultra, Sulut, NTB, Kepri, Bangka Belitung
	15 Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional untuk Kategori III luas 25.001 s/d 100.000 M <sup>2</sup>	1 Bidang	2.169.000	Sulbar, Sulsel, Kaltim, Kalbar, Aceh, Sumut, Sumbar, Kalteng, Gorontalo
	16 Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional untuk Kategori IV luas 25.001 s/d 100.000 M <sup>2</sup>	1 Bidang	1.593.000	Kalsel, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung
	17 Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional untuk Kategori V luas 25.001 s/d 100.000 M <sup>2</sup>	1 Bidang	957.000	Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Peta Bidang Tanah</b>			
18	Peta Bidang Tanah Kategori I (ASN)	1 Bidang	325.600	Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara
19	Peta Bidang Tanah Kategori II (ASN)	1 Bidang	275.900	Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Kepri, Bangka Belitung
20	Peta Bidang Tanah Kategori III (ASN)	1 Bidang	227.600	Sulbar, Sulsel, Kaltim, Kalbar, Aceh, Sumut, Sumbar, Kalteng, Gorontalo
21	Peta Bidang Tanah Kategori IV (ASN)	1 Bidang	175.800	Kalsel, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung
22	Peta Bidang Tanah Kategori V (ASN)	1 Bidang	125.500	Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, Jawa Timur, Bali
23	Peta Bidang Tanah Kategori VI (ASN)	1 Bidang	542.000	Wilayah Kepulauan
24	Peta Bidang Tanah Kategori VII (ASN)	1 Bidang	953.000	Daerah Terpencil/Terluar
25	Peta Bidang Tanah Kategori I (Pihak Ketiga)	1 Bidang	495.995	Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara
26	Peta Bidang Tanah Kategori II (Pihak Ketiga)	1 Bidang	420.510	Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Kepri, Bangka Belitung
27	Peta Bidang Tanah Kategori III (Pihak Ketiga)	1 Bidang	345.395	Sulbar, Sulsel, Kaltim, Kalbar, Aceh, Sumut, Sumbar, Kalteng, Gorontalo
28	Peta Bidang Tanah Kategori IV (Pihak Ketiga)	1 Bidang	266.665	Kalsel, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung
29	Peta Bidang Tanah Kategori V (Pihak Ketiga)	1 Bidang	188.305	Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, Jawa Timur, Bali
	<b>Bidang Tanah yang Diredistribusi</b>			
30	Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek <i>Landreform</i> tanpa Penegasan Kategori I	1 Bidang	875.580	Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara
31	Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek <i>Landreform</i> tanpa Penegasan Kategori II	1 Bidang	734.928	Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Kep Babel, Kep. Riau
32	Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek <i>Landreform</i> tanpa Penegasan Kategori III	1 Bidang	620.618	Aceh, Sumut, Sumbar, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulsel, Sulbar
33	Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek <i>Landreform</i> tanpa Penegasan Kategori IV	1 Bidang	504.103	Jambi, Riau, Sumsel, Lampung, Kalsel, Bengkulu, Gorontalo
34	Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek <i>Landreform</i> tanpa Penegasan Kategori V	1 Bidang	380.280	Jabar, Jateng, Bali, DIY, Jatim, Banten
35	Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek <i>Landreform</i> melalui Penegasan Kategori I	1 Bidang	1.105.000	Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara
36	Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek <i>Landreform</i> melalui Penegasan Kategori II	1 Bidang	926.399	Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Kep Babel, Kep. Riau

AGV





Kementerian Negara/Lembaga: Agraria dan Tata Ruang/BPN (056)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	37 Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek <i>Landreform</i> melalui Penegasan Kategori III	1 Bidang	772.899	Aceh, Sumut, Sumbar, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulsel, Sulbar
	38 Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek <i>Landreform</i> melalui Penegasan Kategori IV	1 Bidang	620.999	Jambi, Riau, Sumsel, Lampung, Kalsel, Bengkulu, Gorontalo
	39 Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek <i>Landreform</i> melalui Penegasan Kategori V	1 Bidang	457.980	Jabar, Jateng, Bali, DIY, Jatim, Banten
	40 Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek <i>Landreform</i> yang Belum Ada Penggarapan Kategori I	1 Bidang	1.254.813	Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara
	41 Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek <i>Landreform</i> yang Belum Ada Penggarapan Kategori II	1 Bidang	1.054.253	Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Kep Babel, Kep. Riau
	42 Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek <i>Landreform</i> yang Belum Ada Penggarapan Kategori III	1 Bidang	884.878	Aceh, Sumut, Sumbar, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulsel, Sulbar
	43 Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek <i>Landreform</i> yang Belum Ada Penggarapan Kategori IV	1 Bidang	709.903	Jambi, Riau, Sumsel, Lampung, Kalsel, Bengkulu, Gorontalo
	44 Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek <i>Landreform</i> yang Belum Ada Penggarapan Kategori V	1 Bidang	527.757	Jabar, Jateng, Bali, DIY, Jatim, Banten
	<b>Bidang dan Kawasan yang Diinventarisasi</b>			
	45 Bidang Tanah yang Diinventarisasi P4T Non Kawasan Hutan Kategori I	1 Bidang	162.834	NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Kabupaten Kepulauan
	46 Bidang Tanah yang Diinventarisasi P4T Non Kawasan Hutan Kategori II	1 Bidang	127.457	Kep. Babel, Kepri, NTB, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulut dan Sultra
	47 Bidang Tanah yang Diinventarisasi P4T Non Kawasan Hutan Kategori III	1 Bidang	97.882	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Kalsel, Gorontalo, Sulteng, Sulbar dan Sulsel
	48 Bidang Tanah yang Diinventarisasi P4T Non Kawasan Hutan Kategori IV	1 Bidang	96.550	Lampung, Banten, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim dan Bali
	49 Bidang Tanah yang Diinventarisasi P4T Kawasan Hutan Kategori I	1 Bidang	266.400	NTT, Maluku, Malut, Papua Barat, Papua dan Kabupaten Kepulauan
	50 Bidang Tanah yang Diinventarisasi P4T Kawasan Hutan Kategori II	1 Bidang	213.700	Kep. Babel, Kepri, NTB, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulut dan Sultra
	51 Bidang Tanah yang Diinventarisasi P4T Kawasan Hutan Kategori III	1 Bidang	202.800	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Kalsel, Gorontalo, Sulteng, Sulbar dan Sulsel
	52 Bidang Tanah yang Diinventarisasi P4T Kawasan Hutan Kategori IV	1 Bidang	209.000	Lampung, Banten, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim dan Bali

Kementerian Negara/Lembaga: Agraria dan Tata Ruang/BPN (056)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Neraca Penatagunaan Tanah</b>			
53	Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota Kategori I	1 Neraca	226.641.700	Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara
54	Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota Kategori II	1 Neraca	173.815.860	NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulbar, Sulteng, Sulse dan Sultra
55	Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota Kategori III	1 Neraca	160.069.800	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung
56	Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota Kategori IV	1 Neraca	173.398.000	Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan Bali
57	Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Kategori I	1 Neraca	166.255.750	Papua, Maluku, Papua Barat, Maluku Utara
58	Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Kategori II	1 Neraca	107.345.000	Sulut, Sulse, Sulteng, Sulbar, Sultra, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, NTT, NTB, Gorontalo
59	Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Kategori III	1 Neraca	108.452.000	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Babel, Lampung
60	Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Kategori IV	1 Neraca	113.488.000	Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali
	<b>Bidang Tanah yang Dikonsolidasi</b>			
61	Sertipikat Konsolidasi Tanah Kategori I	1 Bidang	1.943.880	Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara
62	Sertipikat Konsolidasi Tanah Kategori II	1 Bidang	1.698.540	Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Kepri, Babel
63	Sertipikat Konsolidasi Tanah Kategori III	1 Bidang	1.512.660	Sulbar, Sulse, Kaltim, Kalbar, Aceh, Sumut, Sumbar, Kalteng
64	Sertipikat Konsolidasi Tanah Kategori IV	1 Bidang	1.298.540	Kalsel, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Gorontalo
65	Sertipikat Konsolidasi Tanah Kategori V	1 Bidang	1.183.340	Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali
	<b>Peta Potensi Obyek Konsolidasi Tanah</b>			
66	Peta Potensi Obyek Konsolidasi Tanah Kecamatan Kategori I	1 Bidang	134.912.000	Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara
67	Peta Potensi Obyek Konsolidasi Tanah Kecamatan Kategori II	1 Bidang	113.687.000	Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Kepri, Babel
68	Peta Potensi Obyek Konsolidasi Tanah Kecamatan Kategori III	1 Bidang	114.489.000	Sulbar, Sulse, Kaltim, Kalbar, Aceh, Sumut, Sumbar, Kalteng

Kementerian Negara/Lembaga: Agraria dan Tata Ruang/BPN (056)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	69 Peta Potensi Obyek Konsolidasi Tanah Kecamatan Kategori IV	1 Bidang	108.596.000	Kalsel,Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Gorontalo
	70 Peta Potensi Obyek Konsolidasi Tanah Kecamatan Kategori V	1 Bidang	117.198.000	Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
059.03	<b>direktorat Jenderal Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas I Jakarta</b>			
	1 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota (Jakarta)	1 Layanan	6.700.000	
	2 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Layanan	58.428.000	
	3 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	23.000.000	
	4 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.700.000	
	5 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	58.778.000	
	6 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota (Jakarta)	1 Layanan	6.700.000	
	7 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	13.290.000	
	8 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	6.700.000	
	9 Ujian Negara Amatir Radio	1 Layanan	27.050.000	
	10 <i>Joint Measurement</i> dan Inspeksi di Pelabuhan Penggunaan Frekuensi Maritim Dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut/Otoritas Pelabuhan	1 Layanan	20.925.000	
	11 <i>Joint Measurement</i> dan Inspeksi di Bandara Halim Penggunaan Frekuensi Penerbangan Dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara/Otoritas Bandara	1 Layanan	20.925.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Medan</b>			
	12 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.469.000	
	13 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	17.983.000	
	14 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	10.003.000	
	15 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	32.842.000	
	16 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.547.000	
	17 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	20.373.000	
	18 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	20.373.000	
	19 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota	1 Layanan	9.943.000	
	20 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota	1 Layanan	20.994.000	
	21 Ujian Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	30.036.000	
	22 Ujian Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	56.037.000	
	23 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota (Transportasi Udara )	1 Layanan	34.265.000	
	24 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota ( Transportasi Udara )	1 Layanan	34.265.000	
	25 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.469.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Bandung</b>			
	26 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.810.000	
	27 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	23.910.000	
	28 Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	25.220.000	
	29 Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	37.670.000	
	30 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.110.000	
	31 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	27.720.000	
	32 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.026.000	
	33 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	23.490.000	
	34 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota	1 Layanan	16.035.000	
	35 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota	1 Layanan	28.860.000	
	36 Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	62.168.000	
	37 Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	84.138.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Semarang</b>			
	38 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota (Semarang)	1 Layanan	4.824.000	
	39 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.316.000	
	40 Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Semarang)	1 Layanan	20.325.000	
	41 Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	55.354.000	
	42 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota (Semarang)	1 Layanan	4.824.000	
	43 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.316.000	
	44 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.824.000	
	45 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.316.000	
	46 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	32.356.000	
	47 Ujian Amatir Radio	1 Layanan	68.142.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Surabaya</b>			
	48 Observasi Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.312.000	

AGW



Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	49 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Layanan	22.700.000	
	50 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Jatim)	1 Layanan	22.165.000	
	51 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	76.850.000	
	52 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	32.135.000	
	53 Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.792.000	
	54 Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.660.000	
	55 Ujian Amatir Radio	1 Layanan	89.375.000	
	56 Pengukuran Frekuensi Radio	1 Layanan	5.825.000	
	57 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.725.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Samarinda</b>			
	58 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota Samarinda	1 Layanan	6.457.000	
	59 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Samarinda Transportasi Darat	1 Layanan	28.685.000	
	60 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Samarinda Transportasi Udara	1 Layanan	38.830.000	
	61 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Samarinda Transportasi Laut dan Udara	1 Layanan	43.619.000	
	62 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Samarinda	1 Layanan	19.749.000	
	63 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	86.279.000	
	64 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota Samarinda	1 Layanan	6.457.000	
	65 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	27.758.000	
	66 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Samarinda Transportasi Udara	1 Layanan	40.490.000	
	67 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	41.830.000	
	68 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Samarinda	1 Layanan	6.200.000	
	69 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Samarinda	1 Layanan	38.830.000	
	70 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	18.531.000	
	71 Ujian Negara Amatir Radio	1 Layanan	58.822.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Makassar</b>			
	72 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di	1 Layanan	5.000.000	
	73 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di	1 Layanan	24.800.000	
	74 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	21.800.000	
	75 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Makassar	1 Layanan	16.520.000	
	76 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Darat	1 Layanan	68.050.000	
	77 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota Makassar	1 Layanan	5.255.000	
	78 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Laut	1 Layanan	23.300.000	
	79 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Darat	1 Layanan	21.800.000	
	80 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Makassar	1 Layanan	23.300.000	
	81 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Darat	1 Layanan	21.800.000	
	82 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Makassar	1 Layanan	5.000.000	
	83 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	14.600.000	
	84 Ujian Negara Amatir Radio	1 Layanan	103.260.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Pekanbaru</b>			
	85 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.025.000	
	86 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Layanan	20.550.000	
	87 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Dalam Kota	1 Layanan	20.900.000	
	88 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Layanan	69.705.000	
	89 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	24.810.000	
	90 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Layanan	20.550.000	
	91 Validasi Data Pengguna Frekuensi di Dalam Kota	1 Layanan	5.887.000	
	92 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	20.225.000	
	93 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	118.490.000	
	94 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	43.900.000	
	95 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	30.430.000	
	96 Pengukuran Rekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.337.000	
	97 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	33.825.000	

AGW

A



Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
98	Ujian Negara Amatir Radio <b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Palembang</b>	1 Layanan	73.240.000	
99	Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota (Palembang)	1 Layanan	5.250.000	
100	Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio di Luar Kota (Palembang)	1 Layanan	19.325.000	
101	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Palembang)	1 Layanan	21.440.000	
102	Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota (Palembang)	1 Layanan	60.150.000	
103	Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.250.000	
104	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	19.000.000	
105	Pengukuran Frekuensi Radio	1 Layanan	19.325.000	
106	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	59.816.000	
107	Ujian Negara Amatir Radio <b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Yogyakarta</b>	1 Layanan	55.024.000	
108	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota (D.I.Yogyakarta)	1 Layanan	4.510.000	
109	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota (D.I.Yogyakarta)	1 Layanan	10.303.000	
110	Operasi Penertiban Frekuensi Radiodalam Kota	1 Layanan	20.074.000	
111	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	34.334.000	
112	Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	3.840.000	
113	Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota (D.I.Yogyakarta)	1 Layanan	7.820.000	
114	Pengukuran Frekuensi Radio (D.I.Yogyakarta)	1 Layanan	12.260.000	
115	Tindak Lanjut Hasil Penertiban (D.I.Yogyakarta)	1 Layanan	31.900.000	
116	Ujian Negara Amatir Radio (D.I.Yogyakarta) <b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Denpasar</b>	1 Layanan	30.410.000	
117	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota (Badung)	1 Layanan	6.000.000	
118	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota (Badung)	1 Layanan	26.760.000	
119	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Badung)	1 Layanan	23.830.000	
120	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota (Badung)	1 Layanan	76.508.000	
121	Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota (Badung)	1 Layanan	6.000.000	
122	Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	26.760.000	
123	Pengukuran Frekuensi Radio	1 Layanan	26.760.000	
124	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	67.680.000	
125	Ujian Negara Amatir Radio	1 Layanan	44.970.000	
126	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota Transportasi Penyeberangan Air/Laut	1 Layanan	30.610.000	
127	Validasi Data Frekuensi Radio di Luar Kota (Badung) Transportasi Penyebrangan Air/Laut <b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Kupang</b>	1 Layanan	30.610.000	
128	Observasi Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota Kupang	1 Layanan	6.650.000	
129	Observasi Monitoring Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	24.750.000	
130	Observasi Monitoring Luar Kota Transportasi Udara NTT	1 Layanan	39.900.000	
131	Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Kupang	1 Layanan	21.420.000	
132	Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat NTT	1 Layanan	31.970.000	
133	Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	49.815.000	
134	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota Kupang	1 Layanan	6.125.000	
135	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat NTT	1 Layanan	24.400.000	
136	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara NTT	1 Layanan	39.925.000	
137	Pengukuran Stasiun Radio Dalam Kota Kupang	1 Layanan	6.150.000	
138	Pengukuran Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Darat NTT	1 Layanan	36.000.000	
139	Pengukuran Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Udara NTT	1 Layanan	39.925.000	
140	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota Kupang	1 Layanan	10.070.000	
141	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota Transportasi	1 Layanan	19.415.000	
142	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota Transportasi Udara NTT	1 Layanan	26.875.000	
143	Pelaksanaan Ujian Amatir Radio	1 Layanan	104.100.000	

Abw

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Manado</b>			
144	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekrad Dalam Kota	1 Layanan	5.001.000	
145	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekrad Luar Kota	1 Layanan	26.506.000	
146	Operasi Penertiban Frekrad Dalam Kota	1 Layanan	24.213.000	
147	Operasi Penertiban Frekrad Luar Kota	1 Layanan	73.448.000	
148	Validasi Data Pengguna Frekrad Dalam Kota	1 Layanan	5.001.000	
149	Validasi Data Pengguna Frekrad Luar Kota	1 Layanan	29.214.000	
150	Pengukuran Frekuensi Radio	1 Layanan	25.282.000	
151	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	14.984.000	
152	Ujian Amatir Radio	1 Layanan	36.468.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Jayapura</b>			
153	Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Bergerak Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	7.402.000	
154	Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Bergerak Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat (Papua)	1 Layanan	16.360.000	
155	Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Bergerak Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara (Papua)	1 Layanan	61.500.000	
156	Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Bergerak Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara dan Laut (Papua)	1 Layanan	59.900.000	
157	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	20.730.000	
158	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota (Papua)	1 Layanan	118.320.000	
159	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	7.402.000	
160	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat (Papua)	1 Layanan	16.360.000	
161	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara (Papua)	1 Layanan	61.500.000	
162	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara dan Laut (Papua)	1 Layanan	59.900.000	
163	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	7.402.000	
164	Pengukuran Frekuensi Radio Bergerak Luar Kota	1 Layanan	55.500.000	
165	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	7.602.000	
166	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota (Papua)	1 Layanan	61.520.000	
167	Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	13.087.000	
168	Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota (Papua)	1 Layanan	50.335.000	
169	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat (Papua)	1 Layanan	28.752.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Banda Aceh</b>			
170	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota (Aceh)	1 Layanan	4.380.000	
171	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota (Aceh)	1 Layanan	21.730.000	
172	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota Menggunakan Transportasi Kapal Laut (Aceh)	1 Layanan	23.305.000	
173	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota (Aceh)	1 Layanan	48.014.000	
174	Validasi dan Pendataan Pengguna Spektrum Frekuensi Radio didalam Kota (Aceh)	1 Layanan	4.230.000	
175	Validasi dan Pendataan Pengguna Spektrum Frekuensi Radio diluar Kota (Aceh)	1 Layanan	31.387.000	
176	Pengukuran Frekuensi Radio di Dalam Kota (Aceh)	1 Layanan	4.380.000	
177	Pengukuran Frekuensi Radio di Luar Kota (Aceh)	1 Layanan	21.730.000	
178	Tindak Lanjut Hasil Penertiban di Luar Kota (Aceh)	1 Layanan	35.790.000	
179	Ujian Amatir Radio (Aceh)	1 Layanan	34.417.000	
180	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Aceh)	1 Layanan	20.610.000	
181	Pengukuran Frekuensi Radio di Luar Kota Dengan	1 Layanan	21.750.000	
182	Tindak Lanjut Hasil Penertiban di Dalam Kota (Aceh)	1 Layanan	10.950.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Batam</b>			
183	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota Menggunakan Bbm	1 Layanan	3.552.000	
184	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	19.398.000	
185	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	34.198.000	
186	Monitoring Bordercomm (Upt Perbatasan0	1 Layanan	19.398.000	
187	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	27.120.000	
188	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	60.976.000	
189	Validasi Data Pengguna dan Penggudangan Frekuensi	1 Layanan	5.146.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
190	Validasi Data Pengguna dan Penggudangan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	25.374.000	
191	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	33.924.000	
192	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.040.000	
193	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	18.918.000	
194	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	34.198.000	
195	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	40.938.000	
196	Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	35.598.000	
197	Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	63.863.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Padang</b>			
198	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota Padang	1 Layanan	4.612.000	
199	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Padang	1 Layanan	18.940.000	
200	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Padang	1 Layanan	12.376.000	
201	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	29.340.000	
202	Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota Padang	1 Layanan	2.970.000	
203	Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota Padang	1 Layanan	18.740.000	
204	Pengukuran Frekuensi Radio	1 Layanan	15.327.000	
205	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	29.080.000	
206	Ujian Amatir Radio	1 Layanan	26.150.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Jambi</b>			
207	Observasi dan Maonitoring Dalam Kota (Jambi)	1 Layanan	5.100.000	
208	Observasi dan Monitoring Luar Kota (Jambi)	1 Layanan	19.300.000	
209	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Jambi)	1 Layanan	18.152.000	
210	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota (Jambi)	1 Layanan	40.872.000	
211	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.100.000	
212	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota (Jambi)	1 Layanan	19.300.000	
213	Pengukuran Frekuensi Radio	1 Layanan	19.300.000	
214	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	8.060.000	
215	Ujian Amatir Radio	1 Layanan	59.990.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Bengkulu</b>			
216	Observasi Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota Bengkulu	1 Layanan	4.550.000	
217	Observasi Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota Bengkulu	1 Layanan	18.000.000	
218	Observasi Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota (Transportasi Udara) Bengkulu	1 Layanan	23.730.000	
219	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Bengkulu	1 Layanan	13.190.000	
220	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Bengkulu	1 Layanan	40.850.000	
221	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Bengkulu	1 Layanan	10.195.000	
222	Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota Bengkulu	1 Layanan	4.550.000	
223	Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota Bengkulu	1 Layanan	18.000.000	
224	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Bengkulu	1 Layanan	4.550.000	
225	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Bengkulu	1 Layanan	18.000.000	
226	Ujian Amatir Radio Luar Kota Bengkulu	1 Layanan	49.400.000	
227	Ujian Amatir Radio Dalam Kota Bengkulu	1 Layanan	32.400.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Lampung</b>			
228	Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.825.000	
229	Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	18.380.000	
230	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	10.850.000	
231	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	29.776.000	
232	Validasi Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.825.000	
233	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	18.380.000	
234	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	18.380.000	
235	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota	1 Layanan	6.216.000	
236	Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota	1 Layanan	25.965.000	
237	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.250.000	
238	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota	1 Layanan	4.460.000	
239	Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	34.288.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Pontianak</b>			
240	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Dalam Kota Pontianak	1 Layanan	5.910.000	
241	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota Pontianak	1 Layanan	21.510.000	
242	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota Pontianak Transportasi Udara	1 Layanan	35.745.000	

AGW



Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
243	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota Pontianak Transportasi Sungai	1 Layanan	24.115.000	
244	Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Dalam Kota Pontianak	1 Layanan	24.455.000	
245	Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota Pontianak	1 Layanan	63.749.000	
246	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.910.000	
247	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Layanan	21.510.000	
248	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Layanan	22.768.000	
249	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Luar Kota Pontianak Transportasi Udara dan Darat	1 Layanan	34.153.000	
250	Pengukuran Frekuensi Radio	1 Layanan	20.268.000	
251	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	10.660.000	
252	Ujian Amatir Radio <b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Banjarmasin</b>	1 Layanan	62.392.000	
253	Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio di Dalam Kota Banjarmasin	1 Layanan	5.300.000	
254	Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Layanan	21.625.000	
255	Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Dalam Kota Banjarmasin	1 Layanan	17.525.000	
256	Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota Banjarmasin	1 Layanan	42.180.000	
257	Validasi Data Frekuensi Radio di Dalam Kota Banjarmasin	1 Layanan	5.230.000	
258	Validasi Data Frekuensi Radio di Luar Kota Banjarmasin	1 Layanan	21.520.000	
259	Pengukuran Frekuensi Radio	1 Layanan	21.520.000	
260	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	19.030.000	
261	Ujian Amatir Radio <b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Palangkaraya</b>	1 Layanan	58.650.000	
262	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota (Kalteng)	1 Layanan	3.425.000	
263	Observasi Monitoring Bergerak Frekuensi Luar Kota (Kalteng)	1 Layanan	37.325.000	
264	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Kalteng)	1 Layanan	19.600.000	
265	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota (Kalteng)	1 Layanan	86.826.000	
266	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota (Kalteng)	1 Layanan	3.180.000	
267	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota (Kalteng)	1 Layanan	28.505.000	
268	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.750.000	
269	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	28.505.000	
270	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Frekuensi Radio	1 Layanan	5.400.000	
271	Ujian Negara Amatir Radio <b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Mataram</b>	1 Layanan	81.225.000	
272	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Dalam Kota (NTB)	1 Layanan	5.760.000	
273	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota (NTB)	1 Layanan	22.456.000	
274	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota (NTB) Transportasi Penyeberangan Air/Laut	1 Layanan	23.258.000	
275	Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Dalam Kota (NTB)	1 Layanan	25.660.000	
276	Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota (NTB)	1 Layanan	62.160.000	
277	Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota (NTB)	1 Layanan	58.285.000	
278	Validasi Data Frekuensi Radio di Dalam Kota (NTB)	1 Layanan	5.760.000	
279	Validasi Data Frekuensi Radio di Luar Kota (NTB)	1 Layanan	22.456.000	
280	Validasi Data Frekuensi Radio di Luar Kota (NTB)	1 Layanan	23.188.000	
281	Pengukuran Parameter Teknis Frekuensi Radio di Dalam Kota (NTB)	1 Layanan	5.760.000	
282	Pengukuran Parameter Teknis Frekuensi Radio di Luar Kota (NTB)	1 Layanan	22.456.000	
283	Pengukuran Parameter Teknis Frekuensi Radio di Luar Kota (NTB) Transportasi Penyeberangan Air/Laut	1 Layanan	23.188.000	
284	Tindak Lanjut Hasil Penertiban (NTB)	1 Layanan	48.835.000	
285	Ujian Negara Amatir Radio di Pulau Lombok (NTB)	1 Layanan	58.404.000	
286	Ujian Negara Amatir Radio di Pulau Sumbawa (NTB) <b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Balikpapan</b>	1 Layanan	60.233.000	
287	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Dalam Kota	1 Layanan	5.275.000	
288	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Layanan	25.850.000	
289	Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Dalam Kota	1 Layanan	22.525.000	



Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	290 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Layanan	79.700.000	
	291 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Dalam Kota	1 Layanan	5.275.000	
	292 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Layanan	25.850.000	
	293 Pengukuran Frekuensi Radio di Dalam Kota	1 Layanan	5.275.000	
	294 Pengukuran Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Layanan	25.850.000	
	295 Tindak Lanjut Hasil Penertiban di Dalam Kota	1 Layanan	16.390.000	
	296 Ujian Amatir Radio di Dalam Kota	1 Layanan	33.189.000	
	297 Ujian Amatir Radio di Luar Kota	1 Layanan	58.554.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Palu</b>			
	298 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio di Dalam Kota	1 Layanan	5.330.000	
	299 Monitoring Observasi Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Layanan	22.330.000	
	300 Observasi Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota dengan Transportasi Laut	1 Layanan	28.530.000	
	301 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	63.320.000	
	302 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.330.000	
	303 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Layanan	22.330.000	
	304 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota dengan Transportasi Laut/Udara	1 Layanan	47.480.000	
	305 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.330.000	
	306 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	22.330.000	
	307 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan	1 Layanan	28.530.000	
	308 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	41.730.000	
	309 Ujian Amatir Radio	1 Layanan	74.472.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Kendari</b>			
	310 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.100.000	
	311 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.850.000	
	312 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	23.450.000	
	313 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota Melalui Udara	1 Layanan	32.600.000	
	314 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	29.110.000	
	315 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	39.245.000	
	316 Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.100.000	
	317 Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota Melalui Darat	1 Layanan	20.525.000	
	318 Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota Melalui Laut	1 Layanan	26.330.000	
	319 Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota Melalui Udara	1 Layanan	32.600.000	
	320 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.100.000	
	321 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Melalui Darat	1 Layanan	21.850.000	
	322 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Melalui Laut	1 Layanan	23.850.000	
	323 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Melalui Udara	1 Layanan	30.600.000	
	324 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	13.780.000	
	325 Ujian Negara Amatir Radio (Unar)	1 Layanan	55.030.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Merauke</b>			
	326 Observasi dan Monitoring Dalam Kota Merauke	1 Layanan	7.450.000	
	327 Observasi dan Monitoring Luar Kota Merauke	1 Layanan	50.440.000	
	328 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Merauke	1 Layanan	36.700.000	
	329 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Merauke	1 Layanan	111.670.000	
	330 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota Merauke	1 Layanan	8.320.000	
	331 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	48.650.000	
	332 Pengukuran Frekuensi Radio	1 Layanan	55.820.000	
	333 Ujian Amatir Radio	1 Layanan	132.560.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Ambon</b>			
	334 Observasi dan Monitoring Frekuensi Dalam Kota Ambon	1 Layanan	4.200.000	
	335 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota Ambon Transportasi Laut	1 Layanan	23.870.000	
	336 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota Ambon Transportasi Udara	1 Layanan	21.605.000	
	337 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Ambon	1 Layanan	17.300.000	
	338 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Ambon Transportasi Laut	1 Layanan	27.674.000	
	339 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Ambon Transportasi Udara	1 Layanan	38.310.000	
	340 Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota Ambon	1 Layanan	4.200.000	
	341 Validasi Frekuensi Radio Luar Kota Ambon Transportasi Laut	1 Layanan	23.130.000	
	342 Validasi Frekuensi Radio Luar Kota Ambon Transportasi Udara	1 Layanan	21.605.000	
	343 Pengukuran Parameter Teknis Dalam Kota Ambon	1 Layanan	4.200.000	

AGW





Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	344 Pengukuran Parameter Teknis Luar Kota Ambon Transportasi Laut	1 Layanan	12.336.000	
	345 Pengukuran Parameter Teknis Luar Kota Ambon Transportasi Udara	1 Layanan	21.605.000	
	346 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	7.580.000	
	347 Pelaksanaan Ujian Amatir Radio Dalam Kota Ambon	1 Layanan	17.650.000	
	348 Pelaksanaan Ujian Amatir Radio Luar Kota Ambon Transportasi Laut	1 Layanan	34.380.000	
	349 Pelaksanaan Ujian Amatir Radio Luar Kota Ambon Transportasi Udara	1 Layanan	45.070.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Ternate</b>			
	350 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota Ternate	1 Layanan	6.237.000	
	351 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Kapal Ferry Maluku Utara	1 Layanan	24.200.000	
	352 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Kepulauan Maluku Utara	1 Layanan	29.150.000	
	353 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	29.840.000	
	354 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	68.840.000	
	355 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.725.000	
	356 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Kapal Ferry	1 Layanan	24.200.000	
	357 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Kepulauan Maluku Utara	1 Layanan	29.150.000	
	358 Pengukuran Frekuensi Radio Transportasi Kapal Ferry Maluku Utara	1 Layanan	24.200.000	
	359 Pengukuran Frekuensi Radio Kepulauan Maluku Utara	1 Layanan	29.150.000	
	360 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	5.025.000	
	361 Ujian Amatir Radio	1 Layanan	43.750.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Pangkal Pinang</b>			
	362 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.975.000	
	363 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	16.907.000	
	364 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Laut/Udara	1 Layanan	22.830.000	
	365 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.975.000	
	366 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	16.907.000	
	367 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Laut/Udara	1 Layanan	22.830.000	
	368 Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.975.000	
	369 Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	16.907.000	
	370 Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Laut/Udara	1 Layanan	22.830.000	
	371 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	7.550.000	
	372 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	19.770.000	
	373 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Laut/Udara	1 Layanan	22.830.000	
	374 Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	8.860.000	
	375 Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara	1 Layanan	65.395.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Gorontalo</b>			
	376 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.000.000	
	377 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	18.675.000	
	378 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	24.960.000	
	379 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	70.010.000	
	380 Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.000.000	
	381 Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	18.675.000	
	382 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.000.000	
	383 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	18.675.000	
	384 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota	1 Layanan	5.885.000	
	385 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota	1 Layanan	21.810.000	
	386 Ujian Negara Amatir Radio	1 Layanan	28.680.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Tangerang</b>			
	387 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.890.000	
	388 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar	1 Layanan	20.225.000	

AGN

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
389	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	17.001.000	
390	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	56.480.000	
391	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	8.050.000	
392	Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	19.800.000	
393	Pengukuran Frekuensi Dalam Kota	1 Layanan	5.335.000	
394	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	20.310.000	
395	Ujian Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	49.310.000	
396	Ujian Amatir Dalam Kota	1 Layanan	22.780.000	
397	Validasi Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.100.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Pos Monitoring Sorong</b>			
398	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Dalam Kota	1 Layanan	4.969.000	
399	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota Dengan Transportasi Laut	1 Layanan	30.290.000	
400	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota Dengan Sarana Transportasi Darat	1 Layanan	31.275.000	
401	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	28.195.000	
402	Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Layanan	62.295.000	
403	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.969.000	
404	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.046.000	
405	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.969.000	
406	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	11.050.000	
407	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Dengan Transportasi Laut	1 Layanan	33.310.000	
408	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota	1 Layanan	17.471.000	
409	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota	1 Layanan	68.646.000	
410	Ujian Amatir Radio Luar Kota	1 Layanan	64.760.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Tahuna</b>			
411	Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.068.000	
412	Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	32.884.000	
413	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	23.881.000	
414	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	71.565.000	
415	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	8.801.000	
416	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	42.928.000	
417	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	42.928.000	
418	Tindak Lanjut Hasil Penertiban	1 Layanan	84.729.000	
419	Ujian Negara Amatir Radio	1 Layanan	94.204.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Manokwari</b>			
420	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.050.000	
421	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar	1 Layanan	38.912.000	
422	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar	1 Layanan	24.700.000	
423	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	17.000.000	
424	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.050.000	
425	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Layanan	38.912.000	
426	Pengukuran Frekuensi Radio di Dalam Kota	1 Layanan	5.050.000	
427	Pengukuran Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Layanan	38.912.000	
428	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Frekuensi Radio di Dalam	1 Layanan	12.130.000	
429	Ujian Amatir Radio di Dalam Kota	1 Layanan	37.430.000	
430	Ujian Amatir Radio di Luar Kota	1 Layanan	96.138.000	
	<b>Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi, dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Mamuju</b>			
431	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota Mamuju	1 Layanan	5.430.000	
432	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Mamuju	1 Layanan	22.800.000	
433	Operasi Penertiban Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota Mamuju	1 Layanan	23.841.000	
434	Operasi Penertiban Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	63.420.000	
435	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.430.000	
436	Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Mamuju	1 Layanan	22.680.000	
437	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Mamuju	1 Layanan	5.430.000	
438	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Mamuju	1 Layanan	22.680.000	
439	Tindak Lanjut Hasil Penertiban Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Mamuju	1 Layanan	7.610.000	
440	Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota Mamuju	1 Layanan	39.270.000	
441	Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota Mamuju	1 Layanan	58.250.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas I Jakarta</b>			
442	Penanganan Gangguan Dalam Kota	1 Layanan	6.700.000	
443	Penanganan Gangguan Luar Kota	1 Layanan	9.610.000	

AGW



Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Medan</b>			
444	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.469.000	
445	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	20.373.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Bandung</b>			
446	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.110.000	
447	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	25.205.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Semarang</b>			
448	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.187.000	
449	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.679.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Surabaya</b>			
450	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di Dalam Kota	1 Layanan	6.950.000	
451	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di Luar Kota	1 Layanan	22.700.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Samarinda</b>			
452	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Samarinda	1 Layanan	6.200.000	
453	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Samarinda	1 Layanan	38.830.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Makasar</b>			
454	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1 Layanan	21.800.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Pekanbaru</b>			
455	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.025.000	
456	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	20.225.000	
457	Penanganan Gangguan Luar Kota Transportasi Laut	1 Layanan	31.575.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Palembang</b>			
458	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1 Layanan	5.575.000	
459	Penanganan Gangguan Luar Kota	1 Layanan	19.325.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Yogyakarta</b>			
460	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1 Layanan	17.800.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Denpasar</b>			
461	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota (Badung)	1 Layanan	6.000.000	
462	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	17.996.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Kupang</b>			
463	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Kupang	1 Layanan	6.150.000	
464	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat	1 Layanan	24.400.000	
465	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara	1 Layanan	39.925.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Manado</b>			
466	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1 Layanan	25.499.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Jayapura</b>			
467	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota (Papua)	1 Layanan	7.402.000	
468	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (Papua)	1 Layanan	53.900.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Banda Aceh</b>			
469	Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio di Dalam Kota (Aceh)	1 Layanan	4.380.000	
470	Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio di Luar Kota (Aceh)	1 Layanan	21.730.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Batam</b>			
471	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.040.000	
472	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	23.074.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Padang</b>			
473	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1 Layanan	10.967.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Jambi</b>			
474	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1 Layanan	19.300.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Bengkulu</b>			
475	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Bengkulu	1 Layanan	18.000.000	

*Adw*  
D

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Lampung</b>			
476	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	18.380.000	
477	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.150.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Pontianak</b>			
478	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.910.000	
479	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	20.268.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Banjarmasin</b>			
480	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1 Layanan	21.520.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Palangkaraya</b>			
481	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.900.000	
482	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	24.794.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Mataram</b>			
483	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.835.000	
484	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	23.090.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Balikpapan</b>			
485	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.275.000	
486	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	25.850.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Palu</b>			
487	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1 Layanan	22.330.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Kendari</b>			
488	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	6.100.000	
489	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.850.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Merauke</b>			
490	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	7.770.000	
491	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	47.050.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Manokwari</b>			
492	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di Dalam Kota	1 Layanan	5.050.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Mamuju</b>			
493	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Mamuju	1 Layanan	5.430.000	
494	Pelaksanaan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	22.680.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Ambon</b>			
495	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.200.000	
496	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	21.605.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Ternate</b>			
497	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.795.000	
498	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	30.925.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Pangkal Pinang</b>			
499	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.975.000	
500	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	16.907.000	
501	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Laut/Udara	1 Layanan	22.830.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Gorontalo</b>			
502	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.000.000	
503	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	18.675.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Tangerang</b>			
504	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	4.960.000	
505	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	19.775.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Posmon Sorong</b>			
506	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	2.582.000	
507	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	23.548.000	
	<b>Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Tahuna</b>			
508	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Layanan	5.329.000	
509	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	1 Layanan	36.305.000	

ABW

Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Ketahanan Nasional (064)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
064.01	<b>Lembaga Ketahanan Nasional</b> <b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b> <b>Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXI</b>			
	1 Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA)	1 Orang	245.896.250	
	<b>Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI</b>			
	2 Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA)	1 Orang	211.599.191	
	<b>Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA) X</b>			
	3 Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA)	1 Orang	51.014.880	



Kementerian Negara/Lembaga: Badan Narkotika Nasional (066)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
066.01	<b>Badan Narkotika Nasional</b>			
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b>			
	1 Layanan Pemeriksaan Uji Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya	1 Laporan	280.000	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional</b>			
	2 Layanan Rehabilitasi 6 Bulan	1 Orang	21.570.447	
	3 Layanan Rehabilitasi 4 Bulan	1 Orang	14.981.440	
	4 Layanan Rehabilitasi Populasi Khusus 2 Bulan	1 Orang	14.043.900	
	5 Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan	1 Orang	1.100.000	
	<b>Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tanah Merah</b>			
	6 Layanan Rehabilitasi 6 Bulan	1 Orang	19.336.589	
	7 Layanan Rehabilitasi 4 Bulan	1 Orang	11.628.475	
	8 Layanan Rehabilitasi Populasi Khusus 2 Bulan	1 Orang	9.088.666	
	9 Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan	1 Orang	1.050.000	
	<b>Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka</b>			
	10 Layanan Rehabilitasi 6 Bulan	1 Orang	19.022.853	
	11 Layanan Rehabilitasi 4 Bulan	1 Orang	13.525.047	
	12 Layanan Rehabilitasi Populasi Khusus 2 Bulan	1 Orang	8.710.500	
	13 Layanan Rawat Jalan	1 Orang	1.250.000	
	<b>Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam</b>			
	14 Layanan Rehabilitasi 6 Bulan	1 Orang	19.832.566	
	15 Layanan Rehabilitasi 4 Bulan	1 Orang	13.188.500	
	16 Layanan Rehabilitasi Populasi Khusus 2 Bulan	1 Orang	7.793.714	
	17 Layanan Rawat Jalan	1 Orang	1.200.000	
	<b>Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kalianda</b>			
	18 Layanan Rehabilitasi 6 Bulan	1 Orang	17.023.025	
	19 Layanan Rehabilitasi 4 Bulan	1 Orang	11.678.120	
	20 Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan	1 Orang	1.250.000	
	<b>Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Deli Serdang</b>			
	21 Layanan Rehabilitasi 6 Bulan	1 Orang	19.190.250	
	22 Layanan Rehabilitasi 4 Bulan	1 Orang	13.702.500	
	23 Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan	1 Orang	1.100.000	

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (067)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
067.09	<p><b>Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Serta Informasi</b></p> <p><b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b></p> <p><b>Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</b></p>			
	1 Penyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Balai (5 Hari) BBPLM Jakarta	1 Orang	5.284.733	
	2 Penyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Balai (6 Hari) BBPLM Jakarta	1 Orang	5.702.566	
	3 Penyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Balai (7 Hari) BBPLM Jakarta	1 Orang	6.271.066	
	4 Penyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Balai (8 Hari) BBPLM Jakarta	1 Orang	6.688.900	
	5 Penyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Lokasi (5 Hari) BEPLM Jakarta	1 Orang	5.818.300	
	6 Penyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Lokasi (6 Hari) BBPLM Jakarta	1 Orang	6.348.966	
	7 Penyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Lokasi (7 Hari) BBPLM Jakarta	1 Orang	6.879.633	
	8 Penyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Lokasi (8 Hari) BBPLM Jakarta	1 Orang	7.410.300	
	9 Penyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di BBLM Yogyakarta (5 Hari)	1 Orang	4.876.666	
	10 Penyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di BBLM Yogyakarta (6 Hari)	1 Orang	5.413.400	
	11 Penyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di BBLM Yogyakarta (7 Hari)	1 Orang	5.815.133	
	12 Penyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di BBLM Yogyakarta (8 Hari)	1 Orang	6.216.866	
	13 Penyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Lokasi (5 Hari) pada BBLM Yogyakarta	1 Orang	5.430.733	
	14 Penyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Lokasi (6 Hari) pada BBLM Yogyakarta	1 Orang	5.988.200	
	15 Penyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Lokasi (7 Hari) pada BBLM Yogyakarta	1 Orang	6.545.666	
	16 Penyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Lokasi (8 Hari) pada BBLM Yogyakarta	1 Orang	7.103.133	
	17 Penyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Balai (5 Hari) BLM Makassar	1 Orang	4.834.000	
	18 Penyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Balai (6 Hari) BLM Makassar	1 Orang	5.221.766	
	19 Penyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Balai (7 Hari) BLM Makassar	1 Orang	5.756.833	
	20 Penyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Balai (8 Hari) BLM Makassar	1 Orang	6.158.566	

Kementerian Negara/Lembaga: Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (067)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
21	Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Lokasi (5 Hari) BLM Makassar	1 Orang	6.370.333	
22	Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Lokasi (6 Hari) BLM Makassar	1 Orang	6.805.333	
23	Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Lokasi (7 Hari) BLM Makassar	1 Orang	7.338.333	
24	Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Lokasi (8 Hari) BLM Makassar	1 Orang	7.504.666	
25	Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Balai (5 Hari) BLM Banjarmasin	1 Orang	4.228.333	
26	Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Balai (6 Hari) BLM Banjarmasin	1 Orang	4.458.000	
27	Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Balai (7 Hari) BLM Banjarmasin	1 Orang	4.687.666	
28	Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Balai (8 Hari) BLM Banjarmasin	1 Orang	4.917.333	
29	Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Lokasi (5 Hari) BLM Banjarmasin	1 Orang	4.536.000	
30	Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Lokasi (6 Hari) BLM Banjarmasin	1 Orang	4.823.666	
31	Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Lokasi (7 Hari) BLM Banjarmasin	1 Orang	5.111.333	
32	Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Lokasi (8 Hari) BLM Banjarmasin	1 Orang	5.399.000	
33	Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Balai (5 Hari) BLM Denpasar	1 Orang	5.123.533	
34	Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Balai (6 Hari) BLM Denpasar	1 Orang	5.456.933	
35	Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Balai (7 Hari) BLM Denpasar	1 Orang	5.790.333	
36	Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Balai (8 Hari) BLM Denpasar	1 Orang	6.123.733	
37	Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Lokasi (5 Hari) BLM Denpasar	1 Orang	6.497.400	
38	Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Lokasi (6 Hari) BLM Denpasar	1 Orang	7.011.400	
39	Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Lokasi (7 Hari) BLM Denpasar	1 Orang	7.525.400	
40	Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Lokasi (8 Hari) BLM Denpasar	1 Orang	8.039.400	
41	Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Balai (5 Hari) BLM Pekanbaru	1 Orang	4.552.800	
42	Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Balai (6 Hari) BLM Pekanbaru	1 Orang	4.868.266	
43	Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Balai (7 Hari) BLM Pekanbaru	1 Orang	5.217.066	
44	Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Balai (8 Hari) BLM Pekanbaru	1 Orang	5.532.533	

ABW



Kementerian Negara/Lembaga: Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (067)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
45	Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Lokasi (5 Hari) BLM Pekanbaru	1 Orang	5.561.600	
46	Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Lokasi (6 Hari) BLM Pekanbaru	1 Orang	6.007.666	
47	Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Lokasi (7 Hari) BLM Pekanbaru	1 Orang	6.453.733	
48	Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Lokasi (8 Hari) BLM Pekanbaru	1 Orang	6.899.800	

*Am*



Kementerian Negara/Lembaga: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (075)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
075.01	<b>Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika</b> <b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran</b> <b>(Sub Out put)</b>  <b>Layanan Informasi Geofisika Potensial dan Tanda Waktu</b> 1 Layanan Informasi Tanda Waktu	1 Layanan	271.000.000	

AGW





Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (079)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
079.01	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran ( <i>Sub Output</i> ) Layanan Audit Internal			
	1 Laporan Hasil Reviu	2 Layanan	177.741.000	
	Pembinaan Administrasi Peneliti Nasional			
	2 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti (SBK)	1200 Orang	1.174.132.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Tenaga Nuklir Nasional (080)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
080.01	<b>Badan Tenaga Nuklir Nasional</b> <b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b>			
	1 Laporan Data Dosis Radiasi Eksternal dan Data Dosis Radiasi Internal yang Diterima Pekerja Radiasi di Kawasan Nuklir Serpong	1 Laporan	107.927.000	
	2 Laporan Data Radioaktivitas Lingkungan Kawasan Nuklir Serpong	1 Laporan	95.593.000	
	3 Laporan Hasil Uji Profisiensi Laboratorium di BATAN untuk Pengukuran Radiasi Gamma	1 Laporan	224.534.000	
	<b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Laporan Pemantauan Tingkat Radioaktivitas Air Hujan di Wilayah Indonesia</b>			
	4 Laporan Pemantauan Tingkat Radioaktivitas Air Hujan di Wilayah Indonesia	1 Laporan	217.493.000	
	<b>Laporan Hasil Pengelolaan Limbah Radioaktif, Limbah B3, dan Bahan Bakar Nuklir Bekas</b>			
	5 Pengolahan Limbah Radioaktif Semi Cair/Resin Bekas	1 Laporan	279.591.000	
	6 Pengolahan Limbah Radioaktif Padat	1 Laporan	319.626.000	
	7 Pengolahan Limbah Radioaktif Cair	1 Laporan	597.008.000	

AEN



Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (081)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
081.01	<b>Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi</b> <b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	1 Temu Pelanggan	1 Laporan	102.730.000	
	2 Layanan Jasa Teknologi <i>Polimer</i> (PNBP)			
	3 Layanan Jasa Pelatihan Teknologi <i>Polimer</i>	14 Layanan	284.620.000	
	<b>Pembinaan Nasional Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Litkayasa</b>			
	4 Penilaian Angka Kredit JFP Tingkat Pusat	1 Layanan	370.400.000	
	<b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	5 Layanan Jurnal Teknologi <i>Aerodinamika, Aeroakustika, dan Aeroelastika</i>	1 Terbitan	31.636.000	
	6 Layanan Jurnal Teknologi <i>Aerodinamika, Aeroakustika, dan Aeroelastika</i>	1 Terbitan	36.513.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (O82)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
082.01	<b>Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional</b> <b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output)</b>			
	1 Data Penginderaan Jauh Terproduksi Hasil Akuisisi	23.690 Data	557.000.000	
	2 Data Antariksa dan Atmosfer (BPPA Sumedang)	37 GB	89.000.000	
	3 Data Antariksa dan Atmosfer (BPPA Pasuruan)	94 GB	142.000.000	
	4 Data Antariksa dan Atmosfer (BPPA Pontianak)	121 GB	152.000.000	
	5 Data Antariksa dan Atmosfer (BPAA Agam)	461 GB	239.000.000	

AN



Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
089.01	<b>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan</b> <b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran</b> <b>(Sub Output)</b>			
	<b>Pengembangan Kapasitas, Kualitas SDM, dan Kompetensi</b> <b>(Alokasi Prioritas)</b>			
	1 Diklat Penjurangan Auditor Utama BPKP	1 Orang	13.410.000	
	2 Diklat Penjurangan Auditor Madya BPKP	1 Orang	9.150.000	
	3 Diklat Penjurangan Auditor Muda BPKP	1 Orang	10.520.000	
	4 Diklat Penjurangan Auditor Ahli Pertama BPKP	1 Orang	11.880.000	
	5 Diklat Penjurangan Auditor Terampil BPKP	1 Orang	10.340.000	
	6 Diklat Substansi Teknis 4 Hari BPKP	1 Orang	5.810.000	
	7 Diklat Teknis Substansi 5 Hari BPKP	1 Orang	6.210.000	
	<b>Pengembangan Kapasitas, Kualitas SDM, dan Kompetensi</b>			
	8 Diklat Penjurangan Auditor Utama Non BPKP	1 Orang	8.580.000	
	9 Diklat Penjurangan Auditor Madya Non BPKP	1 Orang	4.580.000	
	10 Diklat Penjurangan Auditor Muda Non BPKP	1 Orang	5.430.000	
	11 Diklat Penjurangan Auditor Ahli Pertama Non BPKP	1 Orang	6.400.000	
	12 Diklat Penjurangan Auditor Terampil Non BPKP	1 Orang	5.380.000	
	13 Diklat Substansi Teknis 4 Hari Non BPKP	1 Orang	2.280.000	
	14 Diklat Teknis Substansi 5 Hari Non BPKP	1 Orang	2.550.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Bengkulu</b>			
	15 LHP Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	1 Laporan	62.147.000	
	16 LHP Pemantauan pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	1 Laporan	30.401.000	
	17 LHP Evaluasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	1 Laporan	40.154.000	
	18 LHP Review pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	1 Laporan	32.281.000	
	19 LHP Pemberian Keterangan Ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	1 Laporan	8.148.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara</b>			
	20 LHP Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Laporan	75.034.000	
	21 LHP Pemantauan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Laporan	36.573.000	
	22 LHP Evaluasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Laporan	48.225.000	
	23 LHP Review pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Laporan	38.453.000	
	24 LHP Pemberian Keterangan Ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Laporan	9.504.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi DKI Jakarta</b>			
	25 LHP Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	27.220.000	
	26 LHP Pemantauan pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	15.940.000	
	27 LHP Evaluasi pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	17.010.000	
	28 LHP Review pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	17.100.000	
	29 LHP Pemberian Keterangan Ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	8.520.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Jawa Barat</b>			
	30 LHP Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	1 Laporan	62.358.000	
	31 LHP Pemantauan pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	1 Laporan	32.085.000	
	32 LHP Evaluasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	1 Laporan	39.085.000	
	33 LHP Review pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	1 Laporan	34.265.000	
	34 LHP Pemberian Keterangan Ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	1 Laporan	8.452.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Jawa Tengah</b>			
	35 LHP Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	1 Laporan	63.560.000	
	36 LHP Pemantauan pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	1 Laporan	27.348.000	
	37 LHP Evaluasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	1 Laporan	43.902.000	
	38 LHP Review pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	1 Laporan	29.168.000	
	39 LHP Pemberian Keterangan Ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	1 Laporan	7.450.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta</b>			
	40 LHP Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi DI Yogyakarta	1 Laporan	74.071.000	
	41 LHP Pemantauan pada Perwakilan BPKP Provinsi DI Yogyakarta	1 Laporan	36.815.000	
	42 LHP Evaluasi pada Perwakilan BPKP Provinsi DI Yogyakarta	1 Laporan	46.586.000	
	43 LHP Review pada Perwakilan BPKP Provinsi DI Yogyakarta	1 Laporan	38.935.000	
	44 LHP Pemberian Keterangan Ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi DI Yogyakarta	1 Laporan	8.990.000	

AGW



Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Jawa Timur</b>			
45	LHP Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	1 Laporan	65.578.000	
46	LHP Pemantauan pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	1 Laporan	31.907.000	
47	LHP Evaluasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	1 Laporan	42.035.000	
48	LHP Review pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	1 Laporan	33.967.000	
49	LHP Pemberian Keterangan Ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	1 Laporan	8.044.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi D.I. Aceh</b>			
50	LHP Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Aceh	1 Laporan	63.278.000	
51	LHP Pemantauan pada Perwakilan BPKP Provinsi Aceh	1 Laporan	30.078.000	
52	LHP Evaluasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Aceh	1 Laporan	41.674.000	
53	LHP Review pada Perwakilan BPKP Provinsi Aceh	1 Laporan	31.838.000	
54	LHP Pemberian Keterangan Ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi Aceh	1 Laporan	8.254.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Sumatera Utara</b>			
55	LHP Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan	61.354.000	
56	LHP Pemantauan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan	29.220.000	
57	LHP Evaluasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan	40.344.000	
58	LHP Review pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan	31.040.000	
59	LHP Pemberian Keterangan Ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan	7.970.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Sumatera Selatan</b>			
60	LHP Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	1 Laporan	72.163.000	
61	LHP Pemantauan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	1 Laporan	35.738.000	
62	LHP Evaluasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	1 Laporan	45.465.000	
63	LHP Review pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	1 Laporan	37.618.000	
64	LHP Pemberian Keterangan Ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	1 Laporan	8.780.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Sumatera Barat</b>			
65	LHP Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	63.690.000	
66	LHP Pemantauan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	30.755.000	
67	LHP Evaluasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	41.079.000	
68	LHP Review pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	32.635.000	
69	LHP Pemberian Keterangan Ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	7.884.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Kalimantan Barat</b>			
70	LHP Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	62.057.000	
71	LHP Pemantauan pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	30.344.000	
72	LHP Evaluasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	40.275.000	
73	LHP Review pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	32.224.000	
74	LHP Pemberian Keterangan Ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	8.302.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan</b>			
75	LHP Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	1 Laporan	61.347.000	
76	LHP Pemantauan pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	1 Laporan	29.740.000	
77	LHP Evaluasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	1 Laporan	39.917.000	
78	LHP Review pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	1 Laporan	31.620.000	
79	LHP Pemberian Keterangan Ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	1 Laporan	8.050.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Sulawesi Utara</b>			
80	LHP Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	1 Laporan	71.336.000	
81	LHP Pemantauan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	1 Laporan	33.791.000	

Abu



Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
82	LHP Evaluasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	1 Laporan	46.273.000	
83	LHP Review pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	1 Laporan	35.611.000	
84	LHP Pemberian Keterangan Ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	1 Laporan	8.488.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan</b>			
85	LHP Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	68.518.000	
86	LHP Pemantauan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	32.985.000	
87	LHP Evaluasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	44.211.000	
88	LHP Review pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	35.165.000	
89	LHP Pemberian Keterangan Ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	8.318.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Maluku</b>			
90	LHP Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	1 Laporan	100.058.000	
91	LHP Pemantauan pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	1 Laporan	50.776.000	
92	LHP Evaluasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	1 Laporan	65.346.000	
93	LHP Review pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	1 Laporan	52.656.000	
94	LHP Pemberian Keterangan Ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	1 Laporan	15.804.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Bali</b>			
95	LHP Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali	1 Laporan	84.262.000	
96	LHP Pemantauan pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali	1 Laporan	41.975.000	
97	LHP Evaluasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali	1 Laporan	53.007.000	
98	LHP Review pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali	1 Laporan	44.455.000	
99	LHP Pemberian Keterangan Ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali	1 Laporan	10.260.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Irian Jaya</b>			
100	LHP Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Irian Jaya	1 Laporan	121.174.000	
101	LHP Pemantauan pada Perwakilan BPKP Provinsi Irian Jaya	1 Laporan	61.462.000	
102	LHP Evaluasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Irian Jaya	1 Laporan	92.225.000	
103	LHP Review pada Perwakilan BPKP Provinsi Irian Jaya	1 Laporan	64.542.000	
104	LHP Pemberian Keterangan Ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi Irian Jaya	1 Laporan	17.716.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Riau</b>			
105	LHP Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau	1 Laporan	72.820.000	
106	LHP Pemantauan pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau	1 Laporan	35.806.000	
107	LHP Evaluasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau	1 Laporan	46.184.000	
108	LHP Review pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau	1 Laporan	37.626.000	
109	LHP Pemberian Keterangan Ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau	1 Laporan	8.930.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Lampung</b>			
110	LHP Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	1 Laporan	53.789.000	
111	LHP Pemantauan pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	1 Laporan	26.420.000	
112	LHP Evaluasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	1 Laporan	35.079.000	
113	LHP Review pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	1 Laporan	28.300.000	
114	LHP Pemberian Keterangan Ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	1 Laporan	7.450.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Kalimantan</b>			
115	LHP Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	86.697.000	
116	LHP Pemantauan pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	43.447.000	
117	LHP Evaluasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	55.390.000	
118	LHP Review pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	45.627.000	
119	LHP Pemberian Keterangan Ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	11.780.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Jambi</b>			
120	LHP Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	1 Laporan	58.438.000	
121	LHP Pemantauan pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	1 Laporan	28.385.000	
122	LHP Evaluasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	1 Laporan	37.981.000	
123	LHP Review pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	1 Laporan	30.205.000	
124	LHP Pemberian Keterangan Ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	1 Laporan	7.688.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah</b>			
125	LHP Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	1 Laporan	78.708.000	
126	LHP Pemantauan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	1 Laporan	37.703.000	
127	LHP Evaluasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	1 Laporan	50.419.000	

AGW

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	128 LHP Review pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	1 Laporan	39.523.000	
	129 LHP Pemberian Keterangan Ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	1 Laporan	9.174.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>			
	130 LHP Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi NTT	1 Laporan	79.439.000	
	131 LHP Pemantauan pada Perwakilan BPKP Provinsi NTT	1 Laporan	39.520.000	
	132 LHP Evaluasi pada Perwakilan BPKP Provinsi NTT	1 Laporan	51.809.000	
	133 LHP Review pada Perwakilan BPKP Provinsi NTT	1 Laporan	41.700.000	
	134 LHP Pemberian Keterangan Ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi NTT	1 Laporan	11.530.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Banten</b>			
	135 LHP Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten	1 Laporan	61.584.000	
	136 LHP Pemantauan pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten	1 Laporan	33.994.000	
	137 LHP Evaluasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten	1 Laporan	36.732.000	
	138 LHP Review pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten	1 Laporan	35.814.000	
	139 LHP Pemberian Keterangan Ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten	1 Laporan	8.902.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Kepulauan Riau</b>			
	140 LHP Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	77.134.000	
	141 LHP Pemantauan pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	38.761.000	
	142 LHP Evaluasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	49.037.000	
	143 LHP Review pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	40.581.000	
	144 LHP Pemberian Keterangan Ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	10.424.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>			
	145 LHP Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan	63.582.000	
	146 LHP Pemantauan pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan	31.287.000	
	147 LHP Evaluasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan	40.630.000	
	148 LHP Review pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan	33.347.000	
	149 LHP Pemberian Keterangan Ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan	8.014.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>			
	150 LHP Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Laporan	67.144.000	
	151 LHP Pemantauan pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Laporan	32.675.000	
	152 LHP Evaluasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Laporan	43.409.000	
	153 LHP Review pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Laporan	34.915.000	
	154 LHP Pemberian Keterangan Ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Laporan	8.560.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah</b>			
	155 LHP Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	66.415.000	
	156 LHP Pemantauan pada Perwakilan BPKP Kalimantan Tengah	1 Laporan	32.597.000	
	157 LHP Evaluasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	42.764.000	
	158 LHP Review pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	34.357.000	
	159 LHP Pemberian Keterangan Ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	8.726.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Sulawesi Barat</b>			
	160 LHP Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	1 Laporan	70.342.000	
	161 LHP Pemantauan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	1 Laporan	33.210.000	
	162 LHP Evaluasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	1 Laporan	45.809.000	
	163 LHP Review pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	1 Laporan	35.270.000	
	164 LHP Pemberian Keterangan Ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	1 Laporan	8.357.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Gorontalo</b>			
	165 LHP Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	1 Laporan	70.712.000	
	166 LHP Pemantauan pada Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	1 Laporan	33.517.000	
	167 LHP Evaluasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	1 Laporan	45.907.000	
	168 LHP Review pada Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	1 Laporan	35.337.000	

AN



Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
169	LHP Pemberian Keterangan Ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo <b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Maluku Utara</b>	1 Laporan	8.472.000	
170	LHP Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	1 Laporan	73.330.000	
171	LHP Pemantauan pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	1 Laporan	34.850.000	
172	LHP Evaluasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	1 Laporan	48.866.000	
173	LHP Review pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	1 Laporan	37.030.000	
174	LHP Pemberian Keterangan Ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara <b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Papua Barat</b>	1 Laporan	10.026.000	
175	LHP Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	1 Laporan	95.380.000	
176	LHP Pemantauan pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	1 Laporan	45.370.000	
177	LHP Evaluasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	1 Laporan	63.700.000	
178	LHP Review pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	1 Laporan	47.850.000	
179	LHP Pemberian Keterangan Ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat <b>LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Bengkulu</b>	1 Laporan	13.230.000	
180	LHP Pembinaan SPIP BPKP Propinsi Bengkulu <b>LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara</b>	1 Laporan	32.175.000	
181	LHP Pembinaan SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara <b>LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi DKI Jakarta</b>	1 Laporan	39.275.000	
182	LHP Pembinaan SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta <b>LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Jawa Barat</b>	1 Laporan	15.940.000	
183	LHP Pembinaan SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat <b>LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Jawa Tengah</b>	1 Laporan	33.867.000	
184	LHP Pembinaan SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah <b>LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta</b>	1 Laporan	28.656.000	
185	LHP Pembinaan SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi DI Yogyakarta <b>LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Jawa Timur</b>	1 Laporan	38.645.000	
186	LHP Pembinaan SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur <b>LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi D.I. Aceh</b>	1 Laporan	33.213.000	
187	LHP Pembinaan SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Aceh <b>LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Sumatera Utara</b>	1 Laporan	32.110.000	
188	LHP Pembinaan SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara <b>LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Sumatera Selatan</b>	1 Laporan	30.960.000	
189	LHP Pembinaan SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan <b>LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Sumatera Barat</b>	1 Laporan	37.566.000	
190	LHP Pembinaan SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat <b>LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Kalimantan Barat</b>	1 Laporan	32.109.000	
191	LHP Pembinaan SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat <b>LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Kalimantan Selatan</b>	1 Laporan	32.340.000	
192	LHP Pembinaan SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan <b>LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Sulawesi Utara</b>	1 Laporan	31.480.000	
193	LHP Pembinaan SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara <b>LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Sulawesi Selatan</b>	1 Laporan	35.545.000	
194	LHP Pembinaan SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan <b>LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Maluku</b>	1 Laporan	34.443.000	
195	LHP Pembinaan SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku <b>LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Bali</b>	1 Laporan	60.016.000	
196	LHP Pembinaan SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali <b>LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Irian Jaya</b>	1 Laporan	44.585.000	
197	LHP Pembinaan SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Irian Jaya	1 Laporan	71.090.000	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Riau</b>			
198	LHP Pembinaan SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau	1 Laporan	37.862.000	
	<b>LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Lampung</b>			
199	LHP Pembinaan SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	1 Laporan	27.840.000	
	<b>LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Kalimantan Timur</b>			
200	LHP Pembinaan SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	48.089.000	
	<b>LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Jambi</b>			
201	LHP Pembinaan SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	1 Laporan	29.863.000	
	<b>LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Sulawesi Tengah</b>			
202	LHP Pembinaan SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	1 Laporan	37.903.000	
	<b>LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>			
203	LHP Pembinaan SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi NTT	1 Laporan	44.420.000	
	<b>LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Banten</b>			
204	LHP Pembinaan SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten	1 Laporan	36.290.000	
	<b>LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Kepulauan Riau</b>			
205	LHP Pembinaan SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	42.431.000	
	<b>LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>			
206	LHP Pembinaan SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan	32.647.000	
	<b>LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>			
207	LHP Pembinaan SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Laporan	34.485.000	
	<b>LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Kalimantan Tengah</b>			
208	LHP Pembinaan SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	34.895.000	
	<b>LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Sulawesi Barat</b>			
209	LHP Pembinaan SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	1 Laporan	34.749.000	
	<b>LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Gorontalo</b>			
210	LHP Pembinaan SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	1 Laporan	35.291.000	
	<b>LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Maluku Utara</b>			
211	LHP Pembinaan SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	1 Laporan	38.386.000	
	<b>LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Papua Barat</b>			
212	LHP Pembinaan SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	1 Laporan	51.570.000	
	<b>LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Bengkulu</b>			
213	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	1 Laporan	29.625.000	
	<b>LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara</b>			
214	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Laporan	36.225.000	
	<b>LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi DKI Jakarta</b>			
215	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	14.500.000	
	<b>LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Jawa Barat</b>			
216	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	1 Laporan	31.105.000	
	<b>LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Jawa Tengah</b>			
217	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	1 Laporan	26.440.000	
	<b>LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta</b>			
218	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP pada Perwakilan BPKP Provinsi DI Yogyakarta	1 Laporan	36.425.000	
	<b>LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Jawa Timur</b>			
219	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	1 Laporan	31.195.000	
	<b>LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi D.I. Aceh</b>			
220	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Aceh	1 Laporan	29.350.000	



Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Sumatera Utara</b>			
221	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan	28.400.000	
	<b>LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Sumatera Selatan</b>			
222	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	1 Laporan	35.540.000	
	<b>LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Sumatera Barat</b>			
223	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	30.135.000	
	<b>LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Kalimantan Barat</b>			
224	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	29.500.000	
	<b>LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Kalimantan Selatan</b>			
225	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	1 Laporan	28.900.000	
	<b>LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Sulawesi Utara</b>			
226	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	1 Laporan	33.475.000	
	<b>LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Sulawesi Selatan</b>			
227	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	32.195.000	
	<b>LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Maluku</b>			
228	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	1 Laporan	50.190.000	
	<b>LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Bali</b>			
229	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali	1 Laporan	41.475.000	
	<b>LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Irian Jaya</b>			
230	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Irian Jaya	1 Laporan	60.400.000	
	<b>LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Riau</b>			
231	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau	1 Laporan	35.630.000	
	<b>LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Lampung</b>			
232	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	1 Laporan	25.300.000	
	<b>LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Kalimantan Timur</b>			
233	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	42.935.000	
	<b>LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Jambi</b>			
234	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	1 Laporan	27.545.000	
	<b>LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Sulawesi Tengah</b>			
235	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	1 Laporan	37.725.000	
	<b>LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>			
236	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP pada Perwakilan BPKP Provinsi NTT	1 Laporan	38.500.000	
	<b>LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Banten</b>			
237	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten	1 Laporan	33.550.000	
	<b>LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Kepulauan Riau</b>			
238	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	38.465.000	
	<b>LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>			
239	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan	30.491.000	

AGV





Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>			
240	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Laporan	31.675.000	
	<b>LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Kalimantan Tengah</b>			
241	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	32.075.000	
	<b>LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Sulawesi Barat</b>			
242	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	1 Laporan	32.579.000	
	<b>LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Gorontalo</b>			
243	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	1 Laporan	33.165.000	
	<b>LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Maluku Utara</b>			
244	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	1 Laporan	33.690.000	
	<b>LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Papua Barat</b>			
245	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	1 Laporan	44.250.000	
	<b>Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Kalimantan Utara</b>			
246	LHP Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara	1 Laporan	86.710.000	
247	LHP Pemantauan pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara	1 Laporan	43.497.000	
248	LHP Evaluasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara	1 Laporan	55.373.000	
249	LHP Review pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara	1 Laporan	45.677.000	
250	LHP Pemberian Keterangan Ahli pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara	1 Laporan	11.800.000	
	<b>LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Kalimantan Utara</b>			
251	LHP Pembinaan SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara	1 Laporan	48.159.000	
	<b>LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Kalimantan Utara</b>			
252	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara	1 Laporan	42.985.000	

Atm



Kementerian Negara/Lembaga: Komisi Yudisial (100)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
100.01	<b>Komisi Yudisial</b> <b>SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Investigasi Pendalaman Kasus</b>			
	1 Laporan Investigasi Pendalaman Kasus	30 Laporan	1.538.400.000	
	2 Laporan Pengamatan dan Penggambaran Perilaku Hakim Berkelanjutan	5 Laporan	569.969.000	
	3 Laporan Investigasi Deteksi Dini	2 Laporan	349.484.000	
	<b>Investigasi Rekam Jejak Hakim dan Calon Hakim</b>			
	4 Laporan Penelusuran Rekam Jejak Hakim dan Calon Hakim	40 Laporan	1.301.088.000	
	<b>Penanganan Laporan Masyarakat</b>			
	5 Penanganan Laporan Masyarakat Sampai Keluarnya Putusan	130 Putusan	5.042.953.000	

Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (106)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
106.01	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran (Output) 1 Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Barang/Jasa Pemerintah	218 Penyelenggaraan	3.260.122.000	

ABW



Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
116.01	<b>Lembaga Penyiaran Publik - Radio Republik Indonesia</b> <b>SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output)</b>			
	<b>Program, Produksi dan Pengembangan Siaran Internasional</b>			
	1 Program Siaran Dialog Interaktif di Dalam Studio	1 Paket Acara	3.501.000	
	2 Program Siaran Dialog Interaktif di Luar Studio	1 Paket Acara	4.792.000	
	3 Program Produksi SPOT	1 Paket Acara	198.000	
	4 Program Produksi <i>Bulletin</i> Berita	1 Paket Acara	792.000	
	5 Program Produksi <i>Feature</i>	1 Paket Acara	665.000	
	6 Program Produksi Laporan Mendalam	1 Paket Acara	980.000	
	7 Program Siaran Langsung Reportase	1 Paket Acara	1.673.000	
	8 Program Produksi Majalah Udara	1 Paket Acara	932.000	
	9 Program Siaran KUIS	1 Paket Acara	395.000	
	10 Program Produksi Sandiwara Radio	1 Paket Acara	1.713.000	
	11 Program Produksi Komentar	1 Paket Acara	455.000	
	12 Program Produksi Dokumenter	1 Paket Acara	1.385.000	
	13 Program Produksi Kaleidoskop	1 Paket Acara	1.470.000	
	14 Program Siaran Obrolan	1 Paket Acara	466.000	
	15 Program Produksi <i>Filler</i>	1 Paket Acara	329.000	
	16 Program Siaran <i>Report On The Spot (ROS)</i>	1 Paket Acara	71.000	
	17 Program Siaran Wawancara	1 Paket Acara	513.000	
	18 Program Produksi Adlibs	1 Paket Acara	134.000	
	<b>Program, Produksi Siaran dan Pemberitaan untuk Siaran Lokal, Regional dan Nasional</b>			
	19 Program Siaran Dialog Interaktif di Dalam Studio	1 Paket Acara	1.066.000	
	20 Program Siaran Dialog Interaktif di Luar Studio	1 Paket Acara	4.140.000	
	21 Program Produksi SPOT	1 Paket Acara	171.000	
	22 Program Produksi <i>Bulletin</i> Berita	1 Paket Acara	767.000	
	23 Program Siaran Produksi <i>Feature</i>	1 Paket Acara	588.000	
	24 Program Produksi Laporan Mendalam	1 Paket Acara	875.000	
	25 Program Siaran Langsung Reportase	1 Paket Acara	1.672.000	
	26 Program Produksi Majalah Udara	1 Paket Acara	819.000	
	27 Program Siaran KUIS	1 Paket Acara	357.000	
	28 Program Produksi Sandiwara Radio	1 Paket Acara	1.601.000	
	29 Program Siaran Pagelaran	1 Paket Acara	12.777.000	
	30 Program Produksi Komentar	1 Paket Acara	402.000	
	31 Program Produksi Dokumenter	1 Paket Acara	1.271.000	
	32 Program Produksi Kaleidoskop	1 Paket Acara	1.357.000	
	33 Program Siaran Obrolan	1 Paket Acara	410.000	
	34 Program Produksi <i>Filler</i>	1 Paket Acara	292.000	
	35 Program Produksi <i>Report On The Spot (ROS)</i>	1 Paket Acara	71.000	
	36 Program Produksi Pendekatan <i>Development Broadcasting Unit (DBU)</i>	1 Paket Acara	2.644.000	
	37 Program Siaran Wawancara	1 Paket Acara	514.000	
	<b>Penyelenggaraan Siaran Pemberitaan</b>			
	38 Program Dialog Interaktif di Dalam Studio	1 Paket Acara	4.149.000	
	39 Program Siaran Dialog Interaktif di Luar Studio	1 Paket Acara	5.439.000	
	40 Program Produksi SPOT	1 Paket Acara	450.000	
	41 Program Produksi <i>Bulletin</i> Berita	1 Paket Acara	766.000	
	42 Program Siaran Produksi <i>Feature</i>	1 Paket Acara	587.000	
	43 Program Produksi Laporan Mendalam	1 Paket Acara	873.000	
	44 Program Siaran Langsung Reportase	1 Paket Acara	1.670.000	
	45 Program Produksi Majalah Udara	1 Paket Acara	820.000	
	46 Program Siaran KUIS	1 Paket Acara	357.000	
	47 Program Produksi Komentar	1 Paket Acara	822.000	
	48 Program Produksi Dokumenter	1 Paket Acara	1.273.000	
	49 Program Produksi Kaleidoskop	1 Paket Acara	1.357.000	
	50 Program Siaran Obrolan	1 Paket Acara	411.000	
	51 Program Produksi <i>Filler</i>	1 Paket Acara	292.000	
	52 Program Produksi <i>Report On The Spot (ROS)</i>	1 Paket Acara	70.000	
	53 Program Siaran <i>Flash News</i>	1 Paket Acara	21.000	
	54 Program Siaran Wawancara	1 Paket Acara	515.000	
	55 Program Siaran Pendekatan <i>Development Broadcasting Unit (DBU)</i>	1 Paket Acara	4.447.000	
	56 Program Siaran Adlibs	1 Paket Acara	134.000	

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T U. Kementerian



ARIE BINTARNO YUWONO  
NIP 197109121997031001